



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN KLUNGKUNG
TAHUN 2019**

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Om Swastiastu,

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan dan tuntunan Beliau kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 tepat pada waktunya sesuai dengan rencana.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud kepatuhan Pemerintah Kabupaten Klungkung terhadap ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Klungkung ini, sebagai media informasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta pencapaian tujuan dan sasaran dalam upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Klungkung sebagaimana tertuang dalam Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 ini, sebagai wujud komitmen kami untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel dalam upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil. Kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan dan sebagai parameter pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 dan sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Kami tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkerja keras menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, bermanfaat dan sesuai dengan harapan kita semua.

Sekian dan terima kasih.

Om Santih, Santih, Santih, Om.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I	: PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi	4
1.3 Isu Strategis Pembangunan Daerah	5
1.4 Ruang Lingkup	18
BAB II	: PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	20
2.2 Indikator Kinerja Utama	31
2.3 Rencana Kinerja Tahunan	33
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2018	33
BAB III	: AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Pengukuran Kinerja	35
3.2 Analisis Capaian Kinerja	36
3.3 Realisasi Anggaran	37
3.4 Efisiensi Sejak Penerapan SAKIP	162
3.4 Prestasi dan Penghargaan Tahun 2018	165
BAB IV	: PENUTUP
4.1 Kesimpulan	170
4.2 Rekomendasi	170
LAMPIRAN	: Capaian Kinerja dan Keuangan Masing – Masing Sasaran Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tata kelola Pemerintah yang baik, transparan dan akuntabel (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Oleh karena itu diperlukan penerapan manajemen kinerja dan pembangunan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Melihat perkembangan yang terjadi saat ini, pemerintah daerah memiliki agenda dan tanggung jawab yang sangat besar, termasuk pula didalamnya keharusan pemerintah daerah untuk melakukan revolusi mental dan reformasi birokrasi dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan sejahtera.

Dalam upaya menggerakkan segenap potensi pembangunan yang ada di daerah, diperlukan perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dan berkelanjutan, sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh serta senantiasa tanggap terhadap perubahan dan tantangan yang semakin berat, sehingga dalam hal perencanaan pembangunan daerah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan tingkat provinsi dan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi **kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas**. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan Kinerja disampaikan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam perspektif yang lebih luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 berisikan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2019 beserta perubahannya dan Perjanjian Kinerja Bupati Klungkung Tahun 2019 beserta perubahannya menyajikan target sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung pada tahun 2019. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Klungkung menyajikan informasi mengenai pencapaian sasaran tahun 2019, pencapaian sasaran tiga tahun terakhir serta pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja. Dengan demikian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klungkung yang menjadi

laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Klungkung ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam laporan akuntabilitas kinerja ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2019 dengan realisasi anggaran yang belum direkonsiliasi mengingat keterbatasan waktu penyusunan laporan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klungkung Tahun 2019 memperhatikan peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaannya yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2018-2023;
9. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penetapan

Indikator Kinerja Utama Pemerintah;

10. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2019;
11. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 88 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
12. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung Perubahan Tahun 2019.

1.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Untuk dapat melaksanakan urusan tersebut dibentuk organisasi perangkat daerah. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Klungkung sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung, terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Delapan belas Dinas Daerah terdiri dari :
 - a. Dinas Kesehatan;
 - b. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan

- Permukiman;
- d. Dinas Pendidikan;
 - e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - h. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga;
 - i. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
 - k. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
 - l. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - n. Dinas Perhubungan;
 - o. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 - p. Dinas Pariwisata;
 - q. Dinas Pertanian;
 - r. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
5. Lima Badan Daerah terdiri dari :
- a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - c. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
6. Empat Kecamatan terdiri dari :
- a. Kecamatan Dawan;
 - b. Kecamatan Banjarangkan;
 - c. Kecamatan Klungkung;
 - d. Kecamatan Nusa Penida.

1.3. Isu Strategis Pembangunan Daerah

1.3.1. Kondisi Geografis Kabupaten Klungkung

Kabupaten Klungkung merupakan Kabupaten yang memiliki luas wilayah terkecil dibandingkan dengan luas kabupaten/kota di Bali. Secara geografis Kabupaten Klungkung terletak pada posisi 115^o21'28" – 115^o37'43" Bujur Timur dan 80^o27'37" – 80^o49'00" Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Bangli
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Karangasem
- c. Sebelah Selatan : Samudra Hindia
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Gianyar



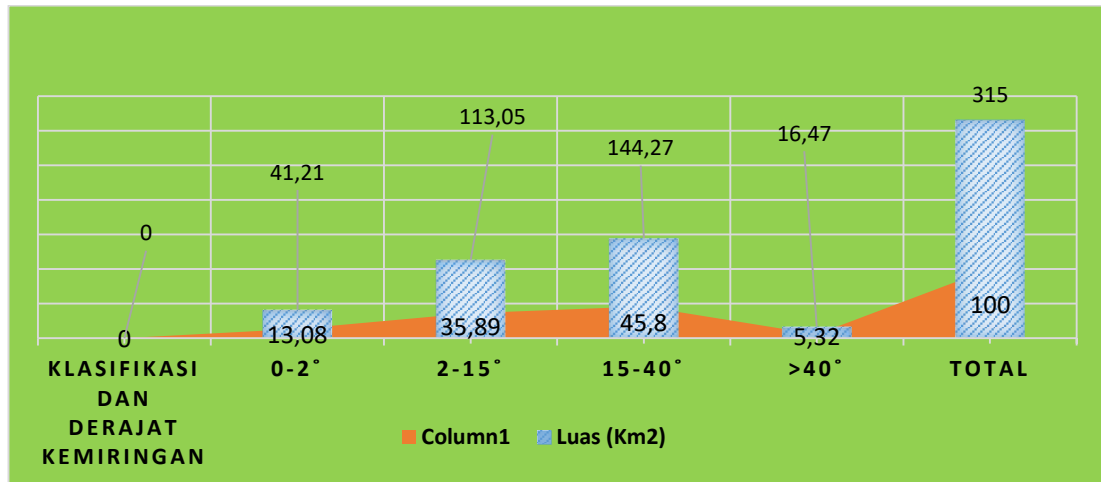
Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2019

Gambar 1.1 Luas Wilayah Kabupaten Klungkung Per Kecamatan

Luas wilayah Kabupaten Klungkung adalah 315 km² atau 5,60 % dari total luas Provinsi Bali dan merupakan luas wilayah kabupaten/kota terkecil kedua setelah luas wilayah Kota Denpasar. Luas wilayah Kabupaten Klungkung terbagi dalam dua bagian yaitu Klungkung kepulauan (Kepulauan Nusa Penida) dengan luas mencapai 202,84 ha (2/3 dari total luas) dan wilayah Klungkung di daratan Pulau Bali seluas 112,16 ha. Luas Kabupaten Klungkung adalah 315 km² atau 31.500 hektar.

Sebagai daerah yang memiliki wilayah kepulauan, maka Kabupaten Klungkung memiliki pantai dengan panjang sekitar 77,7 km terdiri dari 10,5 km terdapat di Klungkung daratan dan sisanya 67,2 km di Kepulauan Nusa Penida. Permukaan tanah pada umumnya tidak rata, bergelombang bahkan sebagian besar berupa bukit-bukit terjal yang kering dan tandus, dan hanya sebagian kecil luasan dataran. Luas daratan Kabupaten Klungkung sebagian besar berada di kemiringan 15-40° dengan luas 144,27 km². Permukaan tanah di Kabupaten Klungkung pada umumnya tidak rata, bergelombang bahkan sebagian besar

berupa bukit-bukit terjal yang kering serta tandus dan sebagian kecil saja merupakan dataran rendah. Tingkat kemiringan/lereng di Kabupaten Klungkung dirinci menurut klasifikasi dan luasnya terbagi sebagaimana dalam gambar di bawah ini.



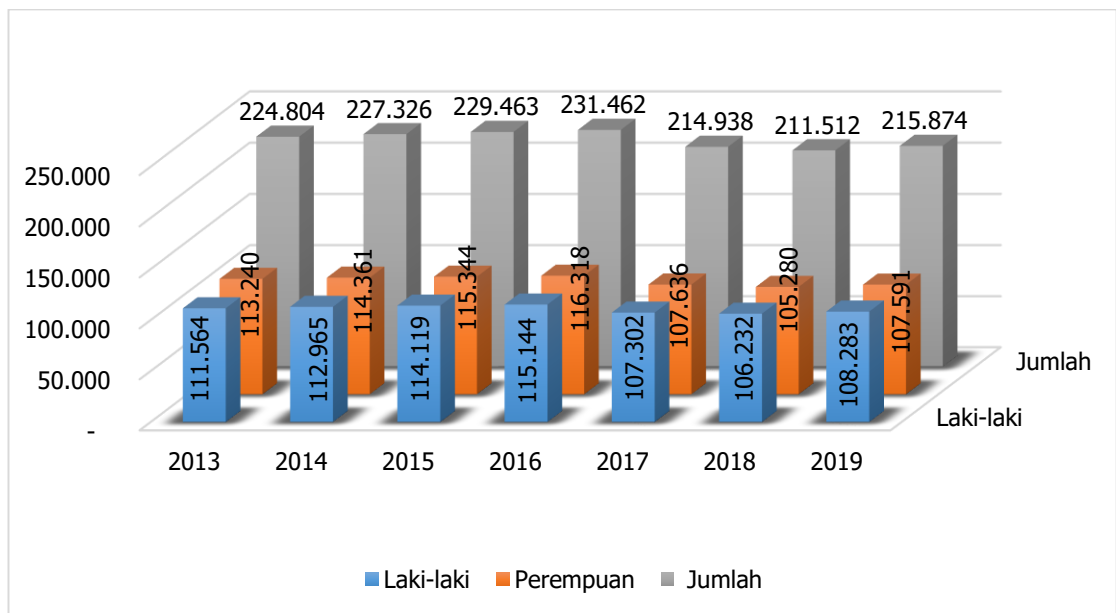
Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2019

Gambar 1.2. Luas Daratan Kabupaten Klungkung menurut klasifikasi kemiringan.

Di Kecamatan Nusa Penida, secara umum kondisi topografi tergolong landai sampai berbukit. Desa pesisir di sepanjang pantai bagian utara berupa lahan datar dengan kemiringan 0 - 3 % dari ketinggian lahan 0 – 268 m dpl. Semakin ke selatan kemiringan lerengnya semakin bergelombang. Demikian juga pulau Lembongan bagian Utara merupakan lahan datar dengan kemiringan 0 -3% dan di bagian Selatan kemiringannya mencapai 3 - 8%. Sedangkan Pulau Ceningan mempunyai kemiringan lereng bervariasi antara 8 - 15% dan 15 - 30% dengan kondisi tanah bergelombang dan berbukit. Sumber air di Klungkung Daratan (Wilayah Kabupaten Klungkung yang berada di Pulau Bali) berasal dari sungai yang mengalir sepanjang tahun sedangkan di Kepulauan Nusa Penida sumber air berasal dari air hujan dan sebagian kecil dari mata air. Penduduk memanfaatkan air hujan dengan menampung dalam cubang (penampungan) untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi daratan yang berbukit, terjal dan tandus menjadi tantangan tersendiri dalam mobilisasi kebutuhan hidup masyarakat. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab tidak seimbang pembangunan di Klungkung Daratan dan Kepulauan.

1.3.2. Kependudukan

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung, jumlah penduduk Kabupaten Klungkung pada Tahun 2019 berjumlah 215.874 jiwa yang terdiri atas jumlah penduduk laki-laki sebanyak 108.283 jiwa atau 50,16 persen dan penduduk perempuan berjumlah 107.591 jiwa atau 49,84 persen. Jumlah penduduk tahun 2019 meningkat sebanyak 4.362 jiwa dari jumlah penduduk tahun 2018 yang berjumlah sebesar 211.512 jiwa. Adapun gambaran jumlah penduduk dalam tujuh tahun terakhir adalah sebagaimana diuraikan dalam gambar dibawah ini.



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

Gambar 1.3. Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2019 (jiwa)

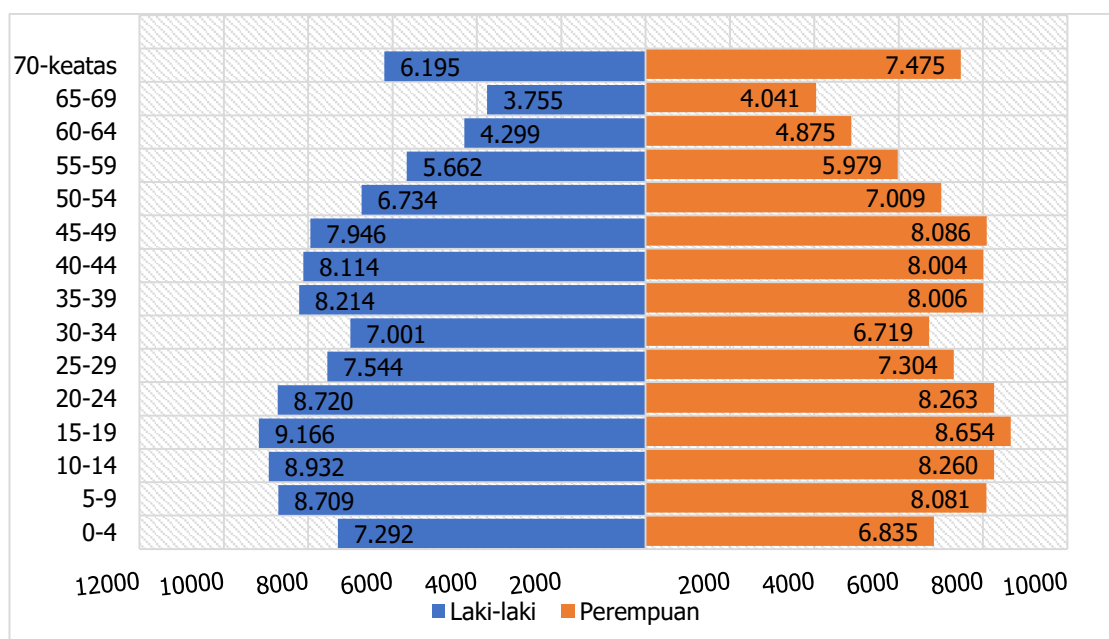
Jumlah penduduk per kecamatan pada tahun 2019 adalah sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.1.
Jumlah Penduduk Kabupaten Klungkung per Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Nusa Penida	31.139	30.149	61.288
2	Banjarangkan	23.486	23.259	46.745
3	Klungkung	32.272	32.697	64.969
4	Dawan	21.386	21.486	42.872
	Jumlah	108.283	107.591	215.874

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

Berdasarkan tabel diatas maka jumlah penduduk tertinggi terdapat di wilayah Kecamatan Klungkung sebanyak 64.969 jiwa (30,10%) dan yang terendah pada Kecamatan Dawan yaitu sebesar 42.872 jiwa (19,86%). Sedangkan jika dilihat dari kelompok umur, maka piramida penduduk Klungkung menunjukkan bahwa kelompok umur produktif (15-64 tahun) lebih tinggi dibandingkan kelompok umur muda (0-14 tahun) dan kelompok umur tua (65-keatas). Kelompok umur muda (0-14 tahun) sebanyak 22,29% dari keseluruhan penduduk, sedangkan kelompok umur produktif (15-64 tahun) sebanyak 67,77% dan kelompok umur tua (65-70 keatas) sebanyak 9,94 persen dari keseluruhan penduduk Kabupaten Klungkung.



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

Gambar 1.4. Jumlah Penduduk Kabupaten Klungkung Tahun 2019 menurut Kelompok Umur (jiwa)

Berdasarkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan maka *sex ratio* penduduk di Kabupaten Klungkung pada tahun 2019 sebesar 100,6% yang mengindikasikan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Sedangkan jika dilihat dari komposisi penduduk menurut kelompok umur maka penduduk Kabupaten Klungkung membentuk piramida penduduk ekspansif yang menggambarkan sebagian besar penduduk berada dalam kelompok produktif.

Penduduk Kabupaten Klungkung tahun 2019 berdasarkan tingkat pendidikan terbesar masih Belum/Tidak Sekolah yaitu 28,25 % dan Belum Tamat

SD/Sederajat 9,51%, SD/Sederajat sebesar 20,82%, Kabupaten Klungkung masih memiliki potensi penduduk yang memiliki pendidikan menengah keatas sampai pendidikan tinggi yang cukup besar yaitu sebesar 41,42%. Potensi tersebut setiap tahunnya akan terus berkembang seiring peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan tinggi serta berkembangnya program pembiayaan / beasiswa bagi pendidikan.

Tabel 1.2.
Penduduk Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1.	Belum/Tidak Sekolah	60.987	28,25
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	20.523	9,51
3.	SD/Sederajat	44.954	20,82
4.	Tamat SLTP/Sederajat	25.404	11,77
5.	Tamat SLTA/Sederajat	47.461	21,99
6.	Diploma I/II	4.434	2,05
7.	Akademi/ Diploma III/S. Muda	2.490	1,15
8.	Diploma IV/ Strata I	9.069	4,20
9.	Strata II	525	0,24
10.	Strata III	27	0,01
	Total	215.874	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

Berdasarkan perbandingan jumlah penduduk hasil Sensus Penduduk Tahun 2000 dengan Tahun 2010 maka dapat dijelaskan pertumbuhan penduduk Kabupaten Klungkung mencapai 0,95 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Kecamatan Banjarangkan sebesar 1,41 persen dan Kecamatan Klungkung sebesar 1,40 persen. Adapun selengkapnya gambaran pertumbuhan penduduk Kabupaten Klungkung per kecamatan adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1.3.
Pertumbuhan Penduduk menurut Kecamatan berdasarkan hasil Sensus Penduduk

No	Kecamatan	Penduduk		Pertumbuhan (Growth)
		2000	2010	
1	Nusa Penida	44,886	45,110	0,05
2	Banjarangkan	32,307	37,115	1,41
3	Klungkung	48,017	55,141	1,40
4	Dawan	29,954	33,177	1,00
	Jumlah	155,164	170,543	0,95

Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2020

Seiring dengan pertumbuhan penduduk, maka terjadi peningkatan kepadatan penduduk. Pada tahun 2013, kepadatan penduduk Kabupaten Klungkung mencapai 552 jiwa/km² bertambah menjadi 566,03 jiwa/km² pada tahun 2018. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Klungkung yang mencapai 2015,00 jiwa/km² dan yang terendah terdapat di Kecamatan Nusa Penida yang hanya mencapai 225,00 jiwa/km².

Tabel 1.4.
Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan

NO	Kecamatan	Penduduk/km ²					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Nusa Penida	224	224	224	224,17	224	225
2	Banjarangkan	834	839	845	851,08	856	863
3	Klungkung	1947	1962	1974	1992,43	2003	2015
4	Dawan	905	910	915	921,08	924	929
	Jumlah	552	555	557	560,95	563	566.03

Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2020

Mata pencaharian masyarakat Klungkung didominasi pertanian /peternakan /perikanan sebesar 34.870 jiwa atau sebesar 16,15%. Kondisi penduduk yang belum / tidak bekerja cukup banyak yaitu sebanyak 59.059 jiwa atau sebesar 27,36%. Kondisi tersebut dikarenakan penduduk yang berusia tidak produktif yaitu usia 0-4 dan > 60 tahun yang sebesar 20,73% dan sisanya merupakan angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan. Perbandingan antara penduduk yang bekerja dan tidak bekerja serta penduduk yang bukan angkatan kerja di Kabupaten Klungkung masih cukup baik karena prosentase penduduk yang bekerja adalah sebesar 59,08% sedangkan sisanya adalah belum / tidak bekerja dan masih berstatus pelajar.

Tabel 1.5.
Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2019

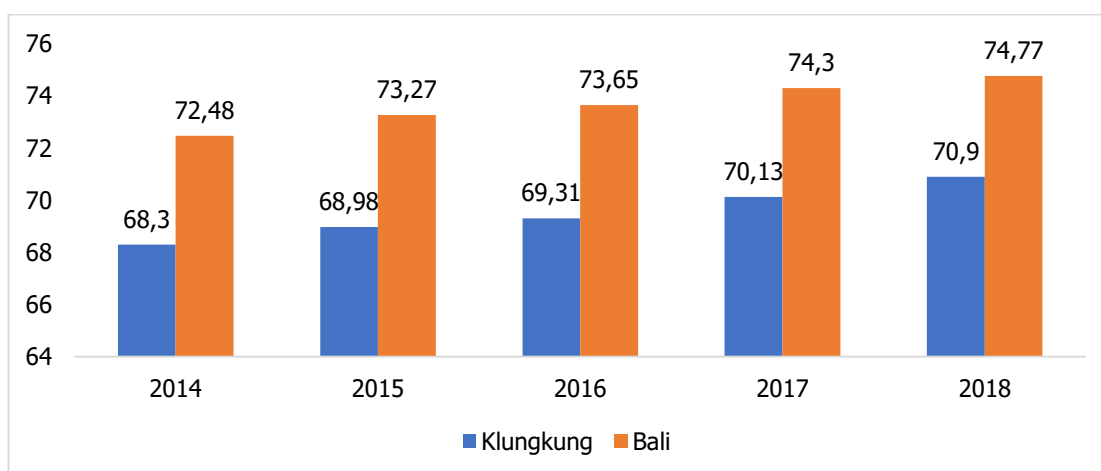
No.	Pekerjaan	Jumlah	%
1.	Belum/Tidak Bekerja	59.059	27,36
2.	Pelajar/Mahasiswa	29.267	13,56
3.	Pertanian/Pertenakan/Perikanan	34.870	16,15
4.	Perdagangan	9.349	4,33
5.	Industri	357	0,17
6.	Perangkat desa	374	0,17
7.	Kontruksi	284	0,13
8.	PNS	4.762	2,21
9.	Swasta	30.172	13,98

No.	Pekerjaan	Jumlah	%
10.	Wiraswasta	15.616	7,23
11.	Lainnya	31.764	14,71
	Total	215.874	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

1.3.3. Indeks Pembangunan Manusia

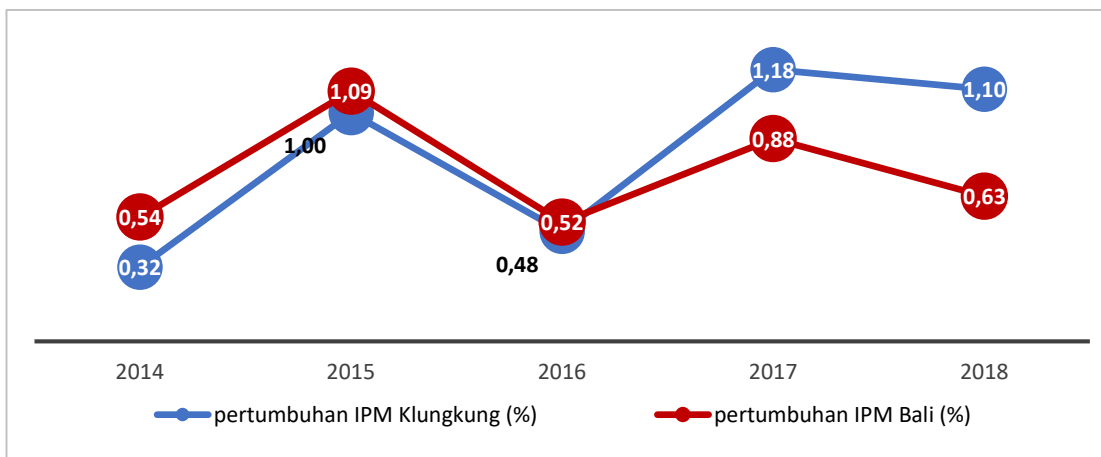
Persoalan utama yang dihadapi Kabupaten Klungkung adalah upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur dengan beberapa indikator seperti derajat kesehatan masyarakat, tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klungkung Tahun 2019 sebagai berikut:



Sumber : BPS Prov. Bali, 2020

Gambar 1.5. Perbandingan IPM Kabupaten Klungkung dan Provinsi Bali Tahun 2014-2018

Dalam lima tahun terakhir IPM Kabupaten Klungkung mengalami peningkatan dan pertumbuhannya juga cenderung meningkat. Pada tahun 2014, IPM Kabupaten Klungkung mencapai 68,3 dengan laju pertumbuhan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 0,32% meningkat menjadi 70,9 dengan tingkat pertumbuhan mencapai 1,1%. Meski capaian IPM Klungkung lebih rendah dari provinsi tetapi dari pertumbuhan lebih tinggi dari pertumbuhan IPM Provinsi Bali sebagaimana ditampilkan gambar dibawah.

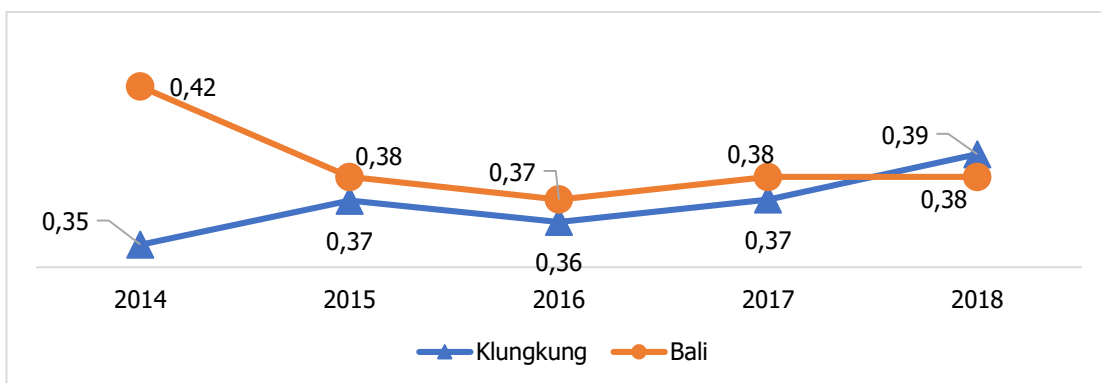


Sumber : BPS Prov. Bali, 2020

Gambar 1.6. Perbandingan laju pertumbuhan IPM Kabupaten Klungkung dan Provinsi Bali Tahun 2014-2018

1.3.4. Ketimpangan Pendapatan

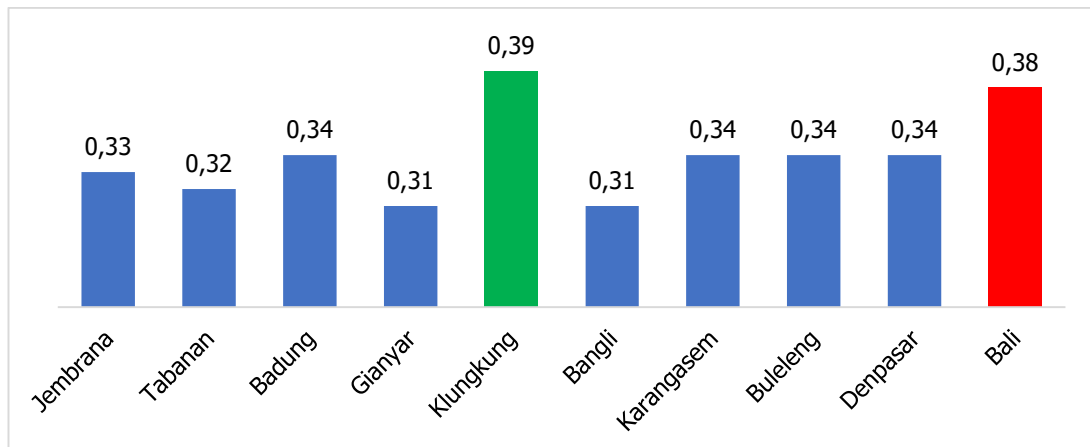
Distribusi pendapatan di Kabupaten Klungkung masih dalam kisaran ketimpangan rendah. Hasil pembangunan belum dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dengan kontribusi yang lebih seimbang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung, *Gini ratio* Kabupaten Klungkung dalam lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan yaitu dari 0,35 di tahun 2014 menjadi 0,39 di tahun 2018. Adapun perkembangan *gini ratio* Kabupaten Klungkung dan perbandingannya dengan *gini ratio* Kabupaten/Kota di Bali tahun 2014 – 2018 adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.



Sumber : BPS Prov. Bali, 2020

Gambar 1.7. Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Klungkung dengan Provinsi Bali Tahun 2014-2018

Pada tahun 2018 capaian gini ratio Kabupaten Klungkung mengalami peningkatan menjadi 0,39 dan untuk pertama kali berada di atas capaian Provinsi Bali yang mencapai 0,38. Sedangkan dibandingkan dengan Kabupaten Kota lainnya di Bali pada tahun 2018, gini ratio Kabupaten Klungkung merupakan yang tertinggi di Bali dan yang terendah dicapai oleh Kabupaten Bangli dan Gianyar yaitu sebesar 0,31. Adapun perkembangan gini ratio Kabupaten/Kota lain di Provinsi Bali adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.



Sumber : BPS Provinsi Bali, 2020

Gambar 1.8 Perbandingan *Gini Ratio* Kabupaten Klungkung Tahun 2018 dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Bali.

1.3.5. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Kabupaten Klungkung dalam 5 tahun terakhir terus menurun yaitu dari 7,01% di tahun 2014 menjadi 5,86% di tahun 2018, meski masih di atas tingkat kemiskinan Provinsi Bali yang sebesar 4,01%. Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Bali, Tingkat Kemiskinan Kabupaten Klungkung masih berada di peringkat ke 2 tertinggi dibawah Kabupaten Karangasem. Garis kemiskinan di Kabupaten Klungkung terus mengalami peningkatan sejalan dengan inflasi. Berdasarkan garis kemiskinan tersebut, maka dapat dihitung persentase penduduk miskin. Tahun 2014 garis kemiskinan Kabupaten Klungkung ditetapkan sebesar Rp. 253.717,00 menjadi Rp 310.764,00 di tahun 2018. Tabel dibawah ini menyajikan perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Klungkung dari sisi jumlah serta kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Tabel 1.6.
Indikator Kemiskinan Kabupaten Klungkung, 2014-2018

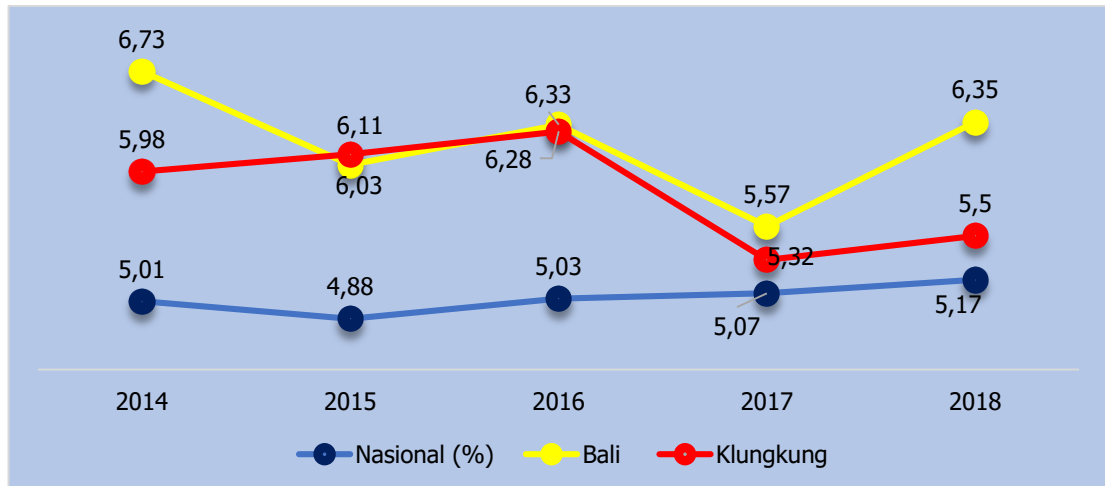
Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	12,3	12,10	11,21	11,15	10,43
Persentase Penduduk Miskin (Po)	7,01	6,91	6,35	6,29	5,86
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,96	1	0,78	0,33	0,79
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,21	0,22	0,13	0,04	0,21
Garis Kemiskinan	253.717	264.866	284.789	299.664	310.764

Sumber : Klungkung Dalam Angka, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kondisi kemiskinan di Kabupaten Klungkung mengalami penurunan. Jumlah Penduduk miskin menurun disertai dengan menurunnya persentase penduduk miskin dan menurunnya keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

1.3.6. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang stagnan juga merupakan permasalahan tersendiri bagi Kabupaten Klungkung. Pertumbuhan ekonomi yang stagnan berdampak pada pembangunan daerah. Bahkan pada kurun 2016 ke tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung mengalami penurunan. Pada tahun 2017 ke tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali dan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Adapun perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini



Sumber: BPS Kabupaten Klungkung, 2020

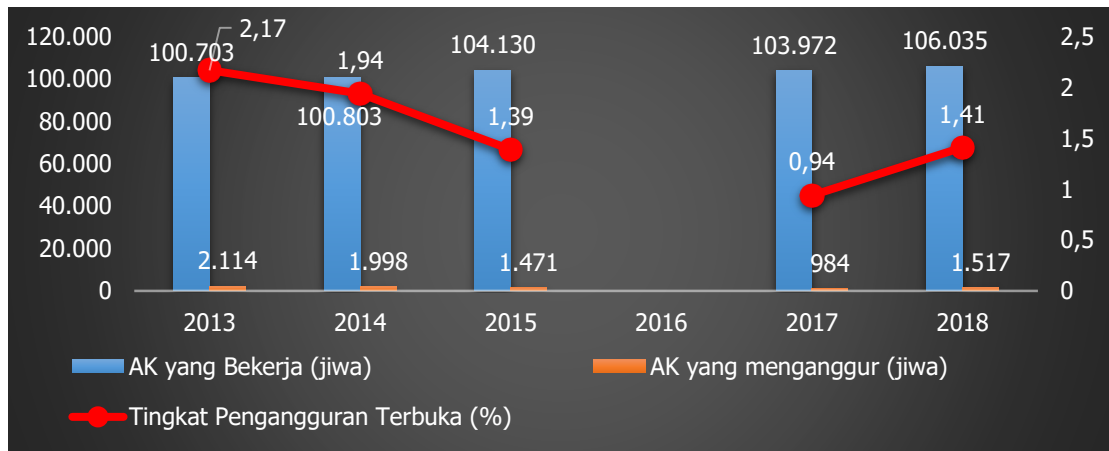
Gambar 1.9. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klungkung, Bali dan Nasional Tahun 2014-2018

Pemerintah Kabupaten Klungkung, dengan partisipasi masyarakat, melakukan pembangunan di bidang ekonomi yang difokuskan pada tiga sektor unggulan yaitu: sektor pertanian dalam arti luas, sektor industri kecil dan menengah, serta sektor pariwisata. Pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk mendorong kecukupan kebutuhan pangan daerah dan mendorong peningkatan produksi dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan komoditi sub sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Industri di Kabupaten Klungkung pengembangannya terbatas pada kegiatan industri kecil dan menengah, sebaliknya industri besar dan berat tidak dikembangkan, mengingat Kabupaten Klungkung merupakan daerah pariwisata sebagai bagian dari pariwisata Bali dan tidak memiliki sumberdaya mineral. Industri yang dikembangkan disini adalah industri yang berorientasi bahan baku pertanian lokal dan diarahkan untuk mendukung industri pariwisata. Pembangunan sektor pariwisata dititikberatkan pada pemanfaatan potensi alam, flora dan fauna, peninggalan sejarah, obyek dan daya tarik wisata lainnya, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan budayanya.

1.3.7. Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Klungkung dapat dilihat dari angka pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka adalah perbandingan jumlah pengangguran dengan jumlah Angkatan kerja. Adapun tingkat

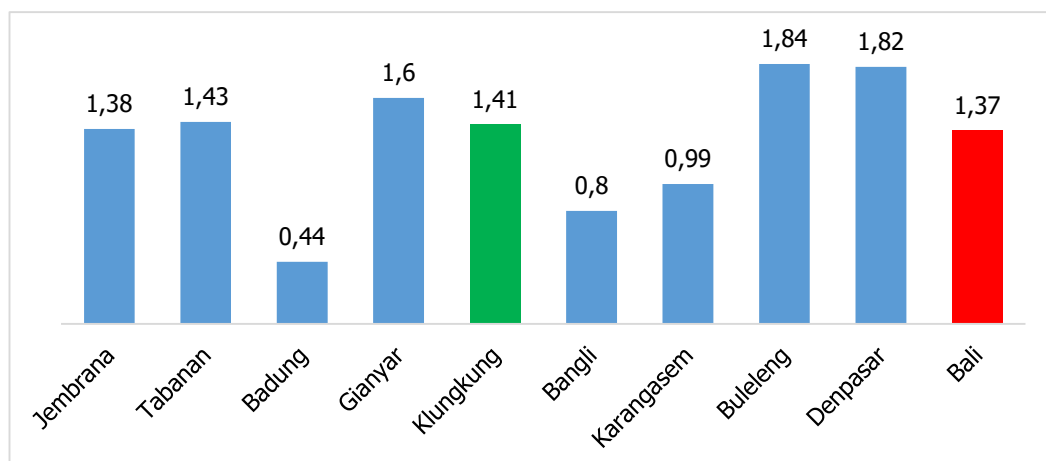
pengangguran terbuka di Kabupaten Klungkung dapat dijelaskan sebagaimana dalam gambar di bawah ini.



Sumber : BPS Prov. Bali, 2019; *2016 tidak ada pendataan

Gambar 1.10. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Klungkung berfluktuasi dengan kecenderungan menurun yaitu dari 2,17% di tahun 2013 menurun menjadi 1,41% di tahun 2018, meski jika dibandingkan dengan TPT Tahun 2017 yang sebesar 0,94% terjadi peningkatan TPT. Jumlah pengangguran terbuka juga berfluktuasi dengan kecenderungan menurun yaitu dari 2.114 jiwa di tahun 2013 menurun menjadi 1.517 jiwa di tahun 2018 meski lebih tinggi dari tahun 2017 yang mencapai 984 jiwa.

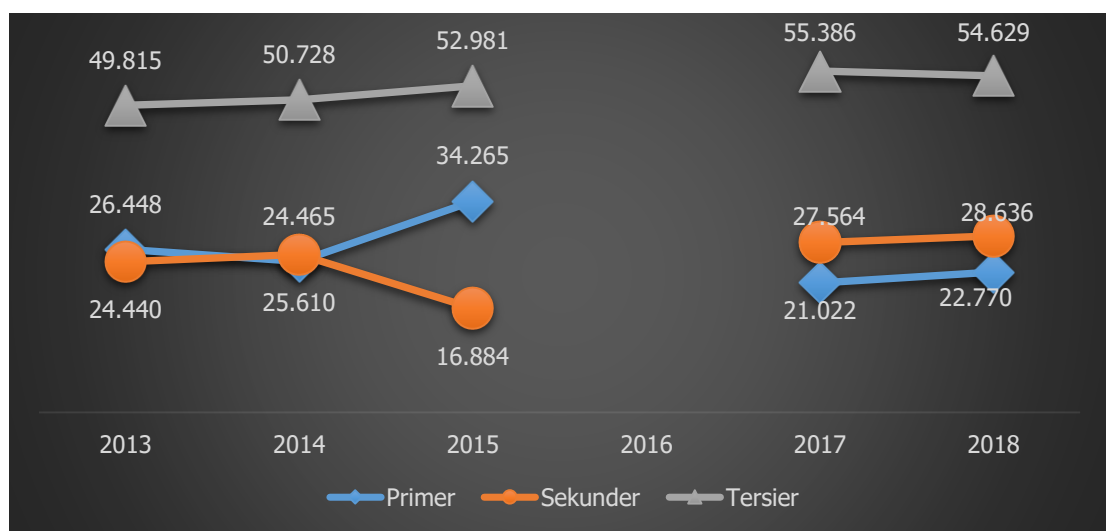


Sumber : BPS Prov. Bali, 2019; *2016 tidak ada pendataan

Gambar 1.11. Perbandingan TPT Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2018

Jika diperbandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Bali, maka tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Klungkung berada di peringkat 5 tertinggi. Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi dicapai oleh Kabupaten Buleleng yang mencapai 1,84% dan yang terendah dicapai oleh Kabupaten Badung yaitu sebesar 0,44%.

Sektor lapangan usaha yang dominan menyerap Angkatan kerja di Kabupaten Klungkung didominasi oleh sektor tersier. Adapun perkembangan serapan Angkatan kerja oleh sektor lapangan usaha dapat dijelaskan sebagaimana dalam gambar di bawah ini.



Sumber : BPS Prov. Bali, 2019; *2016 tidak ada pendataan

Gambar 1.12. Perkembangan Jumlah Angkatan kerja yang bekerja sesuai sektor lapangan usaha di Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018

Dalam lima tahun terakhir jumlah Angkatan kerja yang bekerja di sektor tersier adalah yang terbesar dan yang terendah terjadi di sektor primer.

1.4. Ruang Lingkup

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung selama tahun 2019. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2019 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) tahun 2019 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Daerah Kabupaten Klungkung tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sebagai berikut :

- Bab I : pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung, serta struktur organisasi;
- Bab II : Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung tahun 2019 serta hasil target kinerja yang diperjanjikan;
- Bab III : Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2019;
- Bab IV : Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung tahun 2019 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilakukan oleh unsur penyelenggara pemerintahan pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Perencanaan Pembangunan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimaksudkan untuk memberikan acuan dan dasar hukum bagi pembangunan jangka menengah daerah dalam lima tahun mendatang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan secara berkelanjutan, optimalisasi sumberdaya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah secara terencana dan terukur untuk mewujudkan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 ini, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023, Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Klungkung, Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung Perubahan Tahun 2019, serta Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan oleh bupati dan wakil bupati yang merupakan perencanaan jangka menengah yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

2.1.1. Visi

Visi pembangunan daerah Kabupaten Klungkung dalam 5 (lima) tahun mendatang yaitu:

“TERWUJUDNYA KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA”

Klungkung Yang Unggul merupakan tekad untuk mewujudkan Klungkung sebagai pusat pengembangan kegiatan ekonomi, pariwisata, sosial dan budaya di kawasan Bali Timur, yang didukung oleh pengembangan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam daerah. Keunggulan lokal yang akan dikembangkan meliputi pengembangan Klungkung sebagai pusat pasar Bali Timur, menjadikan RSUD Klungkung sebagai pusat rujukan Bali Timur dan pengembangan potensi sosial ekonomi Nusa Penida sebagai kawasan Wisata terpadu. Keunggulan lokal ini dapat dicapai melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan alam lingkungan secara bijaksana. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ditempuh melalui pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sosial budaya dan kesenian. Pengelolaan alam lingkungan secara bijaksana ditempuh melalui pemanfaatan sumber daya alam yang memperhatikan batas daya dukung dan daya tampung lingkungan yang disertai dengan pelestarian aset-aset lingkungan yang strategis, seperti terumbu karang, hutan bakau, dan flora-fauna langka.

Klungkung yang Sejahtera merupakan dampak lanjutan dari pencapaian Klungkung yang Unggul. Dengan tercapainya keunggulan sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, maka daya saing Kabupaten Klungkung akan meningkat. Hal ini akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hal ini akan terefleksikan dalam bentuk perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat seperti peningkatan pendapatan perkapita, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (yang terdiri dari peningkatan derajat kesehatan, mutu pendidikan dan paritas daya beli). Klungkung yang Sejahtera juga memiliki arti berkurangnya ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin. Hal ini dapat ditempuh melalui pemerataan pembangunan, penanggulangan kemiskinan, serta perhatian khusus pada wilayah terpencil dan tertinggal seperti desa-desa di Kecamatan Nusa Penida. Penurunan ketimpangan pembangunan ini terefleksikan dalam bentuk perbaikan indikator ketimpangan pendapatan, yakni penurunan rasio gini.

Klungkung yang Unggul dan Sejahtera mengandung pengertian kondisi yang ingin dicapai, yakni Kabupaten Klungkung yang mampu mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan pembangunan dengan capaian yang di atas rata-rata provinsi Bali.

Terwujudnya Klungkung yang Unggul dan Sejahtera mengandung pengertian upaya berkelanjutan untuk menciptakan keunggulan di berbagai bidang guna menciptakan masyarakat yang cukup pangan, sandang, papan dan kualitas hidupnya untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin sehingga tercipta suatu generasi masyarakat Klungkung di masa depan yang unggul secara sosial, ekonomi, mental dan kebudayaan.

2.1.2. Misi

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut di atas, perlu dirumuskan misi yang menjelaskan ruang lingkup prioritas dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Hal ini dimaksudkan agar setiap program dan kegiatan menjadi jelas dan terarah

serta dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan (*enabling conditions*) bagi pencapaian visi Kabupaten Klungkung.

RPJMD Semesta Berencana ini berorientasi pada pembangunan berkebudayaan dan berkelanjutan, guna mencapai kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian yang berbasis kemitraan. Oleh karena itu, misi Kabupaten Klungkung terdiri dari 5 misi dirumuskan sebagai "**PANCA SANTI**" yang pelaksanaannya dilandasi semangat **GEMA SANTI** (gerakan masyarakat santun dan inovatif), yaitu :

1. Memperkuat dan meningkatkan eksistensi adat dan budaya.
Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya menemukenali kembali adat dan budaya Bali di Kabupaten Klungkung untuk membangkitkan kembali Kabupaten Klungkung sebagai pusat pengembangan adat dan budaya Bali sebagaimana di masa lalu pada saat Kerajaan Klungkung menjadi pusat kekuasaan di Bali.
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya meningkatkan derajat pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Klungkung sehingga menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas dan berdaya saing.
3. Memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep kemitraan.
Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep kemitraan sehingga mereka secara kreatif, inovatif dan produktif dapat mengembangkan usaha-usaha ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraannya.
4. Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, santun dan inovatif dengan menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik.
Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tanggap terhadap kebutuhan/keluhan masyarakat, terus memperbaiki diri melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjunjung tinggi supremasi hukum, Hak-hak Asasi Manusia, hak-hak politik dan kebebasan berdemokrasi bagi masyarakat.

5. Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah yang seimbang dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya memenuhi kebutuhan akses, sarana-prasarana, dan fasilitas kebutuhan dasar masyarakat dengan menerapkan prinsip pelestarian lingkungan hidup melalui perlindungan/konservasi tanah, air, udara, laut dan perairan, serta flora dan fauna langka.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Adapun tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :

2.1.3.1. Tujuan Pembangunan Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Tujuan dalam hal ini merupakan implementasi pernyataan misi yang akan dicapai, sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Adapun tujuan pembangunan daerah adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Visi, Misi dan Tujuan RPJMD Tahun 2018-2023

Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Awal	Target Tahun 2023
Terwujudnya Klungkung Yang Unggul Dan Sejahtera	1. Memperkuat dan meningkatkan eksistensi adat dan budaya	1.1. Lestari dan berkembangnya kebudayaan daerah	Cakupan budaya daerah yang dilestarikan (%)	22,34%	26%
	2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.	2.1. Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,13	75,13
	3. Memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep kemitraan.	3.1. Menurunnya angka kemiskinan dari 6,29% menjadi 3%	Persentase Penduduk Miskin (%)	6,29%	3,00%
		3.2. Terwujudnya laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6% setiap tahun	Laju pertumbuhan PDRB	5,34%	6,00%
	4. Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, santun dan inovatif dengan menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik.	4.1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang Profesional, responsif, transparan, santun dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	54	61
		4.2. Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan stabilitas politik yang mantap	Indeks Demokrasi Daerah	n/a	80,1
	5. Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah yang seimbang dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.	5.1. Berkurangnya ketimpangan infrastruktur antar wilayah	Indeks Ketimpangan Infrastruktur	60	45
		5.2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	80	89

Sumber : RPJMD Kab. Klungkung Tahun 2018-2023

2.1.3.2. Sasaran Pembangunan Daerah

Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD menjadi tuntutan yang perlu diperhatikan. Konsistensi penjabaran Visi dan Misi ke dalam Tujuan dan Sasaran menentukan efektivitas pembangunan daerah sesuai dengan amanat pembangunan yang tertuang dalam Visi dan Misi Bupati terpilih. Berangkat dari tuntutan tersebut, maka dapat dijabarkan konsistensi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut ke dalam matriks berikut ini



Tabel 2.2

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Cara Pengukuran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir			
				2017	2019	2020	2021	2022	2023				
Visi: Terwujudnya Klungkung yang Unggul dan Sejahtera													
Misi 1: Memperkuat dan meningkatkan eksistensi adat dan budaya													
1.	Lestari dan berkembangnya kebudayaan daerah	1.1.	Terjaga dan berkembangnya kelestarian kebudayaan benda (tangible) dan tak benda (intangible)	Cakupan Budaya tak benda yang lestari	Jumlah budaya tak benda yang dilestarikan/jumlah data budaya tak benda yang hampir punah x 100%	22,66	18,89	38,41	58,41	78,89	100,00	100,00	
				Cakupan Budaya benda yang lestari	Jumlah budaya benda yg ditata/jumlah data budaya yang didata x 100%	1,70	19,61	39,22	58,82	78,43	100,00	100,00	
Misi 2: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing													
2.	Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	2.1.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Data BPS	70,45	70,82	71,10	71,37	71,65	71,93	71,93	
			2.2.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Data BPS	7,46	7,60	7,80	8,00	8,20	8,40	8,40
					Angka Harapan Lama Sekolah	Data BPS	12,94	13,00	13,25	13,80	14,00	14,20	14,20
			2.4.	Meningkatnya daya saing masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	Data BPS	0,94	1,14	1,06	0,98	0,92	0,86	0,86



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Cara Pengukuran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir		
				2017	2019	2020	2021	2022	2023			
Misi 3: Memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep kemitraan												
3. Menurunnya angka kemiskinan dari 6,29% menjadi 3%	3.1. Meningkatkan kemandirian PMKS	Cakupan PMKS mandiri	Jumlah PMKS mandiri dibagi jumlah PMKS x 100%	41,00	45,00	49,00	53,00	57,00	60,00	60,00		
			3.2. Meningkatkan Kesetaraan Gender	Pengangguran Perempuan Angka Rata Rata Lama Sekolah Perempuan	Data BPS	249,00	231,00	215,00	202,00	195,00	183,00	183,00
					Data BPS	7,46	7,52	7,63	7,72	7,81	7,89	7,89
			3.3. Terpenuhinya hak anak	Capaian Kabupaten Layak Anak tingkat madya	Jumlah kriteria Kabupaten Layak Anak yang tercapai / jumlah seluruh kriteria x 100%	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00	100,00
			3.4. Terwujudnya masyarakat desa yang mandiri	Persentase Desa berstatus swasembada	Jumlah desa berstatus swasembada/jumlah seluruh desa x 100%	7,00	15,00	23,00	32,00	41,00	53,00	53,00
			3.5. Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang berkualitas dan seimbang	Tercapainya TFR (2,1), NRR (1), LPP (1,1)	Data BPS	95,84	97,86	97,90	98,00	98,56	98,86	98,86
4. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi sebesar 6% setiap tahun	4.1. Meningkatkan investasi daerah	PMA (US\$)	Nilai realisasi investasi asing dalam dolar US	3.000	565.621	659.891	754.161	848.431	942.701	942.701		
		PMDN (Milyar Rp)	Nilai realisasi investasi dalam negeri dalam juta rupiah	0,65	1,05	1,23	1.402,00	1.577,00	1.752,00	1.752,00		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Cara Pengukuran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2017	2019	2020	2021	2022	2023	
	Meningkatnya peran usaha ekonomi rakyat	Kontribusi lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB (%)	Jumlah PDRB Sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor/Jumlah PDRB x 100%	8,13	8,13	8,13	8,13	8,13	8,13	8,13
		Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB (%)	Jumlah PDRB Sektor industri pengolahan/Jumlah PDRB x 100%	9,33	9,46	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
		Kontribusi lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB (%)	Jumlah PDRB Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum/Jumlah PDRB x 100%	14,44	15,80	16,00	17,00	18,00	19,00	19,00
		Nilai kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan alam PDRB (juta Rp.)	Nilai kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan alam PDRB (juta Rp.)	1.122.400	1.195.331	1.228.599	1.259.158	1.288.402	1.313.221	1.313.221
4.3.	Meningkatnya Keragaman Pola Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Hasil Penilaian	84,3	86,98	87,64	88,21	88,73	89,20	89,20



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Cara Pengukuran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir		
				2017	2019	2020	2021	2022	2023			
Misi 4: Terwujudnya pemerintahan yang responsif transparan, santun dan inovatif dgn menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik												
5.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang responsif, transparan, santun dan inovatif	5.1.	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan transparansi pemerintah daerah	Tingkat akuntabilitas kinerja Pemkab	Hasil Penilaian AKIP	63,54	66,00	68,20	71,00	73,40	76,00	76,00
		5.2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kualitas pelayanan publik	Hasil penilaian	3,34	3,35	3,37	3,38	3,39	3,40	3,40
6.	Terciptanya ketentraman, ketertiban umum dan stabilitas politik yang mantap	6.1.	Meningkatnya kesadaran demokrasi	Tingkat partisipasi pemilih (Pileg, Pilpres, Pilkada dan Pilkel)	jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dibagi jumlah DPT x 100%	74,57	74,70	75,10	76,70	77,50	78,90	78,90
		6.2.	Menurunkan potensi konflik	Penurunan Potensi Konflik sosial	Angka potensi konflik sosial	27,00	22,00	17,00	15,00	12,00	6,00	6,00
		6.3.	Menurunnya tingkat risiko bencana	Indeks Risiko Bencana (%)	Hasil Penilaian	181,60	172,04	167,42	163,94	160,45	156,96	156,96
		6.4.	Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan	Jumlah pelanggaran perda	Jumlah pelanggaran Perda	422	360	340	330	310	300	300
Misi 5: Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah yang seimbang dgn tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup												
7.	Berkurangnya ketimpangan infrastruktur antar wilayah	7.1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur layanan dasar	Cakupan desa/kelurahan yang terpenuhi infrastruktur layanan dasar		60,00	64,41	66,10	67,80	69,49	71,19	71,19
8.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	8.1.	Menurunnya beban pencemaran air, tanah dan udara	Indeks kualitas air	Hasil pengukuran	8	7	7	7	7	7	7

Sumber : RPJMD Kab. Klungkung Tahun 2018-2023



2.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada akhir periode masa jabatan. Indikator Kinerja Utama ini merupakan indikator utama pembangunan daerah yang dicapai melalui sasaran-sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan di bab-bab sebelumnya.

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 yang disajikan merupakan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2018-2023 yang disajikan dalam Tabel 2.3. berikut.



Table 2.3
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Klungkung

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	Lestari dan berkembangnya kebudayaan daerah	Cakupan Budaya yang lestari (%)	22,34	23,5	24	24,5	25	26	26,00
2	Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,13	71,13	72,13	73,13	74,13	75,13	75,13
3	Menurunnya angka kemiskinan dari 6,29% menjadi 3% di Tahun 2023	Persentase Penduduk Miskin	6,29	4,91	4,34	3,84	3,39	3	3
4	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% setiap tahun	Laju Pertumbuhan PDRB	5,34	6	6	6	6	6	6
5	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang Profesional, responsif, transparan, santun dan Inovatif	Indeks reformasi birokrasi	54	55	56	58	60	61	61
6	Terciptanya ketentraman, ketertiban umum dan stabilitas politik yang Mantap	Indeks demokrasi daerah	n/a	76,1	77,1	78,1	79,1	80,1	80,1
7	Mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah	Indeks ketimpangan infrastruktur	60	55	54	50	47	45	45
8	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan	80	85	86	87	88	89	89

Sumber : RPJMD Kab. Klungkung, 2018-2023



2.3. Rencana Kinerja Tahunan

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program dan kegiatan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2019.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya, hasil evaluasi tahun sebelumnya serta program dan kegiatan pendukungnya.

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap instansi pemerintah. Dengan demikian perjanjian kinerja menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun dijadikan dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut. Dengan perjanjian kinerja diharapkan para pimpinan instansi tidak hanya pandai mendapatkan dan menghabiskan anggaran saja, tapi juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan kepada masyarakat. Perjanjian kinerja sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan



Pemerintah Kabupaten Klungkung
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019

berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Perjanjian kinerja ini merupakan amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ditetapkan setelah ditetapkannya Peraturan Bupati Klungkung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan telah disesuaikan kembali dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 4 Nopember 2019 setelah ditetapkannya Peraturan Bupati Klungkung Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019
1	Lestari dan berkembangnya kebudayaan daerah	Cakupan Budaya yang lestari (%)	23,50
2	Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,13
3	Menurunnya angka kemiskinan dari 6,29% menjadi 3%	Persentase Penduduk Miskin (%)	4,91
4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan PDRB (%)	6
5	Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, responsif, transparan, santun dan inovatif	Indek Reformasi Birokrasi	55
6	Terwujudnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundangan	Indeks Demokrasi Daerah	76,1
7	Mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah	Indeks Ketimpangan Infrastruktur	55
8	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan	85

Sumber: Perjanjian Kinerja Bupati Klungkung, Perubahan 2019



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggung jawab manajerial pada lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali dengan kegiatan yang tidak terkendali. Kegiatan-kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi dan visi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan.

Pemerintah Kabupaten Klungkung selaku pengemban amanah masyarakat, melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klungkung yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023. Untuk tingkat kabupaten fokus pelaporan kinerja adalah pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat dampak (*benefit*).

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapainya atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Pemerintah Kabupaten



Klungkung pada tahun 2019 memperjalkan kinerja melalui Perjanjian Kinerja yang ingin dicapai terdiri dari 8 sasaran dengan 8 indikator kinerja.

3.1. Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kabupaten Klungkung secara umum telah berupaya melaksanakan pembangunan di berbagai bidang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2018-2023. Tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2019 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung
Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Cap (%)
1	2	3	4	5	6
1	Lestari dan berkembangnya kebudayaan daerah	Cakupan Budaya yang lestari (%)	23,5	18,21	77,49
2	Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,13	71,71	100,82
3	Menurunnya angka kemiskinan dari 6,29% menjadi 3%	Persentase Penduduk Miskin (%)	4,91	5,4	90,02
4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan PDRB (%)	6	5,44	90,67
5	Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, responsif, transparan, santun dan inovatif	Indek Reformasi Birokrasi	55	57,26	104,11
6	Terwujudnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundangan	Indeks Demokrasi Daerah	76,1	82,37	108,24
7	Mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah	Indeks Ketimpangan Infrastruktur	55	19,74	164,10
8	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan	85	66,62	78,38
Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran					101,73

Sumber : Data diolah



Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2019, sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung sebanyak 8 sasaran dengan 8 indikator kinerja dan capaian rata-rata kinerja sasaran adalah 101,73%. Dari 8 sasaran tersebut terdapat 4 sasaran dengan capaian diatas 100% dan 4 sasaran dengan capaian dibawah 100 persen.

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisa atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan berupa Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan rencana kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran pembangunan Daerah Tahun 2019. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi pada hasil, Pemerintah Kabupaten Klungkung bersama-sama dengan segenap masyarakat telah berupaya mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Analisa atas capaian indikator – indikator sasaran ini adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 **Lestari dan Berkembangnya Kebudayaan Daerah**

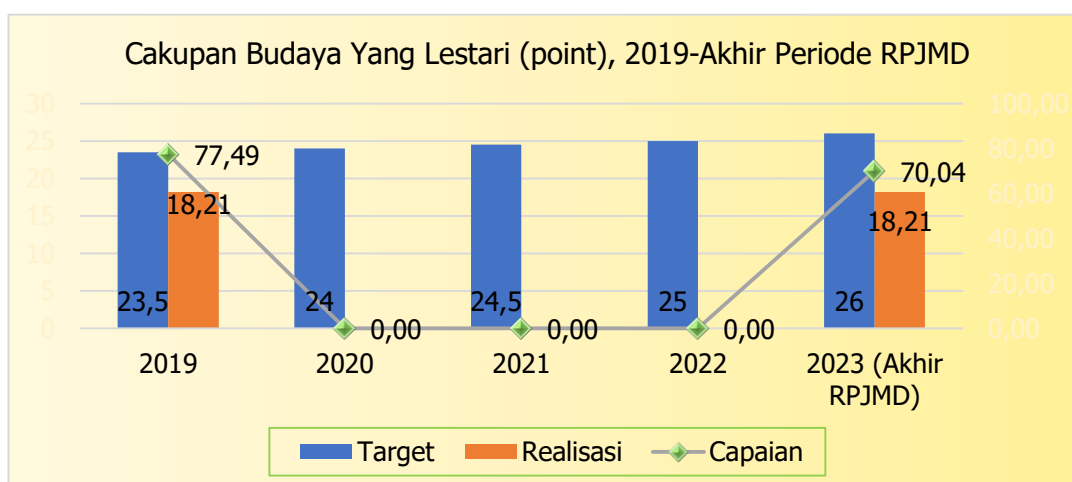
Bukti perkembangan kebudayaan masyarakat dapat dilihat dari warisan budaya tak benda dan benda yang terus dapat dilestarikan sehingga dapat lestari sampai ke generasi berikutnya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, karena itu penting bagi Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk terus melestarikan kebudayaan daerah Kabupaten Klungkung baik yang bersifat kebendaan maupun yang tidak bersifat kebendaan. Warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air perlu dilestarikan keberadaannya. Hasil perbuatan dan pemikiran yang terwujud dalam identitas, ideologi, mitologi, ungkapan konkrit dalam bentuk suara, gerak, maupun gagasan yang termuat dalam benda, sistem perilaku, sistem kepercayaan, dan adat istiadat Kabupaten Klungkung



merupakan bentuk warisan budaya tak benda. Mengetahui, menyadari dan mengenali adalah cara yang bisa dilakukan sehingga terbangun rasa memiliki dan menghargai warisan budaya tak benda tersebut.

Dalam menunjukkan komitmen melestarikan kebudayaan Daerah di Kabupaten Klungkung, Pemerintah Kabupaten Klungkung menetapkan sasaran Lestari dan Berkembangnya Kebudayaan Daerah yang diukur dengan indikator kinerja Cakupan Budaya Yang Lestari. Cakupan Budaya Yang Lestari dihitung dengan membandingkan antara Budaya Yang Lestari (benda dan tak benda) dengan Budaya Daerah Yang Terdata di Kabupaten Klungkung (benda dan tak benda). Budaya tak benda meliputi : sekaa teruna, subak sawah, subak abian, tradisi dan budaya takbenda lain di Kabupaten Klungkung, sementara Budaya Benda mencakup Cagar Budaya, Situs Budaya dan berbagai budaya kebendaan yang lain. Dalam melakukan pengumpulan data, Pemerintah Kabupaten Klungkung menetapkan bahwa budaya benda yang lestari adalah budaya benda yang telah ditetapkan dan dipelihara oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung. Sementara Budaya tak benda yang lestari adalah budaya tak benda yang dalam kurun waktu satu tahun setidaknya pernah tampil satu kali dalam acara pagelaran/pameran baik di Kabupaten Klungkung maupun di Provinsi Bali.

Cakupan Budaya Yang Lestari pada tahun 2019 ditunjukkan pada grafik berikut ini :



Sumber : Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Klungkung, 2019

Gambar 3.1 Cakupan Budaya Yang Lestari, 2019-2023 dan Capaian RPJMD



Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator Cakupan Budaya Yang Lestari di Kabupaten Klungkung pada tahun 2019 sebesar 77,49 persen. Dimana target Cakupan Budaya Yang Lestari ditargetkan sebesar 23,5 dan terealisasi sebesar 18,21. Jika dilihat dari trend Cakupan Budaya Yang Lestari di Kabupaten Klungkung mengalami penurunan, dimana sebelumnya Cakupan Budaya Yang Lestari pada tahun 2018 sebesar 22,25. Dibandingkan dengan target RPJMD, capaian sampai dengan tahun 2019 adalah 70,04 persen.

Adapun permasalahan yang ditemui dalam mewujudkan sasaran Melestarikan dan Mengembangkan Kebudayaan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Belum intensifnya pendataan, pengkajian, dan pendaftaran kekayaan budaya secara valid.
2. Kerjasama pengembangan budaya dengan para pemangku kepentingan dalam pelestarian dan pengembangan budaya sering mengalami hambatan disebabkan belum tercetusnya komitmen bersama pengelolaan budaya berupa cagar budaya.

Tercapainya target sasaran Lestari dan Berkembangnya Kebudayaan Daerah pada tahun 2019 didukung oleh pelaksanaan program aksi "KLUNGKUNG MENARI". Klungkung Menari memberikan kesempatan kepada sanggar pemuda/sekaa teruna untuk menampilkan kemampuan seninya dalam gelar seni di panggung terbuka yang diselenggarakan setiap bulan. Dengan Klungkung Menari masyarakat diberikan kesempatan menikmati beragam kesenian yang ditampilkan oleh pemuda Klungkung sendiri. Selain pelaksanaan Klungkung menari, hal lain yang menjadi faktor pendukung tercapainya sasaran tersebut adalah adanya dukungan yang kuat dari lembaga adat di Kabupaten Klungkung dalam terus melestarikan budaya tak benda berupa tradisi dan berbagai seni di Kabupaten Klungkung. Selain itu, penduduk Kabupaten Klungkung yang terdiri atas berbagai suku dan agama saling mendukung dalam melestarikan kebudayaan daerah Kabupaten Klungkung. Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali, dukungan untuk melestarikan kebudayaan daerah terus menguat. Penyelenggaraan bulan Bahasa bali, penggunaan busana adat bali setiap hari kamis, hari purnama, hari tilem dan hari HUT daerah dan HUT Provinsi



Bali, dan penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali oleh Pemerintah Provinsi Bali merupakan suatu kebijakan yang sangat mendukung lestari dan berkembangnya kebudayaan di Kabupaten Klungkung. Penggunaan Bahasa Bali juga terus ditingkatkan di sekolah-sekolah maupun instansi-instansi pemerintah dan swasta.

Dalam melaksanakan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten senantiasa dituntut untuk melaksanakan pelayanan dengan efektif dan efisien. Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Analisis efisiensi difokuskan pada indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur dari kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/atau lebih besar, atau persentase capaian *output* sama tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Melestarikan dan Mengembangkan Kebudayaan Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tingkat Efisiensi
Lestari dan Berkembangnya Kebudayaan Daerah
Tahun 2019

Indikator Kinerja	Target Capaian Sasaran (%)	Target Capaian Keuangan (%)	Standar Efisiensi	Realisasi Capaian Sasaran (%)	Realisasi Capaian Keuangan (%)	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Cakupan Budaya Yang Lestari	100	100	1,00	77,49	97,15	0,80	-0,29	Tidak Efisien
Jumlah	100	100	1,00	77,49	97,15	0,80	-0,29	Tidak Efisien

Sumber : data diolah

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2019, tingkat efisiensi sasaran Melestarikan dan Mengembangkan Kebudayaan Daerah adalah sebesar - 0,20 dimana indeks efisiensi lebih rendah dari standar efisiensi. Pada tahun 2019 sasaran Lestari dan Berkembangnya Kebudayaan Daerah dicapai dengan Tidak Efisien. Sasaran Lestari dan Berkembangnya Kebudayaan Daerah pada tahun 2019 didukung dengan program pendukung sebagaimana tabel dibawah ini.



Tabel 3.3
Efisiensi Anggaran
Sasaran Lestari dan Berkembangnya Kebudayaan Daerah
Tahun 2019

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	716.832.808	699.461.682	17.371.126,00	97,58	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	3.606.498.502	3.540.676.051	65.822.451,00	98,17	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	4.495.174.716	4.326.845.906	168.328.810,00	96,26	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
Jumlah	8.818.506.026	8.566.983.639	251.522.387,00	97,15	

Sumber : Simda Keuangan, 14 Maret 2020 (sebelum audit BPK)

Pada tahun 2019, Sasaran Lestari dan Berkembangnya Kebudayaan Daerah didukung dengan 3 program pendukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.818.506.026,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.566.983.639,00 dan sisa anggaran sebesar Rp. 251.522.387,00 atau terealisasi sebesar 97,15 persen. Sasaran ini didukung oleh Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.



DOKUMENTASI PENCAPAIAN SASARAN



**Bupati Klungkung, Ketua DPRD Kab. Klungkung
berserta sekaa gamelan Kab. Klungkung**



**Kontingen Kab. Klungkung di Acara Pesta
Kesenian Bali**



**Bupati Klungkung dalam gelar seni di Pesta
Kesenian Bali**



**Bupati Klungkung bersama Wakil Bupati
Klungkung pada acara gelar seni**



Sasaran 2

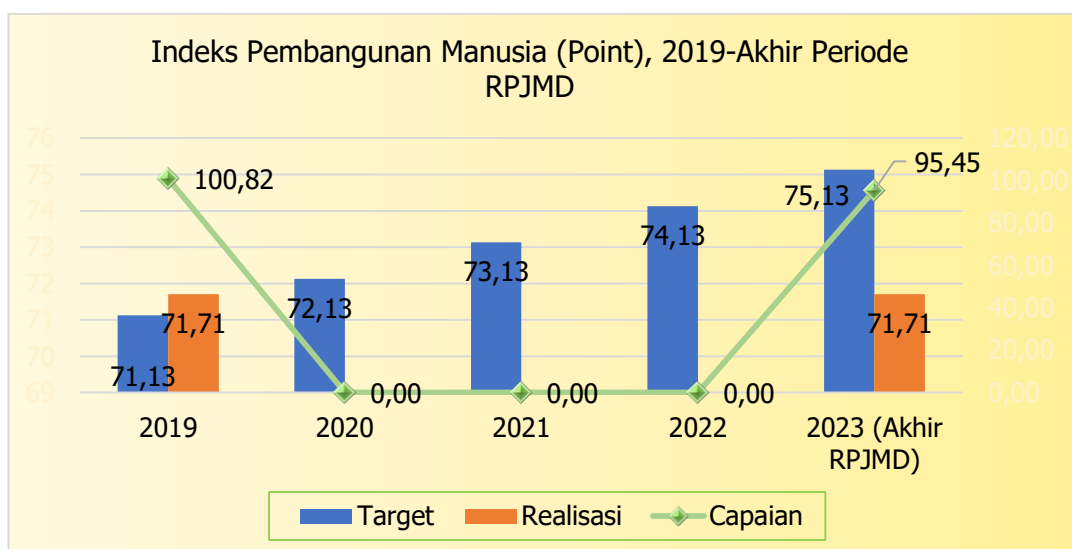
Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Pembangunan manusia menjadi satu keniscayaan bagi suatu bangsa, karena sejatinya pembangunan tidak hanya dilihat dari capaian fisik saja tetapi juga dari sudut manusianya. Pembangunan Manusia dengan peta jalan yang jelas dan terukur dan dilakukan secara massif, sangat diperlukan guna menjawab tantangan pembangunan dan memastikan kontribusinya terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Dalam mendorong pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing, Pemerintah Kabupaten Klungkung menetapkan sasaran Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan metode penghitungannya direvisi pada tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan backcasting hingga tahun 2010. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks

pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan standardisasi nilai minimum dan maksimum dari masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

Capaian sasaran Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing yang diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia sebagai berikut:

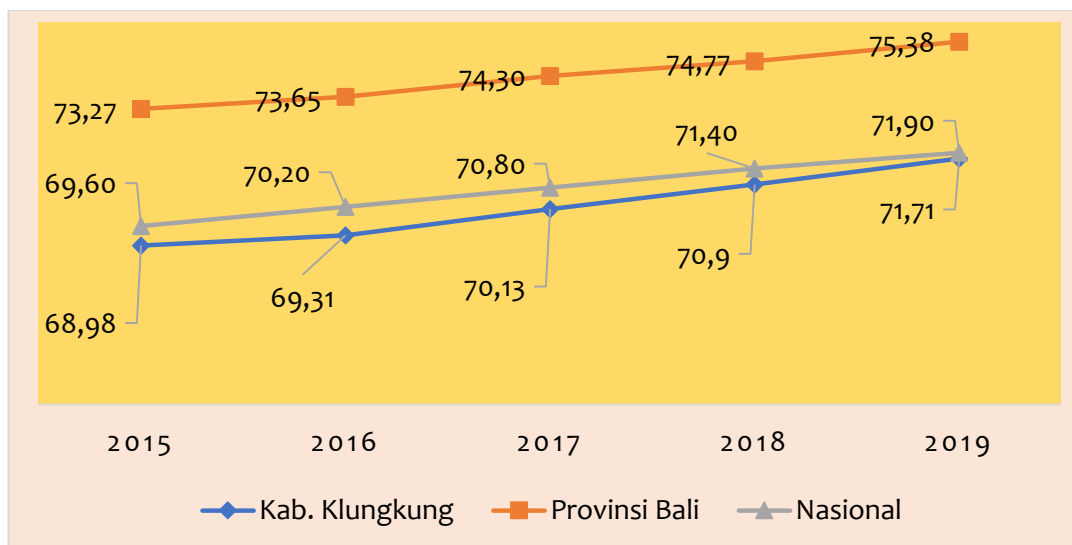


Sumber : Provinsi Bali Dalam Angka 2020, Penyediaan Data Untuk Perencanaan Pembangunan

Gambar 3.2 Indeks Pembangunan Manusia, 2019-2023 dan Capaian RPJMD

Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 71,13 point. Berdasarkan data dalam Buku Provinsi Bali Dalam Angka 2020 yang dirilis Badan Pusat Statistik Provinsi Bali untuk penyediaan data perencanaan pembangunan daerah, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Klungkung pada tahun 2019 adalah sebesar 71,71 point atau tercapai sebesar 100,82 persen dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati Klungkung Tahun 2019. Tahun 2019 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk masa 2019-2024. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023, maka capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klungkung telah tercapai sebesar 95,45 persen. Dari tahun ke tahun, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klungkung

menunjukkan trend meningkat, untuk melihat pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klungkung dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

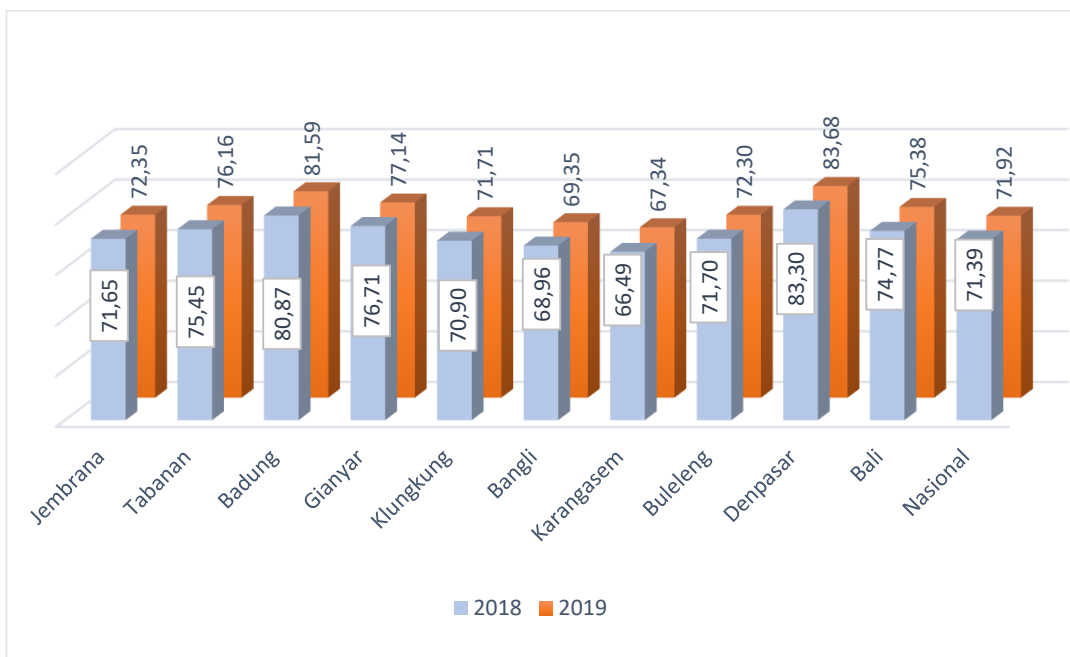


Sumber : Provinsi Bali Dalam Angka 2020, Penyediaan Data Untuk Perencanaan Pembangunan, 2020

Gambar 3.3 Indeks Pembangunan Manusia Kab. Klungkung, Provinsi Bali dan Nasional, 2015-2019

Dari gambar diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klungkung berada dibawah Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali dan Nasional. Hal tersebut menjadi fokus pembangunan di Kabupaten Klungkung untuk lebih meningkatkan pembangunan manusianya.

Untuk memotret kemajuan pembangunan manusia, hal yang perlu diperhatikan adalah kecepatan serta status pencapaian pembangunan manusia tersebut. Dari 9 Kabupaten/kota di Bali, Kabupaten Klungkung merupakan Kabupaten yang berada di urutan ke 7 diantara 9 Kabupaten/Kota di Bali dari sisi status pencapaian Indeks Pembangunan Manusia. Namun jika dilihat dari pertumbuhan pencapaiannya, Kabupaten Klungkung menempati urutan ke 2 tercepat setelah Kabupaten Karangasem. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Klungkung telah berusaha dengan segenap sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Klungkung. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Provinsi Bali dan Nasional sebagai berikut:

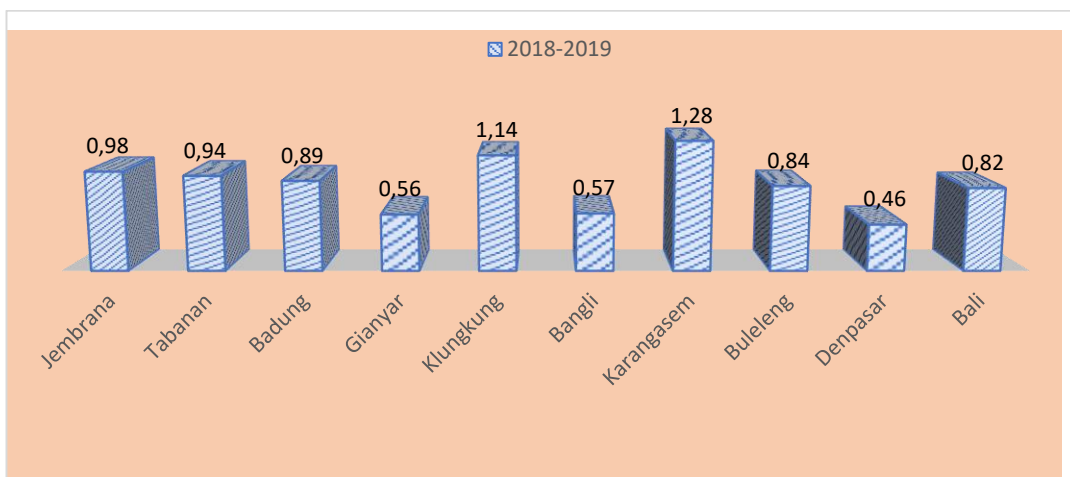


Sumber : Provinsi Bali Dalam Angka 2020, Penyediaan Data Untuk Perencanaan Pembangunan, 2020

Gambar 3.4 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota, Provinsi Bali dan Nasional, 2018-2019

Dari gambar diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klungkung berada pada posisi ke 7 dari 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Jika dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali dan Nasional, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klungkung masih berada di bawah angka Provinsi Bali dan Nasional.

Untuk melihat pencapaian pembangunan manusia, tidak hanya dilihat dari status pencapaiannya, namun juga dilihat dari pertumbuhan pembangunan manusia itu sendiri. Untuk melihat pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota, Provinsi Bali dan Nasional dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Sumber : Provinsi Bali Dalam Angka 2020, Penyediaan Data Untuk Perencanaan Pembangunan, 2020

Gambar 3.5 Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota dan Provinsi Bali, 2018-2019

Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa Kabupaten dengan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia tertinggi adalah Kabupaten Karangasem, sementara Kabupaten Klungkung berada di tingkat kedua setelah Kabupaten Karangasem. Sementara Kota Denpasar menempati posisi terakhir dalam hal pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia.

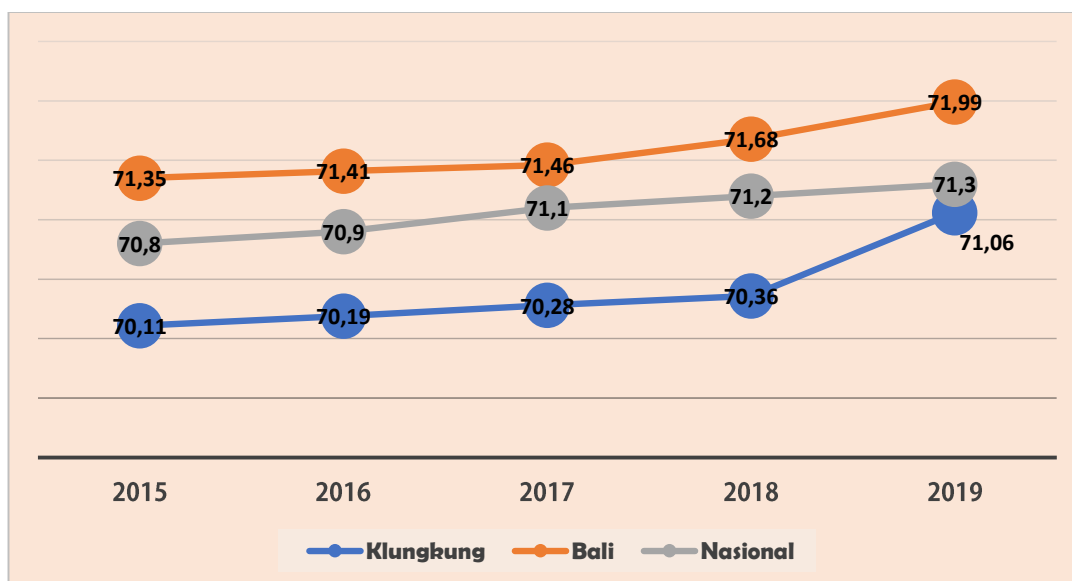
Untuk mengetahui secara rinci mengenai fokus utama yang berpengaruh terhadap capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

a. Umur Harapan Hidup

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu negara. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui puskesmas, akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan. Masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori diharapkan mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang akhirnya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidup.

Pembangunan manusia di Kabupaten Klungkung khususnya bidang

kesehatan dapat diukur dengan indikator Angka Harapan Hidup. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Klungkung disajikan pada grafik sebagai berikut.

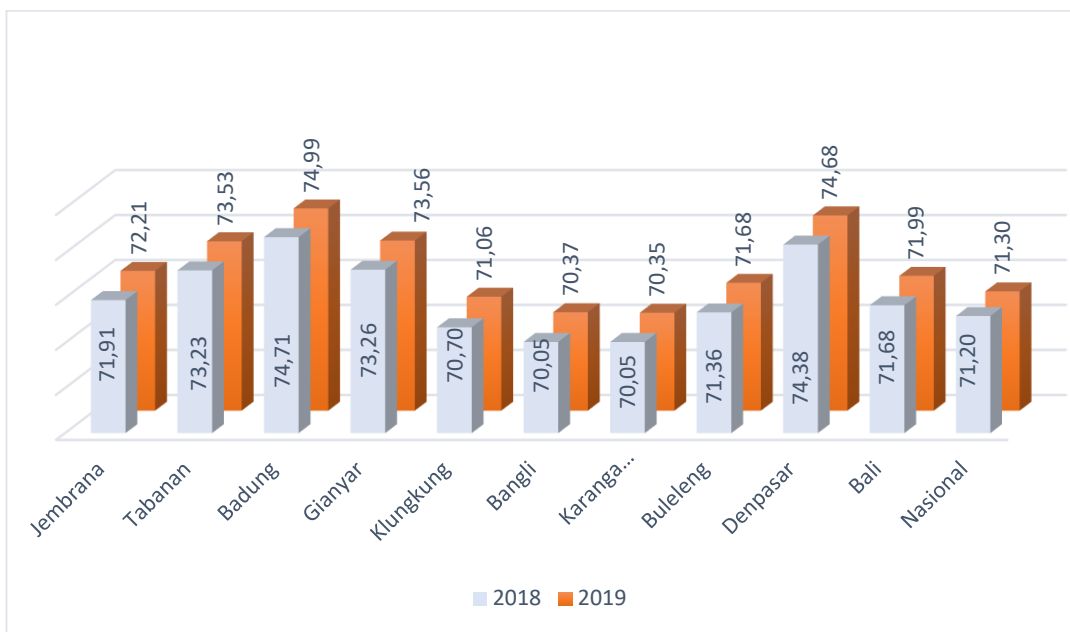


Sumber : Klungkung Dalam Angka 2020, Penyediaan Data Perencanaan Pembangunan

Gambar 3.6 Angka Harapan Hidup (Tahun), 2014-2019

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator Angka Harapan Hidup di Kabupaten Klungkung terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Klungkung sebesar 69,91 tahun dan meningkat menjadi 71,06 tahun di tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan peningkatan pembangunan di sisi kesehatan.

Untuk mendapatkan perbandingan kinerja yang telah dicapai, Angka Harapan Hidup Kabupaten Klungkung perlu dibandingkan dengan Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Provinsi Bali dan Angka Harapan Hidup Nasional. Untuk memperoleh perbandingan regional antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, gambar di bawah ini menyajikan perbandingan angka harapan hidup Kabupaten Klungkung dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Bali sebagai berikut:



Sumber : Provinsi Bali Dalam Angka 2020, Penyediaan Data Perencanaan Pembangunan

Gambar 3.7 Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Provinsi Bali dan Nasional (tahun), 2018-2019

Berdasarkan gambar di atas maka terlihat bahwa Angka Harapan Hidup Kabupaten Klungkung berada di peringkat 7 dari 9 Kabupaten/Kota di Bali. Angka harapan hidup tertinggi ada di Kabupaten Badung yang mencapai 74,99 tahun pada tahun 2019 dan terendah ada di Kabupaten Bangli yang baru mencapai 70,35 tahun di tahun 2019. AHH Kabupaten Klungkung pada tahun 2019 mencapai 71,06 tahun berada di bawah Angka Harapan Hidup Provinsi Bali yang sebesar 71,99 tahun dan juga berada dibawah Angka Harapan Hidup Nasional yang sebesar 71,30 tahun.

Dalam usaha meningkatkan Angka Harapan Hidup Kabupaten Klungkung, Pemerintah Kabupaten Klungkung menemui kendala sebagai berikut:

1. Metode Promotif dan Preventif merupakan metode terbaik dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah manapun, namun kesadaran masyarakat di Kabupaten Klungkung belum dapat sepenuhnya ditingkatkan disebabkan rentang kendali dan sulitnya mengubah pola pikir masyarakat, kedepannya metode promotif dan preventif akan lebih ditingkatkan lagi.
2. Pengawasan terhadap kualitas kesehatan lingkungan merupakan suatu pekerjaan besar yang jika berhasil dituntaskan akan sangat mempengaruhi peningkatan kesehatan masyarakat. Dampak pembangunan yang tidak terarah memperburuk kualitas kesehatan lingkungan. Kampanye kesehatan lingkungan



seringkali berbenturan dengan kepentingan ekonomi dan pembangunan infrastruktur.

3. Rendahnya tingkat pendidikan dan pendapatan turut menyumbang terhadap kurangnya kesadaran terhadap kesehatan diri maupun lingkungan. Keinginan mendapatkan kualitas kesehatan yang lebih baik oleh masyarakat seringkali berbenturan dengan ketersediaan pendanaan. Beberapa masyarakat yang lebih mampu justru tidak sadar akan kesehatan lingkungan disebabkan tingkat pendidikan yang rendah.

Untuk mencapai peningkatan Angka Harapan Hidup sangat ditentukan oleh pelaksanaan pembangunan kesehatan. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Klungkung terus berupaya melaksanakan pembangunan kesehatan dan menjadikannya sebagai salah satu prioritas utama pembangunan. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam meningkatkan Angka Harapan Hidup adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan Gawat Darurat

Peningkatan pelayanan gawat darurat dikemas dalam sebuah aksi yang dikenal dengan "KRIS 118". KRIS 118 menjadi layanan Kesehatan dan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat Klungkung baik dalam pelayanan rujukan dan kegawat daruratan terpadu pra hospital dalam rangka mencegah kematian dan kecacatan merupakan tujuan utama layanan AGD KRIS 118. Keberadaan Tim AGD KRIS 118 telah mendapat respon yang positif oleh masyarakat untuk itu perlu lebih dikembangkan kegiatannya bukan hanya melayani kasus emergensi di masyarakat tetapi juga tetap memberikan edukasi kepada masyarakat dalam menangani kasus Gawat Darurat Pra Hospital menghubungi petugas. Tetapi berkat adanya call center (0366) 118 yang mudah diingat oleh masyarakat sehingga lebih cepat mendapat repon oleh petugas. Kegiatan ini juga dapat meringankan tugas-tugas dari AGD KRIS Puskesmas kendala kurangnya tenaga sopir ambulans sehingga kasus Gawat Darurat diluar jam kerja telah dibantu oleh TIM AGD KRIS 118. Kasus-kasus kegawatdaruratan dari Nusa Penida juga sangat dibantu oleh respon cepat TIM AGD KRIS 118, kasus emergensi kebidanan dan neonatal dapat segera dibawa oleh TIM AGD KRIS 118 guna mendapat pertolongan segera dari Rumah Sakit sehingga ikut berdampak pula pada penurunan angka kemataian Ibu dan Bayi. AGD KRIS 118



merupakan unit pelayanan yang dibentuk untuk mendekatkan akses pelayanan kegawat daruratan bagi masyarakat dan membantu fungsi pelayanan kesehatan rujukan dan dibawah Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung. Dalam melaksanakan tugasnya dapat melakukan koordinasi dengan Puskesmas yang mewilayahinya. *Launching* inovasi AGD KRIS 118 ke masyarakat dilakukan oleh Bupati Klungkung pada tanggal 11 Pebruari 2016 bertempat di Desa Dawan Kaler Kecamatan Dawan. Diadakannya AGD KRIS 118 dilandasi aspek *time management* sebagai implementasi *time saving is life and limb saving* yang mengandung unsur kecepatan atau *quick respons* dan ketepatan berupa mutu pelayanan yang sesuai standar. Unsur kecepatan dipenuhi oleh sistem transportasi dan komunikasi, sedangkan unsur ketepatan dipenuhi oleh kemampuan melakukan pertolongan gawat darurat meliputi *basic life suport* (BLS) dan *advance life suport* (ALS) sesuai masalah yang dihadapi. Dalam kondisi kedaruratan sehari-hari/umum/kebidanan, AGD KRIS 118 bertugas memberikan penanganan pada kejadian kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja/industri, kecelakaan rumah tangga, pelayanan kebidanan emergensi, rujukan pelayanan kesehatan, bantuan pelayanan kesehatan untuk kegiatan sosial keagamaan. AGD KRIS 118 juga menerima panggilan masyarakat untuk melakukan pelayanan perawatan kesehatan masyarakat (Perkesmas) bagi kelompok masyarakat resiko tinggi yang membutuhkan seperti para lansia yang tidak mampu berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Sedangkan dalam kondisi kedaruratan khusus/bencana AGD KRIS 118 secara langsung bertugas sebagai Tim Reaksi Cepat (TRC) dibawah komando BPBD sesuai Peraturan Perundang-undangan. Akses yang cepat dan mudah pada pelayanan AGD KRIS 118 adalah kunci keberhasilan atas manfaat pelayanan.

2. Pemenuhan *Universal Health Coverage*
Pemenuhan jaminan kesehatan secara universal juga merupakan fokus utama Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
3. Pelayanan Kesehatan Door to Door atau DORKESMAS. Merupakan program aksi yang melayani pasien langsung di rumah pasien.
4. Peningkatan Pelayanan di Rumah Sakit



Pemerintah Kabupaten Klungkung juga terus mengupayakan peningkatan pelayanan di Rumah Sakit Daerah Kabupaten Klungkung dengan meningkatkan kelas rumah sakit menjadi Rumah Sakit Kelas B dan Pusat Rujukan Pelayanan Kedaruratan di Bali Timur ditempuh dengan memenuhi jenis pelayanan sesuai standar RSUD kelas B. Dalam mencapai pemenuhan pelayanan Rumah Sakit Tipe B, Pemerintah Kabupaten Klungkung melaksanakan program aksi yang disebut "GENI ASTU" (Gerakan Peningkatan Kepuasan dan Mutu). Geni Astu menargetkan lima keluaran kongkret yang mendukung keberhasilan yaitu :

- a. Menciptakan peningkatan motivasi, kerjasama, kerja keras, rasa memiliki serta komitmen jajaran RSUD Kabupaten Klungkung
- b. Terwujudnya standar pelayanan prima
- c. Terwujudnya tingkat kepuasan masyarakat pengguna Rumah Sakit
- d. Menyelesaikan survei akreditasi Rumah Sakit dengan target berhasil lulus paripurna
- e. Memperoleh ijin operasional RSUD kelas B

Dengan kerja keras seluruh jajaran, target ijin operasional RSUD Kelas B dapat dicapai. Program Aksi GENI ASTU telah berhasil mengurangi keluhan pengguna Rumah Sakit dan meningkatkan tingkat pemanfaatan rumah sakit.



DOKUMENTASI PENCAPAIAN SASARAN



Bupati Klungkung menyapa pasien persalinan perdana di sebuah Puskesmas



Salah satu layanan kesehatan keliling



Ambulance Gawat Darurat Kring Sehat 118



Dukungan sepenuhnya untuk Universal Health Coverage



b. Harapan Lama Sekolah

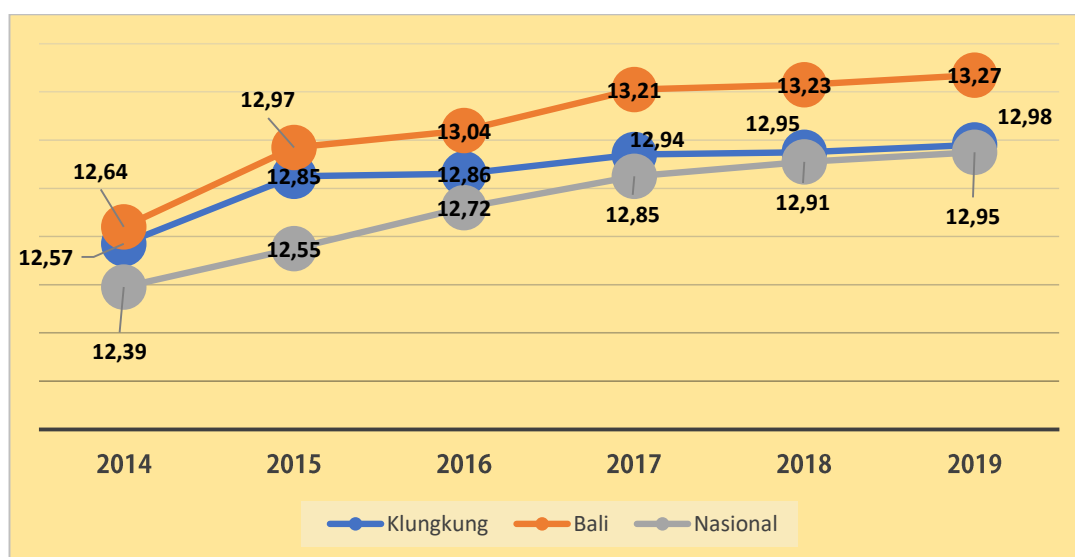
Pembangunan pendidikan di Kabupaten Klungkung memegang peranan yang sangat strategis dalam upaya membangun kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa dan dirumuskan dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan. Upaya peningkatan pelayanan pendidikan diarahkan pada pencapaian kesepakatan internasional khususnya *millennium development goals* (MDGS), yang menetapkan bahwa sebelum tahun 2015 semua anak baik laki-laki maupun perempuan menyelesaikan pendidikan dasar, dan Deklarasi UNESCO tentang *Education for All* (EFA) telah pula menjadi dasar pelaksanaan pembangunan pendidikan di Indonesia. Peningkatan pelayanan pendidikan juga merupakan salah satu upaya untuk mendukung mengentaskan kemiskinan, meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender, serta memperkuat nilai-nilai budaya lokal.

Permasalahan pelayanan pendidikan di Kabupaten Klungkung meliputi upaya peningkatan mutu pendidikan dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan baik formal maupun nonformal termasuk sarana perpustakaan yang menyediakan bahan pustaka yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian isu strategis di bidang pelayanan pendidikan adalah upaya untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam pendidikan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, meningkatkan tingkat literasi masyarakat usia 15 tahun keatas serta menyediakan tenaga pendidik yang sesuai dengan kebutuhan baik secara kualitas maupun kuantitas.

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Angka Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Dibawah ini disajikan capaian kinerja



Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2014 sampai dengan 2019

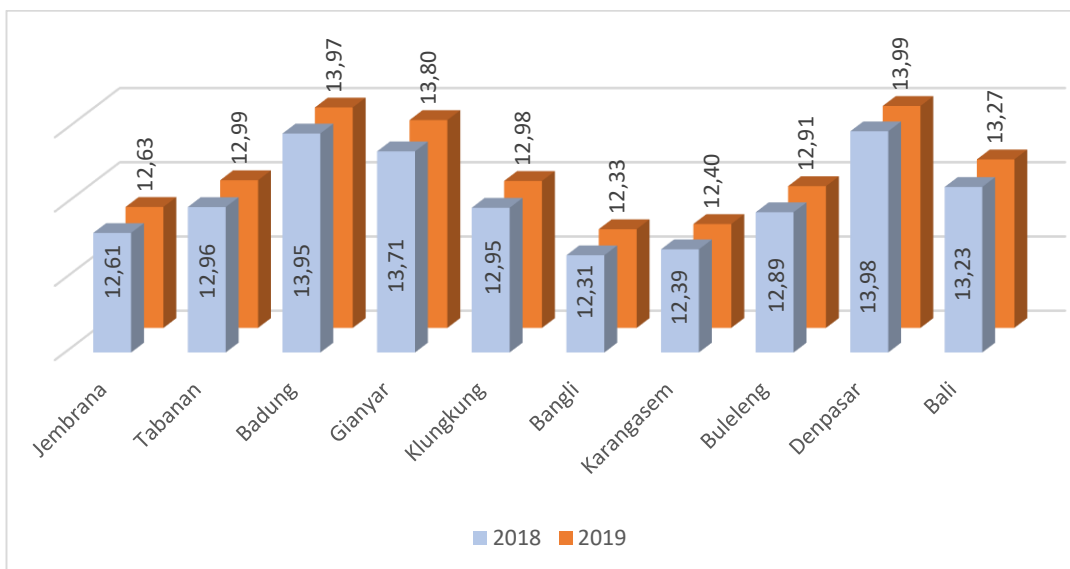


Sumber : Kabupaten Klungkung Dalam Angka 2020, Penyediaan Data Perencanaan Pembangunan

Gambar 3.8 Angka Harapan Lama Sekolah Kab. Klungkung (Tahun), 2014-2019

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Klungkung pada tahun 2019 mencapai 12,98 tahun. Angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2014 yang sebesar 12,57. Jika dilihat dari trend Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Klungkung terus mengalami peningkatan namun berada di bawah Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Bali dan Berada diatas Angka Harapan Lama Sekolah Nasional.

Untuk mendapatkan perbandingan kinerja yang telah dicapai, Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Klungkung perlu dibandingkan dengan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Bali dan Angka Harapan Lama Sekolah Nasional. Gambar dibawah menyajikan perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Klungkung dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Bali, Provinsi Bali dan Nasional.



Sumber : Provinsi Bali Dalam Angka 2020, Penyediaan Data Perencanaan Pembangunan

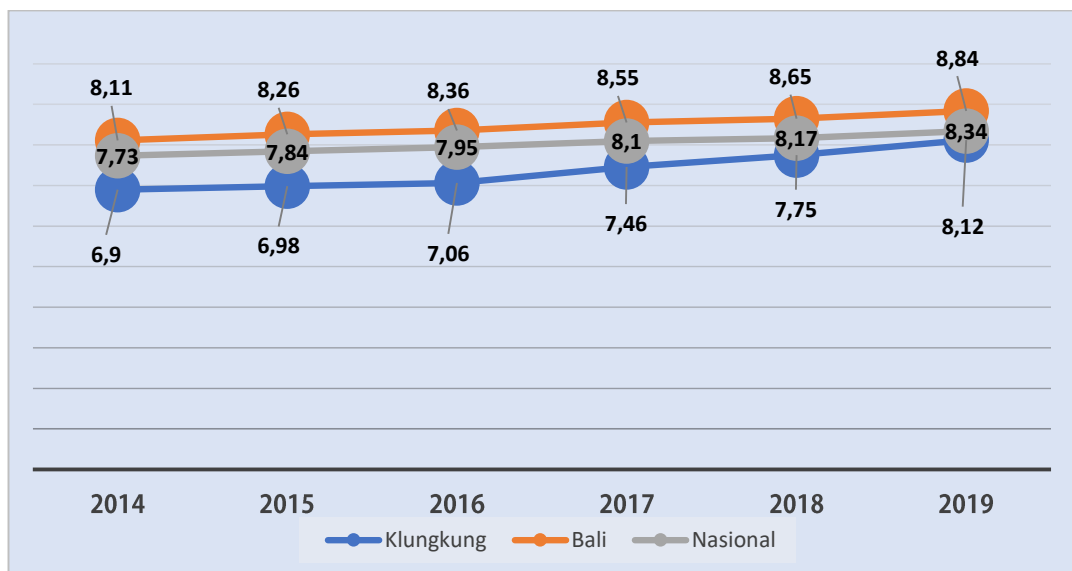
Gambar 3.9 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota se Provinsi Bali dan Provinsi Bali (Tahun), 2018-2019

Berdasarkan gambar di atas maka terlihat bahwa Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Klungkung pada tahun 2019 berada di peringkat 5 dari 9 Kabupaten/Kota di Bali. Angka Harapan Lama Sekolah tertinggi ada Kota Denpasar, dimana anak-anak umur tertentu memiliki peluang untuk tetap bersekolah sampai 13,99 tahun. Sedangkan Harapan Lama Sekolah terendah ada di Kabupaten Bangli, dimana anak hanya memiliki Harapan Lama Sekolah sampai 12,33 tahun (tidak tamat SMP). Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Klungkung pada tahun 2019 baru mencapai angka 12,98 tahun dan masih dibawah rata-rata Provinsi Bali yang mencapai angka 13,27 tahun.

c. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS/MYS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Standar UNDP (Badan Program Pembangunan PBB) adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun. Rata-Rata Lama Sekolah dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan bidang pendidikan.

Dibawah ini disajikan capaian kinerja Rata-Rata Lama Sekolah pada tahun 2014 sampai dengan 2019.

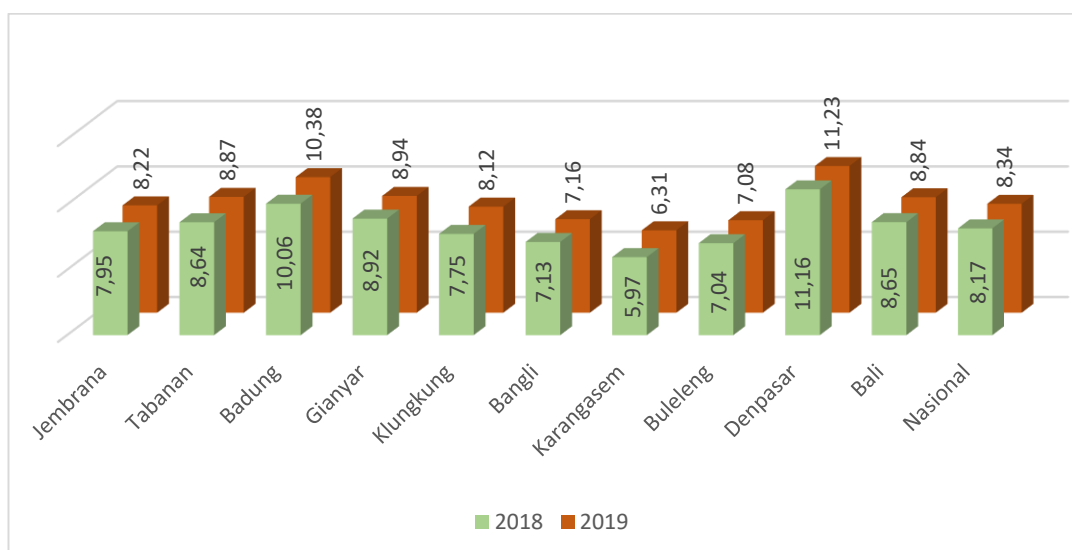


Sumber : Provinsi Bali Dalam Angka 2020, Penyediaan Data Perencanaan Pembangunan

Gambar 3.10 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kab.Klungkung, Provinsi Bali dan Nasional (Tahun), 2014-2019

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Klungkung pada tahun 2019 mencapai angka 8,12 tahun, meningkat dari tahun 2014 yang sebesar 6,90 tahun . Namun Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Klungkung masih berada di bawah Angka Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Bali dan Nasional.

Untuk mendapatkan perbandingan kinerja yang telah dicapai, Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Klungkung perlu dibandingkan dengan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota lain di Provinsi Bali. Gambar dibawah menyajikan perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Klungkung dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.



Sumber :Provinsi Bali Dalam Angka 2020, Penyediaan Data Perencanaan Pembangunan

Gambar 3.11 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se Provinsi Bali, Provinsi Bali dan Nasional (Tahun), 2018-2019

Berdasarkan gambar di atas, bahwa Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Klungkung berada di urutan 6 dari 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Angka Rata-Rata Lama Sekolah tertinggi berada di Kota Denpasar dan terendah di Kabupaten Karangasem.

Dalam mewujudkan kinerja peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Klungkung, Pemerintah Kabupaten Klungkung mengalami kendala sebagai berikut:

1. Kondisi geografis Kabupaten Klungkung yang terdiri atas daratan dan kepulauan mempengaruhi pemerataan kualitas pendidikan yang dipicu oleh terbatasnya akses di beberapa sekolah di kepulauan.
2. Kendali mutu dan jaminan kualitas pendidikan merupakan fokus baru yang belum tergarap, hal tersebut sangat mempengaruhi kualitas lulusan sekolah.
3. Kemiskinan menjadi salah satu sumber penyebab rendahnya kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak, mempengaruhi penggunaan teknologi tinggi dalam pendidikan dan membatasi harapan anak-anak untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi.

Untuk mewujudkan sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat Kabupaten Klungkung, Pemerintah Kabupaten Klungkung melakukan upaya-upaya sebagai berikut:



1. Peningkatan Akses Pendidikan Dasar Dan Menengah

Peningkatan akses dan kualitas pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan berupa perbaikan ruang kelas, perbaikan sarana laboratorium dan prasarana sekolah lainnya.
- b. Untuk meningkatkan akses ke lembaga pendidikan dasar khususnya SMP, mulai tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Klungkung melaksanakan program aksi yaitu penyediaan **ANGKUTAN SISWA GRATIS** bagi siswa SMP. Siswa SMP yang bersekolah di wilayah perkotaan mendapatkan layanan angkutan siswa tanpa di pungut ongkos. Hal tersebut, selain sebagai upaya mengurangi kemacetan lalu lintas, mengurangi angka kecelakaan pengguna kendaraan yang berasal dari siswa SMP juga turut mengarahkan siswa agar pulang dan berangkat sekolah tepat waktu. Orang tua siswa tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi dan dapat mengecek keberangkatan dan kepulangan anak mereka di pos – pos penjemputan angkutan siswa gratis.
- c. Perluasan akses pendidikan dasar juga dilakukan dengan menerapkan sistem penempatan siswa menggunakan rayon atau wilayah terdekat dengan tempat tinggal siswa. Hal tersebut selain menjamin kedekatan pelayanan dengan siswa juga untuk mengurangi kesenjangan sebaran siswa di sekolah yang bertempat di desa dan di perkotaan. Isu bahwa sekolah di perkotaan lebih berkualitas daripada sekolah di pedesaan telah menyebabkan sebaran siswa di sekolah yang berlokasi di wilayah pedesaan menjadi jarang/sedikit dan di sekolah perkotaan justru terlampau padat/berlebihan.

2. Peningkatan Mutu Sekolah dan Lulusan Sekolah

Peningkatan mutu sekolah dan lulusan sekolah dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan mutu tenaga kependidikan dengan pelatihan dan sertifikasi tenaga pengajar
- b. Meningkatkan minat dan budaya baca yang dilakukan dengan semakin meningkatkan tingkat kunjungan ke perpustakaan dan menggalakkan rencana aksi **GEMA ARCA**. Gema Arca (Gerakan Masyarakat Gemar



Membaca) adalah suatu rencana aksi yang bertujuan untuk mengkampanyekan gemar membaca di kalangan masyarakat. Rencana aksi Gema Arca direalisasikan dengan penyediaan perpustakaan daerah, perpustakaan di desa-desa, perpustakaan di sekolah-sekolah dan juga penyediaan perpustakaan dalam bentuk mobil keliling yang menyediakan layanan perpustakaan di tempat-tempat keramaian di Kabupaten Klungkung. Masyarakat yang mengunjungi mobil perpustakaan keliling dapat membaca atau melakukan peminjaman buku di mobil perpustakaan keliling tersebut.

- c. Peningkatan tingkat pendidikan masyarakat usia produktif dilaksanakan dengan peningkatan akses pendidikan kepada masyarakat melalui pola pendidikan informal dan non formal. Pola pendidikan ini direalisasikan dengan adanya rencana aksi **GEMA PLATUK**. Pola Layanan Tutor Keluarga (PLATUK) dirancang untuk menyelesaikan masalah tata kelola layanan masyarakat buta aksara dan drop out yang belum optimal. Pola Layanan Tutor Keluarga (PLATUK) bertujuan mewujudkan optimalisasi tata kelola layanan belajar masyarakat secara menyeluruh dengan cara memberi layanan keaksaraan fungsional dan layanan kesetaraan dalam bentuk penyediaan kesempatan warga belajar untuk belajar di sanggar belajar dan kesempatan warga belajar untuk belajar di rumah sendiri dengan didatangi tutor keluarga secara berkala sesuai jadwal yang telah disepakati serta Pola Layanan Tutor Keluarga (PLATUK) didesain juga dengan memberi layanan kecakapan hidup. Indikator output yang diharapkan adalah meningkatnya partisipasi masyarakat sebagai warga belajar, meningkatnya kelompok warga belajar yang bermuara nantinya pada peningkatan rata-rata lama belajar masyarakat. Outcome dari Pola Layanan Tutor Keluarga (PLATUK) adalah pada terserapnya lulusan di dunia kerja. Pola Layanan Tutor Keluarga (PLATUK) merupakan inovasi tata kelola layanan publik dalam bentuk program keaksaraan dan kesetaraan yang implementasinya dikreasi dengan pola layanan tutor keluarga. Sebelum dicanangkan Gema Shanti Klungkung Mengajar Pola Layanan Tutor Keluarga (PLATUK), layanan program keaksaraan dan kesetaraan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan tatap muka di tempat belajar saja bagi warga belajar yang mau datang ke



tempat belajar. Pola Layanan Tutor Keluarga pada gerakan implementasi program keaksaraan dan kesetaraan yang implementasinya didesain dengan pemberian program kecakapan hidup bagi warga belajar dan pelayanan tutor keluarga dalam bentuk kegiatan tutor yang secara aktif terjadwal melakukan kunjungan rumah (*Home Visit*) ke tempat warga belajar yang tidak bisa atau tidak mau datang ke tempat belajar. Hal ini terlaksana karena para tutor yang digerakkan berasal dari daerah sekitar warga belajar berada. Kreasi implementasi program ini ditujukan untuk memaksimalkan partisipasi warga belajar dalam mengikuti program keaksaraan dan kesetaraan secara kuantitas maupun kualitas layanan tanpa dibarengi dengan peningkatan pembiayaan. Waktu belajar efektif dimanfaatkan karena start pembelajaran ditentukan oleh kedatangan tutor yang sesuai jadwal.

3. Peningkatan Prestasi Atlit Dan Seniman

Peningkatan prestasi atlit dan seniman juga merupakan faktor pendorong peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Klungkung. Atlit dan seniman memberikan motivasi terhadap pelajar dan pemuda untuk terus berupaya meningkatkan kemampuannya sehingga dapat memiliki prestasi di bidang seni dan olahraga. Dengan memiliki prestasi di bidang seni dan olahraga kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menjadi lebih terbuka demikian pula kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Upaya peningkatan prestasi atlit dan seniman dilakukan dengan melakukan pembinaan terhadap masing-masing cabang olahraga dan seni di Kabupaten Klungkung, pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga serta pemberian tanda penghargaan terhadap atlit dan seniman yang berprestasi.

DOKUMENTASI PENCAPAIAN SASARAN



Bupati Klungkung Bersama siswa berprestasi



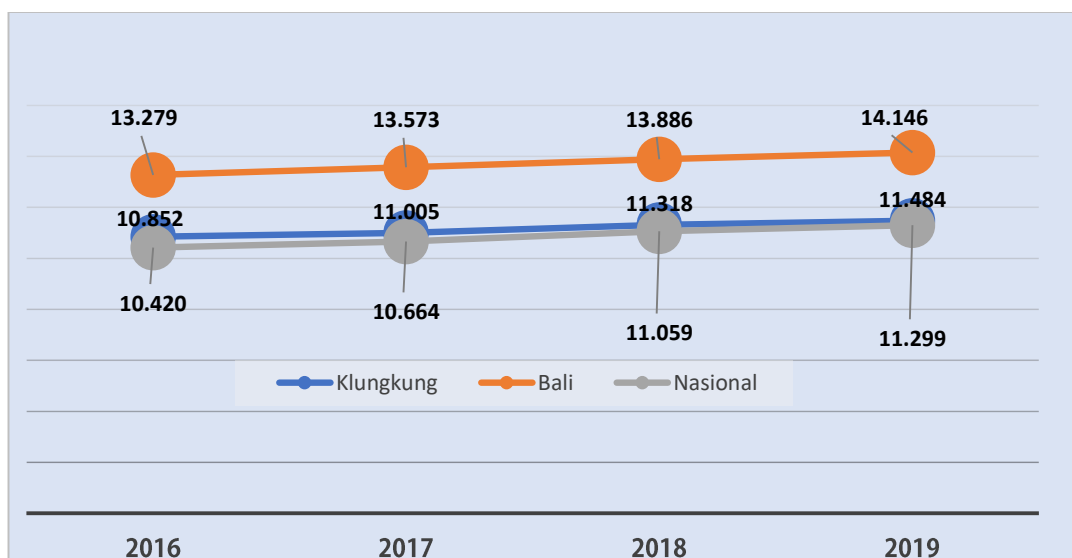
Bupati dan Wakil Bupati Klungkung berfoto Bersama anak-anak pramuka

d. Pengeluaran Per Kapita

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu cara untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup; sedangkan kualitas non fisik (intelektualitas) melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf; dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari nilai *purcashing power parity index*(ppp) atau sering disebut pengeluaran per kapita. Komponen standar hidup layak diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan. Sebagai catatan, UNDP menggunakan indikator PDB per kapita riil yang telah disesuaikan (*adjusted real GDP per capita*) sebagai ukuran komponen tersebut karena tidak tersedia indikator lain yang lebih baik untuk keperluan perbandingan antar negara.

Dalam menghadapi tantangan globalisasi, pemerintah tidak akan cukup kuat untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan kesenjangan tanpa dukungan masyarakat. Namun, keberlanjutan pembangunan pun akan terhenti manakala masyarakat yang menjadi tulang punggung pembangunan tidak cukup memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Klungkung mencanangkan berbagai program

unggulan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan daya beli masyarakat yang ditunjukkan pada gambar berikut:

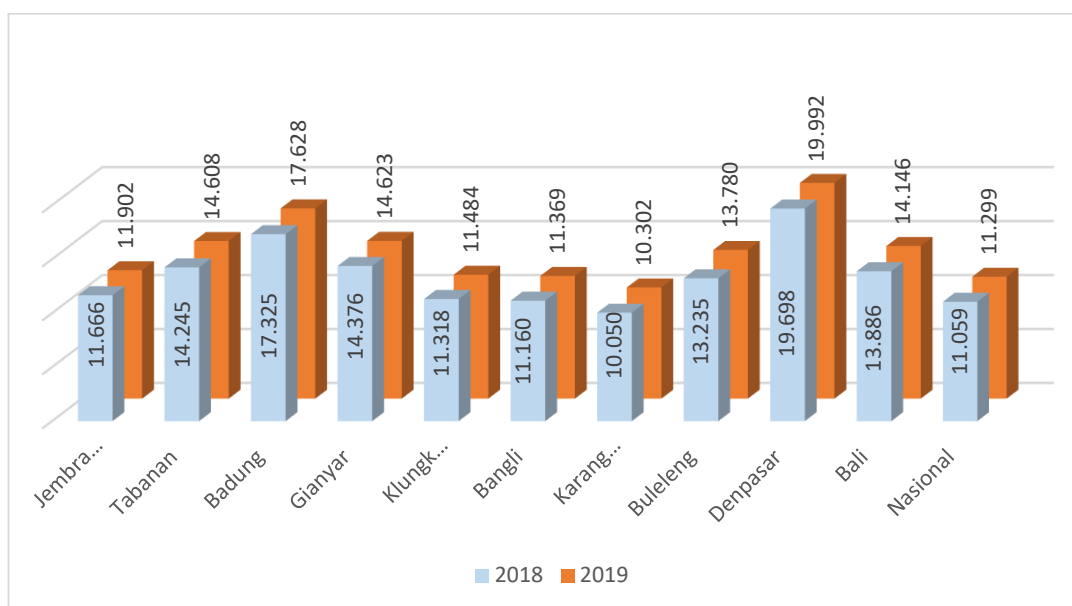


Sumber :Provinsi Bali Dalam Angka 2020, Penyediaan Data Perencanaan Pembangunan

Gambar 3.12 Pengeluaran Per Kapita/Tahun/Orang Kabupaten Klungkung,Provinsi Bali dan Nasional (Rp. 000), 2016-2019

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa pengeluaran per kapita penduduk di Kabupaten Klungkung mencapai Rp. 11.484.000 Per orang Per Tahun. Angka tersebut berada di atas angka pengeluaran per kapita penduduk secara nasional yang sebesar Rp. 11.299.999 per orang per tahun. Dibandingkan dengan Provinsi Bali, Angka Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Klungkung masih berada di bawah Provinsi Bali yang sebesar Rp. 14.146.000 per orang per tahun.

Untuk memperoleh gambaran capaian kinerja Pengeluaran per kapita penduduk di Kabupaten Klungkung perlu dibandingkan dengan angka pengeluaran per kapita penduduk di Kabupaten/Kota lain di Provinsi Bali. Gambar berikut menyajikan angka pengeluaran per kapita penduduk di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada tahun 2018-2019.



Sumber :Provinsi Bali Dalam Angka 2020, Penyediaan Data Perencanaan Pembangunan

Gambar 3.13 Pengeluaran Per Kapita/Tahun/Orang Kabupaten/Kota se Provinsi Bali, Provinsi Bali dan Nasional (Rp. 000), 2018-2019

Capaian kinerja pengeluaran per kapita per tahun per orang Kabupaten Klungkung berada di peringkat 7 dari 9 Kabupaten/Kota di Bali. Pengeluaran per kapita tertinggi ada di Kota Denpasar dan terendah ada di Kabupaten Karangasem. Untuk meningkatkan paritas daya beli masyarakat Kabupaten Klungkung, Pemerintah Kabupaten Klungkung melaksanakan beberapa program unggulan diantaranya:

- a. Fasilitas pemberangkatan tenaga kerja ke luar negeri.
Program unggulan ini ditujukan kepada tenaga kerja yang berasal dari Keluarga Miskin yang memiliki kemauan untuk bekerja di luar negeri. Program ini memberikan keterampilan dan memfasilitasi keberangkatan tenaga kerja Kabupaten Klungkung sampai bekerja di luar negeri.
- b. Peningkatan kompetensi teknis tenaga kerja.
Peningkatan kompetensi teknis berupa pelatihan bagi tenaga kerja yang bekerja di sektor-sektor pariwisata. Selain memberikan tambahan keterampilan atau peningkatan kompetensi, Pemerintah Kabupaten Klungkung juga memfasilitasi tenaga kerja untuk memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya.
- c. Pelatihan kewirausahaan



Pelatihan kewirausahaan diberikan untuk memberikan kemampuan wirausaha bagi angkatan kerja yang memiliki minat untuk mengembangkan kemampuan wirausaha. Program ini sekaligus merupakan solusi terbatasnya ketersediaan lapangan pekerjaan. Dengan penambahan wirausaha baru, lapangan kerja akan tercipta dan menjadi solusi bagi pencari kerja lain.

Dalam melaksanakan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten senantiasa dituntut untuk melaksanakan pelayanan dengan efektif dan efisien. Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Analisis efisiensi difokuskan pada indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur dari kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/atau lebih besar, atau persentase capaian *output* sama tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing sebagai berikut:

Tabel 3.4
 Tingkat Efisiensi
 Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
 Tahun 2019

Indikator Kinerja	Target Capaian Sasaran (%)	Target Capaian Keuangan (%)	Standar Efisiensi	Realisasi Capaian Sasaran (%)	Realisasi Capaian Keuangan (%)	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	100	100	1,00	100,82	89,95	1,12	0,12	Efisien
Rata - Rata	100	100	1,00	100,82	89,95	1,12	0,12	Efisien

Sumber : data diolah

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2019, tingkat efisiensi sasaran Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing adalah sebesar 0,12 dimana indeks efisiensi lebih tinggi dari standar efisiensi. Pada tahun 2019 sasaran Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing dicapai dengan efisien. Sasaran Terwujudnya Pembangunan Manusia



Pemerintah Kabupaten Klungkung
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019

Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing didukung dengan program pendukung sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.5
Efisiensi Anggaran
Sasaran Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
Tahun 2019

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	69.838.613.747,84	50.331.841.039	19.506.772.708,80	72,07	Dinas Kesehatan
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	87.307.000,00	80.871.850	6.435.150,00	92,63	Dinas Kesehatan
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	536.148.375	451.478.446	84.669.929,00	84,21	Dinas Kesehatan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.187.852.500	1.047.502.093	140.350.407,00	88,18	Dinas Kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.772.283.124	1.409.649.550	362.633.573,63	79,54	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak	287.094.500	278.553.150	8.541.350,00	97,02	Dinas Kesehatan
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)	595.695.180	486.934.171	108.761.009,00	81,74	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Perorangan	31.020.100.916	29.617.893.210	1.402.207.706,03	95,48	Dinas Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	13.296.551.587	13.135.354.563	161.197.023,98	98,79	RSUD
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	179.464.600	178.775.930	688.670,00	99,62	RSUD
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah	76.044.770.159	74.547.366.567	1.497.403.592,33	98,03	RSUD



Pemerintah Kabupaten Klungkung
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)	Ket
Program Pendidikan Anak Usia Dini	5.265.697.700	4.407.134.496	858.563.204,00	83,70	Dinas Pendidikan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	9.699.335.361	9.443.549.504	255.785.857,00	97,36	Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Non Formal	729.934.500	635.899.500	94.035.000,00	87,12	Dinas Pendidikan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	11.640.849.178	11.580.416.420	60.432.758,00	99,48	Dinas Pendidikan
Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	23.819.671.963	23.400.029.478	419.642.485,00	98,24	Dinas Pendidikan
Program Penyelenggaraan Perpustakaan	779.048.770	761.865.134	17.183.636,00	97,79	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program Peningkatan dan Pengembangan Prestasi Kepemudaan dan Olahraga	2.171.285.264	2.096.449.710	74.835.554,00	96,55	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	957.226.000	890.033.419	67.192.581,00	92,98	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	143.093.000	111.175.610	31.917.390,00	77,69	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	379.294.000	372.352.000	6.942.000,00	98,17	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Jumlah	250.431.317.424	225.265.125.840	25.166.191.584,77	89,95	

Sumber : Simda Keuangan, 14 Maret 2020 (sebelum audit BPK)

Pada tahun 2019, Sasaran Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing didukung dengan 21 program pendukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 250.431.317.424,00 dan terealisasi sebesar Rp. 225.265.125.840,00 dan sisa anggaran sebesar Rp. 25.166.191.584,77,00 atau terealisasi sebesar 89,95 persen. Sasaran ini didukung oleh Dinas Kesehatan



Kabupaten Klungkung, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung dalam upaya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan serta pelayanan pendidikan non formal dan informal. Selain Dinas Pendidikan, seluruh Kecamatan di Kabupaten Klungkung juga mendukung pencapaian sasaran ini melalui pelaksanaan pekan olahraga dan seni pelajar tingkat kecamatan, pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga, serta penyelenggaraan usaha kesehatan sekolah. Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga mendukung dalam pelaksanaan Pekan Olahraga dan Seni Pelajar tingkat Kabupaten serta pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga yang menjadi kewenangan Kabupaten. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan memegang peranan dalam memberikan pelayanan perpustakaan daerah, desa dan kecamatan maupun perpustakaan keliling untuk mendekatkan pelayanan perpustakaan ke masyarakat. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja memberikan dukungan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja dan perindustrian di Kabupaten Klungkung.



Sasaran 3

Menurunnya Angka Kemiskinan dari 6,29% Menjadi 3%

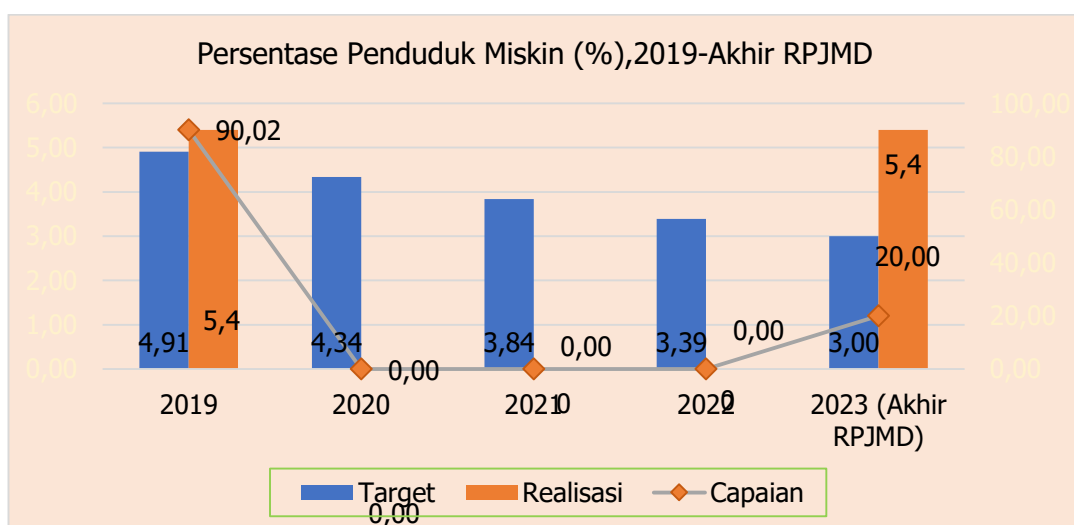
Ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia menjadi fenomena isu yang kompleks. Tiap rezim pemerintah dihadapkan pada pekerjaan menurunkan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan di negara berpenduduk 240 juta orang ini. Isu ketimpangan ekonomi sudah ramai dibicarakan di Indonesia sejak 1970-an. Ramai muncul kajian dan pemikiran mencari ramuan agar pertumbuhan ekonomi juga bisa menciptakan pemerataan, yang akhirnya mengurangi ketimpangan. Kemiskinan saat ini memang merupakan suatu kendala dalam masyarakat ataupun dalam ruang lingkup yang lebih luas. Kemiskinan menjadi masalah sosial karena ketika kemiskinan mulai merambah atau bertambah banyak maka angka kriminalitas yang ada akan meningkat. Banyak orang saat ini menerjemahkan kemiskinan sebagai pangkal penyebab masalah sosial dan ekonomi. Kini kemiskinan menjadi masalah sosial ketika stratifikasi dalam masyarakat sudah menciptakan tingkatan atau garis-garis pembatas, sehingga adanya kejanggalan atau batas pemisah dalam interaksi atau komunikasi antara orang yang berada di tingkatan yang dibawah dan di atasnya.

Kemiskinan juga sangat berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang akhirnya akan merusak lingkungan itu sendiri. Penduduk miskin yang terdesak akan mencari lahan-lahan kritis atau lahan-lahan konservasi sebagai tempat pemukiman. Lahan-lahan yang seharusnya berfungsi sebagai kawasan penyangga atau mempunyai fungsi konservasi tersebut akan kehilangan fungsi lingkungannya setelah dimanfaatkan untuk kawasan pemukiman. Akibat berikutnya, maka akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan lingkungan.

Selain itu, penduduk miskin pun akan sulit dalam hal mencari lapangan pekerjaan, penduduk miskin tanpa mata pencaharian akan memanfaatkan lingkungan sekitar, sebagai usaha dalam memenuhi kebutuhannya tanpa mempertimbangkan kaidah-kaidah ekologis yang berlaku. Karena desakan ekonomi, banyak penduduk yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memasuki kawasan-kawasan yang sebenarnya dilindungi, apabila tidak dicegah dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama menyebabkan kawasan lindung akan berkurang bahkan

hilang sama sekali, yang berdampak pada hilangnya fungsi lingkungan (sebagai pemberi jasa lingkungan).

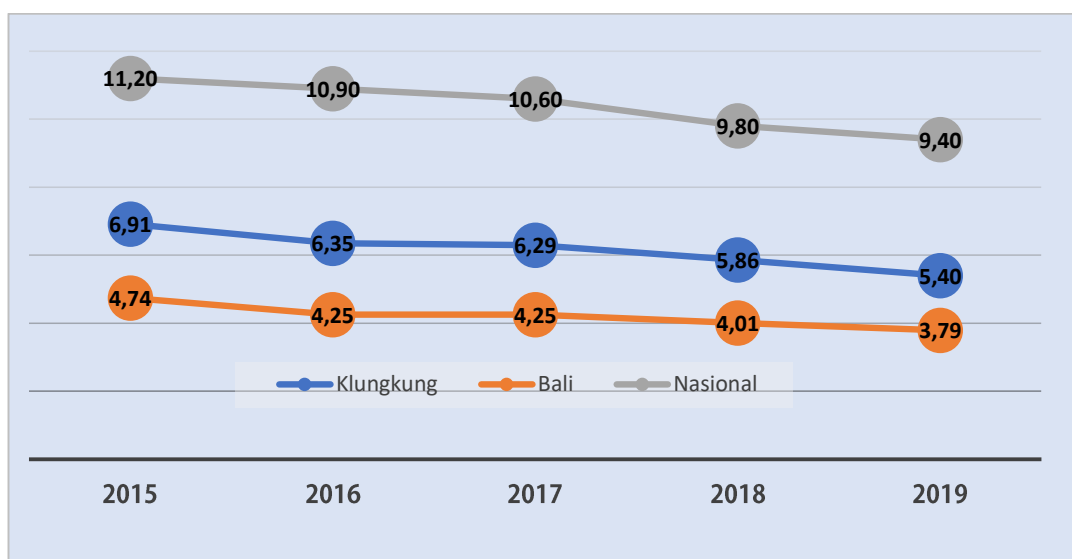
Berangkat dari pentingnya mendukung program nasional dalam menurunkan angka kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Klungkung menetapkan sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dari 6,29% menjadi 3% yang diukur dengan indikator kinerja Persentase Penduduk Miskin. Capaian target indikator sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dari 6,29% menjadi 3% tahun 2019 disajikan pada grafik sebagai berikut:



Sumber : Kabupaten Klungkung Dalam Angka 2020, Penyediaan Data Perencanaan Pembangunan

Gambar 3.14 Persentase Penduduk Miskin (%), 2019-2023 dan Capaian Akhir RPJMD.

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Klungkung pada tahun 2019 belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2019, Persentase Penduduk Miskin ditargetkan sebesar 4,91 persen namun berdasarkan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung, Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Klungkung adalah sejumlah 5,4 persen. Untuk melihat capaian kinerja penurunan kemiskinan ini perlu dilihat trend persentase penduduk miskin di Kabupaten Klungkung. Gambar berikut menyajikan trend persentase penduduk miskin di Kabupaten Klungkung dibandingkan dengan Provinsi Bali dan Nasional.

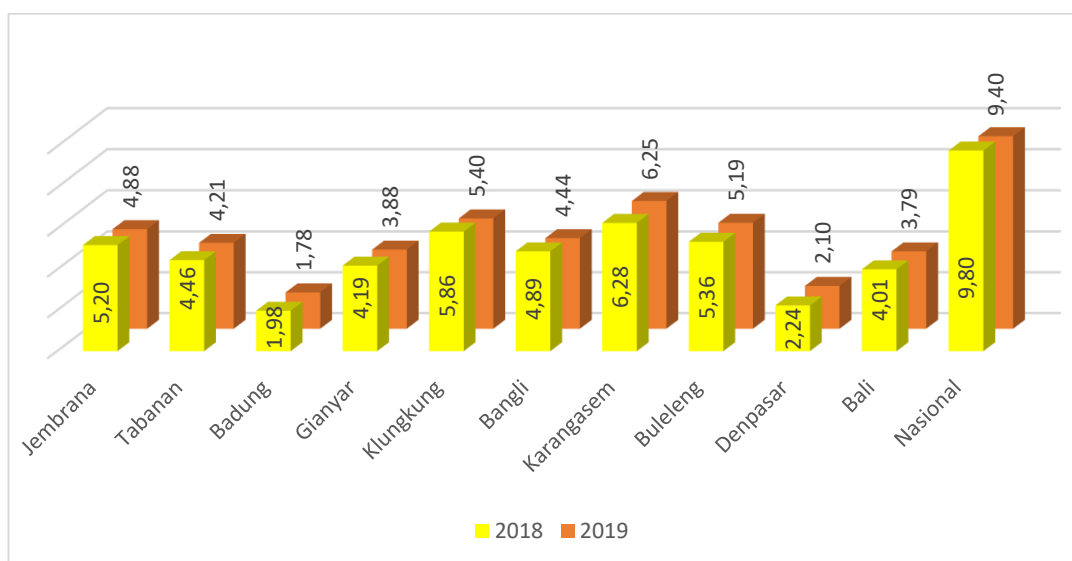


Sumber : Provinsi Bali Dalam Angka 2020, Penyediaan Data Perencanaan Pembangunan

Gambar 3.15 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dan Nasional (%), 2015-2019.

Jika dilihat dari trend Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klungkung terus mengalami penurunan, dimana sebelumnya Persentase Penduduk Miskin pada tahun 2015 sebesar 6,91 persen turun menjadi 5,40 persen di tahun 2019. Dibandingkan dengan Provinsi Bali, persentase penduduk miskin di Kabupaten Klungkung masih berada diatas rata-rata Provinsi Bali. Sedangkan jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin nasional, persentase penduduk miskin di Kabupaten Klungkung lebih rendah dari angka nasional sebesar 9,40 persen di tahun 2019. Untuk itu diperlukan usaha-usaha untuk mempertahankan pertumbuhan penduduk miskin tidak melewati target yang telah ditetapkan.

Untuk mendapatkan perbandingan kinerja yang telah dicapai, Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klungkung perlu dibandingkan dengan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Gambar dibawah menyajikan perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klungkung dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.



Sumber : Provinsi Bali Dalam Angka 2020, Penyediaan Data Perencanaan Pembangunan

Gambar 3.16 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Provinsi Bali dan Nasional (%), 2018-2019

Berdasarkan gambar di atas, maka terlihat Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Klungkung berada di posisi ke 8 dari 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Persentase penduduk miskin terbanyak ada di Kabupaten Karangasem dengan 6,25 persen dan terendah ada di Kabupaten Badung dengan 1,98 persen. Jika dibandingkan dengan Provinsi Bali, Kabupaten Klungkung masih berada di bawah rata-rata provinsi yang sebesar 3,79 persen, namun masih berada di bawah rata-rata nasional yang sebesar 9,40. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama di Kabupaten Klungkung, karena dengan jumlah penduduk yang sedikit, persentase penduduk miskinnya lebih tinggi dari Kabupaten/Kota lain di Provinsi Bali.

Dalam usaha mencapai sasaran menurunnya angka kemiskinan dari 6,29% menjadi 3%, Pemerintah Kabupaten Klungkung menemui kendala sebagai berikut:

1. Belum efektifnya pemberian bantuan sosial dalam menanggulangi kemiskinan dan tingkat ketimpangan, disebabkan oleh beberapa penyimpangan yang ditemui dalam penyalurannya.
2. Inflasi harga bahan pangan yang cukup tinggi mengakibatkan masyarakat yang rentan yang berada di perbatasan garis kemiskinan, menjadi miskin tatkala terdapat kenaikan harga bahan pangan pokok.



3. Lemahnya pendataan terkait kemiskinan berupa :
 - a. Data *by name by address* penduduk miskin yang sering tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Hal ini menyebabkan bantuan yang diberikan tidak dapat sampai kepada penduduk yang benar-benar membutuhkan.
 - b. Profil kemiskinan *by name by address* yang tidak lengkap. Hal ini menyebabkan jenis bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan penyebab kemiskinannya.

Untuk mencapai penurunan Persentase Penduduk Miskin sangat ditentukan oleh pelaksanaan pembangunan di segala bidang di Kabupaten Klungkung, mengingat permasalahan kemiskinan adalah permasalahan multi sektor. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam menurunkan Persentase Penduduk Miskin adalah sebagai berikut:

1. Monitoring Kondisi Kemiskinan
Secara berkala dilakukan kegiatan Bedah Desa yang merupakan kegiatan untuk monitoring pelaksanaan pembangunan di Desa sekaligus memastikan penanganan atas kemiskinan yang tepat sesuai permasalahan yang dihadapi.
2. Gerakan Masyarakat Berantas Kemiskinan (Gema Taskin) melalui pemberian bantuan bedah rumah, Bantuan Pangan Non Tunai (RASTRA), Program Keluarga Harapan (PKH) dan capaian sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :
 - a. Peningkatan kualitas rumah tinggal bagi Rumah Tangga Sasaran
 - b. Meningkatkan kualitas rumah tinggal Rumah Tangga Sasaran melalui program BEDAH RUMAH.
 - i. Bedah Rumah (APBD Kabupaten) = 986 unit
 - ii. Rehab Rumah (APBD Kabupaten) = 604 unit
 - c. BPNT diberikan kepada 8.560 KPM
 - d. PKH diberikan kepada 4.023 KK
 - e. Bantuan Sembako kepada Fakir Miskin sebanyak 305 paket
 - f. Bantuan Sembako kepada Disabilitas sebanyak 50 paket
 - g. Bantuan Sembako kepada ODGJ sebanyak 40 paket

Untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi penanganan masalah social di Kabupaten Klungkung dapat dilihat dari jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Klungkung sebagaimana table:



Tabel 3.6.
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2017-2019

PMKS	2017	2018	2019
Fakir Miskin	11.192	14.327	14.327
Penyandang Disabilitas	1.467	1.668	1.668
ODGJ	372	468	468
Lanjut Usia Terlantar		998	998

Sumber: DSP3A Kabupaten Klungkung, 2020

3. Mendorong Tercapainya Penduduk Yang Tumbuh Seimbang.

Penduduk yang tumbuh seimbang merupakan salah satu faktor penentu masalah kemiskinan, dimana jumlah penduduk yang semakin banyak akan menyebabkan berbagai permasalahan lain karena tidak dibarengi dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Upaya untuk mendorong tercapainya penduduk yang tumbuh seimbang ini dilakukan dengan upaya meningkatkan pelayanan masyarakat yang menggunakan KB sehingga masyarakat sangat menyadari pentingnya perencanaan keluarga yang baik. Selain hal tersebut juga dilakukan konseling dan pembinaan kesehatan reproduksi bagi remaja dalam rangka menurunkan angka perkawinan dibawah umur.

4. Menurunkan Angka Pengangguran

Pengangguran merupakan salah satu faktor pendorong peningkatan kemiskinan, karenanya Pemerintah Kabupaten Klungkung melakukan upaya-upaya pemberian pelatihan keterampilan kerja terhadap tenaga kerja agar mampu bersaing dalam persaingan pasar tenaga kerja serta mengadakan kerjasama-kerjasama dengan dunia usaha agar tenaga kerja di Kabupaten Klungkung dapat langsung tersalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan tenaga kerja. Selain itu, upaya pengurangan angka pengangguran juga dilakukan dengan menggalakkan program transmigrasi ke daerah-daerah yang masih jarang penduduknya.

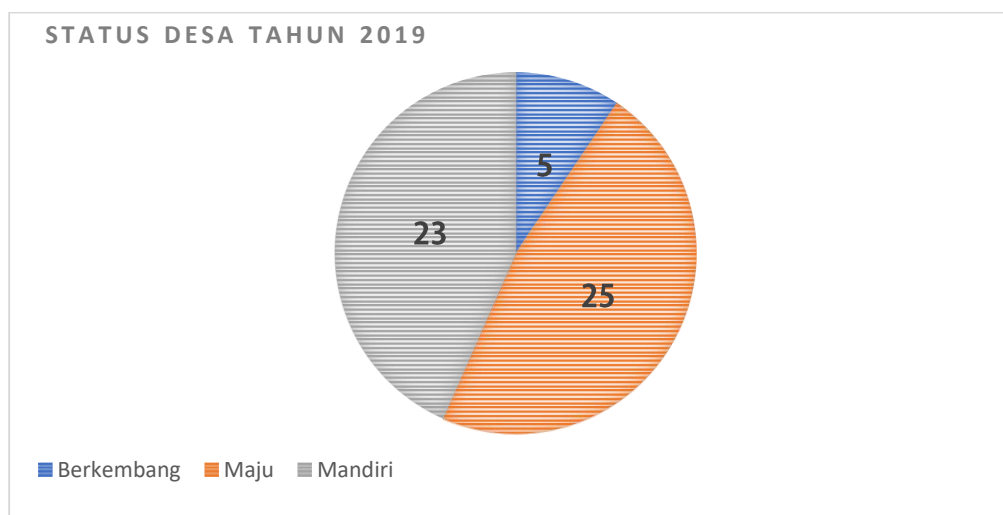
5. Peningkatan Peran Serta Perempuan.

Perempuan seringkali menjadi objek tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, karenanya Pemerintah Kabupaten Klungkung melakukan upaya-upaya peningkatan peran serta perempuan dengan memberikan pelatihan

wirausaha terhadap perempuan yang tidak memiliki pekerjaan sehingga dapat memiliki keterampilan kerja dan diharapkan dapat menghasilkan pendapatan guna turut membantu menopang kehidupan keluarga.

6. Peningkatan Kemandirian Masyarakat di Desa.

Peningkatan kemandirian masyarakat desa dilakukan dengan terus aktif mendorong pemerintahan desa dapat mengembangkan potensi yang ada di Desa masing-masing sesuai dengan karakteristik desanya, sehingga diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kemandirian desa. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian Status Desa di Kabupaten Klungkung yang di dominasi Desa Maju dan Desa Mandiri. Gambar dibawah menyajikan status Desa di Kabupaten Klungkung berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2019 yang dirilis Kementerian Desa sebagai berikut:



Sumber : Indeks Desa Membangun, Website Kementerian Desa, 2020

Gambar 3.17 Status Desa di Kabupaten Klungkung, 2019

Dari data diatas dapat dilihat, bahwa sebanyak 5 desa menyandang status desa Berkembang, 25 desa dengan status maju, dan 23 desa dengan status mandiri. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi



dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Dalam melaksanakan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten senantiasa dituntut untuk melaksanakan pelayanan dengan efektif dan efisien. Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Analisis efisiensi difokuskan pada indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur dari kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/atau lebih besar, atau persentase capaian *output* sama tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dari 6,29% menjadi 3% sebagai berikut:

Tabel 3.7.
 Tingkat Efisiensi
 Menurunnya Angka Kemiskinan dari 6,29% menjadi 3%
 Tahun 2019

Indikator Kinerja	Target Capaian Sasaran (%)	Target Capaian Keuangan (%)	Standar Efisiensi	Realisasi Capaian Sasaran (%)	Realisasi Capaian Keuangan (%)	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Persentase Penduduk Miskin (%)	100	100	1,00	90,02	90,53	0,99	-0,01	Tidak Efisien
Jumlah	100	100	1,00	90,02	90,53	0,99	-0,01	Tidak Efisien

Sumber : data diolah



Pemerintah Kabupaten Klungkung
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2019, tingkat efisiensi sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dari 6,29% menjadi 3% adalah sebesar - 0,01 dimana indeks efisiensi lebih rendah dari standar efisiensi. Pada tahun 2019 sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dari 6,29% menjadi 3% dicapai dengan tidak efisien. Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dari 6,29% menjadi 3% didukung dengan program pendukung sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.8.
Efisiensi Anggaran
Menurunnya Angka Kemiskinan dari 6,29% menjadi 3%
Tahun 2019

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.098.517.532	749.294.794	349.222.738,44	68,21	Dinas Sosial
Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	19.667.703.300	18.863.798.046	803.905.254,00	95,91	Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Pilar-Pilar kesejahteraan Sosial dan Nilai-Nilai Kepahlawanan	3.465.844.704	3.159.685.222	306.159.482,48	91,17	Dinas Sosial
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	489.330.850	432.599.730	56.731.120,00	88,41	Dinas Sosial
Program Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak	381.833.500	348.606.555	33.226.945,00	91,30	Dinas Sosial
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	1.933.097.804	1.903.779.610	29.318.194,00	98,48	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	85.178.000	85.121.500	56.500,00	99,93	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	831.336.496	689.785.864	141.550.631,94	82,97	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Program Pengembangan Potensi Desa	27.121.950	25.688.250	1.433.700,00	94,71	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Program Keluarga Berencana	2.065.165.700	966.724.235	1.098.441.465,30	46,81	Dinas Pemberdayaan



Pemerintah Kabupaten Klungkung
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)	Ket
					an Masyarakat
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	661.719.521	623.150.402	38.569.118,89	94,17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Program Transmigrasi Regional	99.550.000	41.315.200	58.234.800,00	41,50	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Jumlah	30.806.399.358	27.889.549.408	2.916.849.950,05	90,53	

Sumber : SIMda Keuangan, 14 Maret 2020 (sebelum audit BPK)

Pada tahun 2019, Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dari 6,29% menjadi 3% didukung dengan 12 program pendukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 30.806.399.358,00 dan terealisasi sebesar Rp. 27.889.549.408,00 dan sisa anggaran sebesar Rp. 2.916.849.950,05,00 atau terealisasi sebesar 90,53 persen. Sasaran ini didukung oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, serta seluruh Kecamatan di Kabupaten Klungkung.



DOKUMENTASI PENCAPAIAN SASARAN



Bupati Klungkung Bersama warga miskin



Pemberian bantuan sembako bagi lansia



Bupati Klungkung memberikan bantuan bagi penderita disabilitas



Bantuan Sarana Usaha untuk peserta Pembekalan Program Penciptaan Wirausaha Muda



Sasaran 4

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

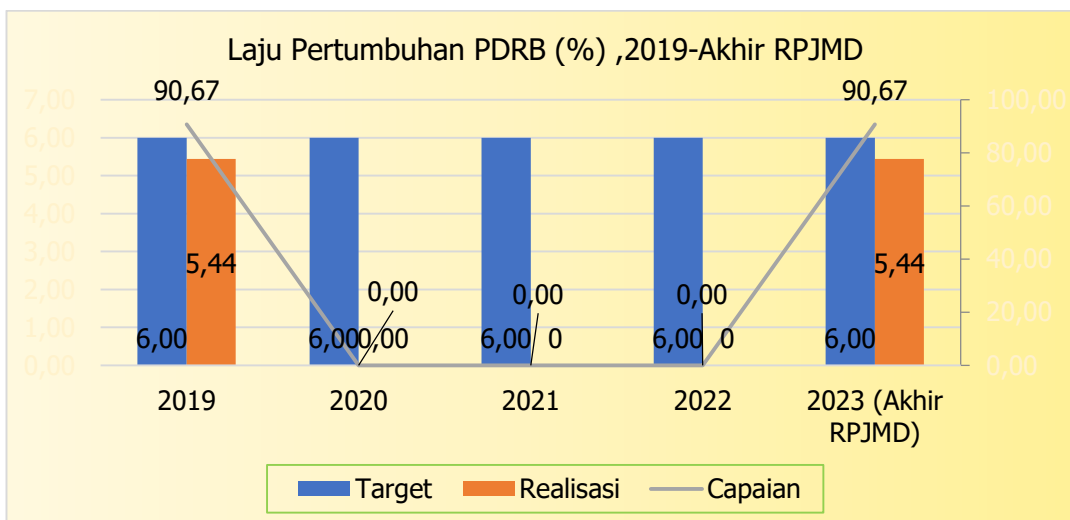
Sampai saat ini telah menjadi perdebatan hangat oleh berbagai pihak mengenai mana yang lebih penting, pertumbuhan atau ataukah pemerataan ekonomi. Terlepas dari mana yang lebih penting, yang pasti pertumbuhan ekonomi sangat penting dan dibutuhkan. Sebab, tanpa pertumbuhan tidak akan terjadi peningkatan kesejahteraan, kesempatan kerja, produktivitas, dan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi juga penting untuk mempersiapkan perekonomian menjalani tahapan kemajuan selanjutnya. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan jumlah output (barang dan jasa) dalam suatu perekonomian suatu daerah dalam jangka satu tahun. Jadi intinya jika ada peningkatan jumlah produk barang dan jasa barulah perekonomian suatu daerah dikatakan tumbuh. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya.

Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan dengan membangun infrastruktur di daerah-daerah. Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud diantaranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya



berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian. Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat proses pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros, KKN, dan sebagainya. Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas. Keadaan politik suatu negara mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang ada. Dimana kondisi politik yang stabil dan baik akan memberikan kenyamanan bagi para individu dan mendukung kinerja dalam produksi. Dengan demikian individu akan bebas berinovasi dan mengembangkan segala potensinya dengan leluasa. Sehingga dengan demikian pertumbuhan ekonomi akan tercapai.

Kompleksitas permasalahan perekonomian di Kabupaten Klungkung merupakan salah satu fokus yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung. Dalam upaya mendukung sasaran pembangunan nasional, Pemerintah Kabupaten Klungkung menetapkan sasaran Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang diukur dengan indikator Laju Pertumbuhan PDRB. Capaian target indikator sasaran Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi tahun 2019 disajikan pada grafik sebagai berikut:



Sumber : Kabupaten Klungkung Dalam Angka 2020, Penyediaan Data Perencanaan Pembangunan

Gambar 3.18 Laju Pertumbuhan PDRB (%), 2019-2023 dan Capaian Akhir RPJMD.

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Klungkung pada tahun 2019 masih dibawah target yang ditetapkan. Pada tahun 2019, Laju Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan sebesar 6 persen namun berdasarkan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung, Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Klungkung adalah sejumlah 5,44 persen atau tercapai sebesar 90,67 persen. Dibandingkan dengan target RPJMD, capaian akhir RPJMD tercapai sebesar 90,67 persen. Untuk itu diperlukan usaha-usaha untuk terus meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Untuk mengetahui lapangan usaha yang memiliki kontribusi terhadap perekonomian di Kabupaten Klungkung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9.
 Distribusi PDRB Atas Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Kabupaten Klungkung
 Tahun 2015-2019 (persen)

Kategori PDRB	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24,04	23,24	22,10	21,74	21,09
Pertambangan dan Penggalian	4,4	3,91	3,60	3,49	3,23
Industri Pengolahan	9,3	9,47	9,27	9,30	9,27
Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13



Pemerintah Kabupaten Klungkung
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019

Kategori PDRB	2015	2016	2017	2018	2019
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20
Konstruksi	8,4	9,11	9,39	9,54	9,79
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,74	7,80	8,01	8,15	8,21
Transportasi dan Pergudangan	3,08	2,96	2,98	2,94	3,05
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13,09	13,45	14,40	14,51	14,58
Informasi dan Komunikasi	8,5	8,45	8,49	8,51	8,49
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,93	4,00	3,91	3,77	3,87
Real Estate	2,5	2,41	2,39	2,34	2,33
Jasa Perusahaan	1	0,99	0,98	0,97	0,96
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,12	5,13	5,20	5,38	5,55
Jasa Pendidikan	2,28	2,36	2,41	2,44	2,50
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,14	4,23	4,28	4,31	4,39
Jasa Lainnya	2,17	2,19	2,25	2,29	2,37
Jumlah	100	100	100	100	100

*) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara

Sumber : Kabupaten Klungkung Dalam Angka 2020, Penyediaan Data Perencanaan Pembangunan

Berdasarkan tabel di atas, 3 besar lapangan usaha yang berkontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Klungkung dalam lima tahun terakhir adalah pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, penyediaan akomodasi dan makanan dan minuman serta konstruksi. Pada tahun 2019 tiga lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan (21,09 persen), penyediaan akomodasi dan makan minum (14,58 persen) dan konstruksi (9,79 persen). Untuk mengetahui laju pertumbuhan masing-masing lapangan usaha pendukung perekonomian Kabupaten Klungkung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.10.
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Klungkung
Tahun 2016-2019

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,88	0,63	3,75	2,05
Pertambangan dan Penggalian	-4,67	-1,32	-1,39	-1,02
Industri Pengolahan	7,37	3,86	5,12	5,46



Pemerintah Kabupaten Klungkung
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019

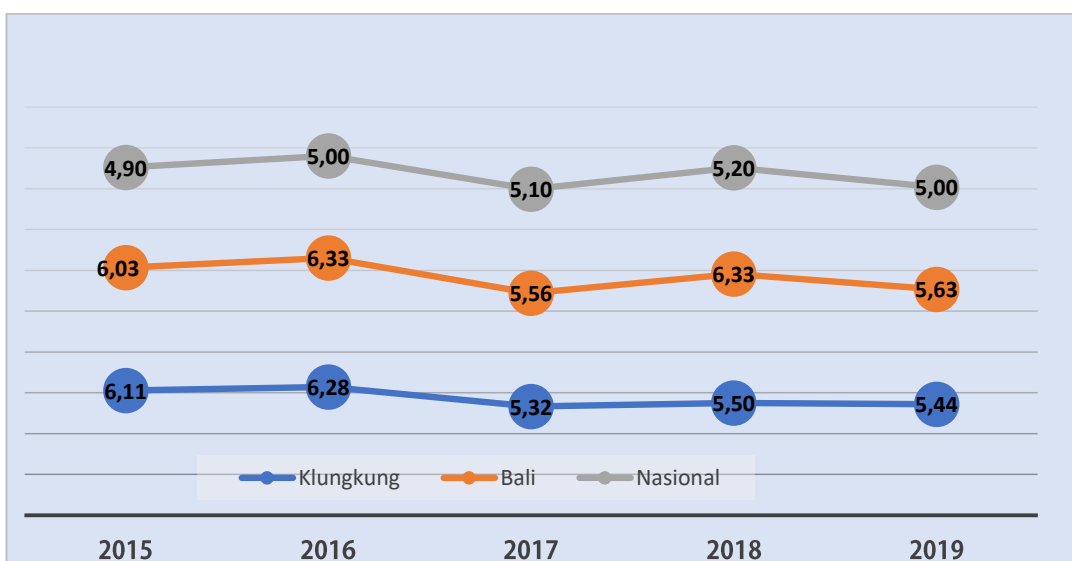
Pengadaan Listrik dan Gas	2,73	5,02	5,93	8,80
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,21	2,57	4,79	7,76
Konstruksi	14,96	9,69	6,14	7,16
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,09	7,89	7,46	7,02
Transportasi dan Pergudangan	4,34	8,16	4,38	9,68
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,26	12,90	7,10	5,17
Informasi dan Komunikasi	8,52	7,28	6,84	5,81
Jasa Keuangan dan Asuransi	9,26	2,27	1,67	8,69
Real Estate	4,66	5,97	5,38	4,21
Jasa Perusahaan	3,19	5,15	5,95	5,09
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6,62	-1,59	6,89	8,96
Jasa Pendidikan	8,28	7,99	7,61	6,48
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,45	7,99	7,26	6,76
Jasa Lainnya	7,43	8,13	8,35	9,07
PDRB	6,28	5,32	5,50	5,44

*) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara

Sumber : Kabupaten Klungkung Dalam Angka 2020, Penyediaan Data Perencanaan Pembangunan

Berdasarkan tabel di atas, maka dalam empat tahun terakhir rata-rata laju pertumbuhan PDRB di Kabupaten Klungkung mencapai 5,44 persen. Berdasarkan data tersebut lapangan usaha konstruksi, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, dan jasa keuangan dan asuransi merupakan lapangan usaha yang memiliki laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2016. Namun pada tahun 2019, lapangan usaha dengan laju pertumbuhan tertinggi adalah transportasi dan pergudangan, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan social, dan jasa lainnya.

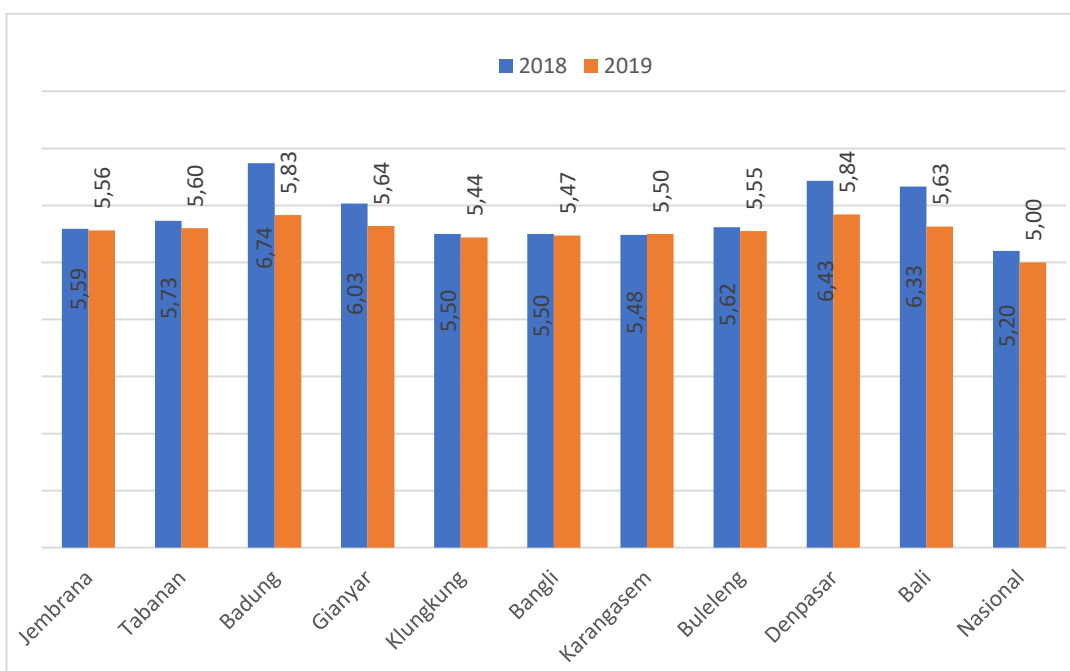
Untuk mendapatkan perbandingan kinerja yang telah dicapai, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klungkung perlu dibandingkan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Gambar dibawah menyajikan perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Klungkung dibandingkan dengan Provinsi Bali dan Nasional.



Sumber : Provinsi Bali Dalam Angka 2020, Penyediaan Data Perencanaan Pembangunan

Gambar 3.19 Laju Pertumbuhan PDRB di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dan Nasional, Tahun 2015-2017

Berdasarkan gambar di atas, maka terlihat Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Klungkung berada di bawah Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali yang sebesar 5,63 persen. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klungkung mengalami pelambatan seiring dengan pelambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali. Untuk memperoleh perbandingan regional antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, gambar di bawah ini menyajikan perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klungkung dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Bali sebagai berikut:



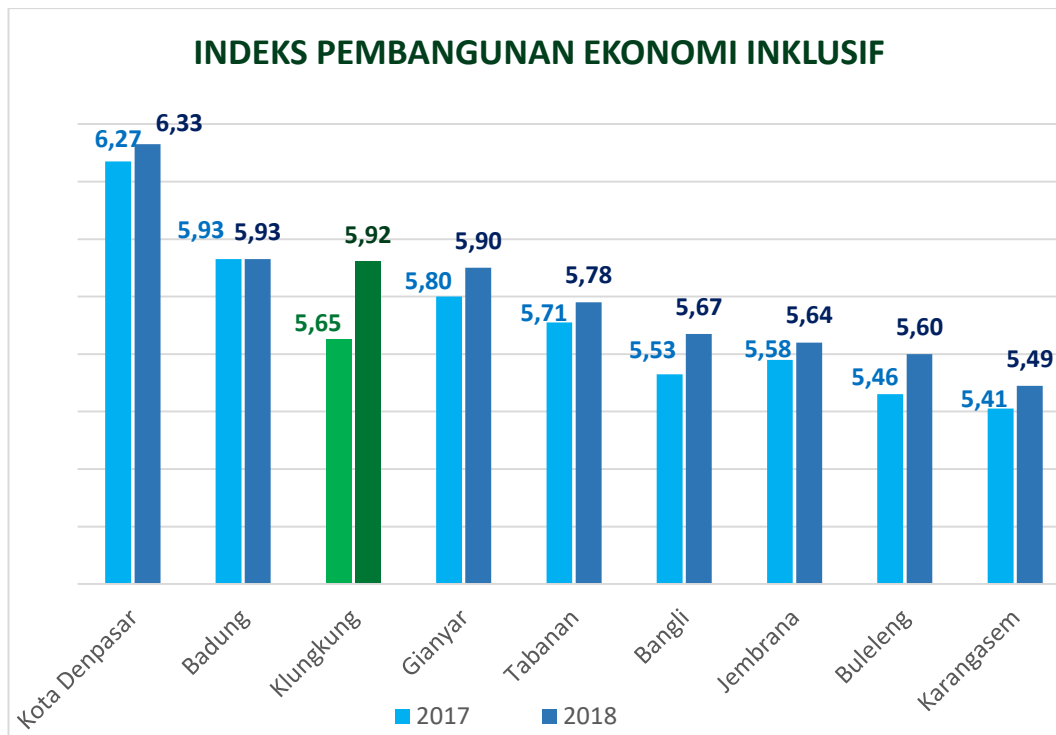
Sumber : Provinsi Bali Dalam Angka 2020, Penyediaan Data Perencanaan Pembangunan

Gambar 3.20 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (%), 2018-2019

Berdasarkan gambar di atas maka terlihat bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali mengalami pelambatan, tidak terkecuali Kabupaten Klungkung. Pada tahun 2019, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Klungkung berada di urutan ke 9 diantara 9 Kabupaten/Kota di Bali. Laju Pertumbuhan PDRB tertinggi dicapai oleh Kota Denpasar dengan pertumbuhan 5,84 persen di tahun 2019.

Selain Produk Domestik Regional Bruto, terdapat indikator pembangunan ekonomi lain yang dapat digunakan untuk merefleksikan capaian pembangunan ekonomi suatu daerah. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) merupakan instrumen yang telah dikembangkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Republik Indonesia untuk mengukur, memantau dan mengendalikan kualitas pembangunan ekonomi dari tahun ke tahun. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas merilis bahwa capaian Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) Bali menempati peringkat kedua terbaik nasional. Kabupaten Klungkung memperoleh Peringkat ketiga terbaik kabupaten/kota se-Bali. Kabupaten Klungkung menempati urutan ketiga dengan

nilai 5,92 pada Tahun 2018. Kota Denpasar pada urutan pertama dengan nilai 6,33, dan posisi kedua Kabupaten Badung dengan nilai 5,93 seperti terlihat pada gambar berikut :



Sumber : Bappenas, 2020

Gambar 3.21 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten/Kota se-Bali Tahun 2017-2018

Pada gambar diatas terlihat bahwa peningkatan Indeks Pembangunan Inklusif Kabupaten yang tertinggi dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya, dimana pada Tahun 2017 nilai 5.65 dan pada Tahun 2018 menjadi 5.92. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) terdiri dari tiga pilar utama, yaitu pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, dan perluasan akses dan kesempatan. Dari tabel berikut dapat terlihat bahwa Kabupaten Klungkung memperoleh peringkat 63 dari seluruh Kabupaten/kota se-Indonesia. Adapun capaian indeks masing-masing pilar adalah sebagai berikut :



Tabel 3.11.

Indikator Indeks Pembangunan Ekonomi Inkusif Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Indeks Inklusif	Indeks Pillar 1	Indeks Pillar 2	Indeks Pillar 3	Ranking
Kota Denpasar	6.33	5.98	7.18	6.23	11
Badung	5.93	5.35	6.74	6.42	57
Klungkung	5.92	5.11	7.03	6.70	61
Gianyar	5.91	5.22	6.79	6.58	63
Tabanan	5.78	5.10	6.70	6.42	91
Bangli	5.67	4.93	7.13	5.98	113
Jembrana	5.64	4.98	6.91	5.90	119
Buleleng	5.60	4.83	7.07	5.94	128
Karang Asem	5.49	4.64	6.97	6.03	157

Sumber : Bappenas, 2020

Dalam usaha mencapai sasaran Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Kabupaten Klungkung menemui kendala sebagai berikut:

1. Kemudahan berinvestasi belum sepenuhnya tercipta di Kabupaten Klungkung. Agenda reformasi birokrasi yang sedang berjalan belum dapat terlihat hasilnya dalam membantu meningkatkan iklim berinvestasi, sehingga hal ini merupakan suatu fokus utama yang harus dibenahi.
2. Infrastruktur publik yang mendukung perdagangan sedang dikembangkan dan telah sangat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun kedepannya perlu lebih ditingkatkan lagi demi menciptakan kondisi yang kondusif untuk terus meningkatkan omzet perdagangan di Kabupaten Klungkung.
3. Pemberdayaan koperasi belum dapat dimaksimalkan, beberapa koperasi yang baru dan sedang tumbuh terkendala terhadap proses legalitas kelembagaan yang tidak dapat diselesaikan di level kabupaten.
4. Sektor pariwisata yang sedang dikembangkan memerlukan berbagai dukungan dalam bentuk pendanaan, kualitas SDM, partisipasi masyarakat dan dunia usaha agar dapat benar-benar berkembang dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Untuk mencapai peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi sangat ditentukan



oleh pelaksanaan pembangunan di segala bidang di Kabupaten Klungkung, mengingat permasalahan ekonomi adalah permasalahan multi sektor. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai standar pelayanan publik di bidang perizinan, perdagangan, dan layanan publik lainnya.

Stigma masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang rumit dan berbelit-belit, waktu yang lama, biaya yang tidak pasti, tidak transparan serta sistem yang konvensional menyebabkan masyarakat masih enggan untuk mengurus perizinan. Oleh karena itu, dengan spirit GEMA SANTI (Gerakan Masyarakat Santun dan Inovatif) Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya melaksanakan perbaikan pelayanan perizinan melalui program GEMA SARI (Gerakan Masyarakat Sadar Izin dan Investasi). Langkah-langkah yang telah diambil adalah :

- a. Melaksanakan sosialisasi perizinan kepada masyarakat sebagai langkah awal untuk membuka wawasan dan merubah pola pikir masyarakat terhadap perizinan yang rumit dan berbelit-belit.
- b. Mempermudah akses informasi perizinan melalui website Klungkung dan penyampaian formulir pendaftaran di tiap kecamatan dan desa sehingga lebih terbuka dan lebih dekat dengan masyarakat.
- c. Merevisi SOP Pelayanan Perizinan agar sesuai dengan kondisi yang berkembang saat ini, lebih cepat, tepat dan terarah.

Dilaksanakannya program GEMA SARI telah memberi dampak positif terhadap pelayanan perizinan di Kabupaten Klungkung, yaitu : lebih terbukanya akses informasi pelayanan perizinan, meningkatnya antusiasme masyarakat dalam mengurus izin yang menandakan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, meningkatnya jumlah penerbitan izin yang berimbas pada meningkatnya PAD, meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan, dan permasalahan-permasalahan yang ditemui di lapangan dapat diantisipasi lebih dini. Penerapan program GEMA SARI dengan model pelayanan langsung melalui sosialisasi, sebar berkas, jemput berkas dan antar izin untuk usaha akomodasi baru yang mengurus izin tanpa calo semakin



intensif dilaksanakan. Selain dengan metode yang telah dilaksanakan juga ditambah dengan pendekatan pelayanan melalui teknologi yaitu melalui website siCANTIK dengan alamat klungkungkab.sicantik.layanan.go.id. Nantinya diharapkan web ini dapat dikembangkan sehingga masyarakat dapat bertransaksi secara online.

2. Perbaiki infrastruktur publik terutama yang mendukung akses perdagangan dan pariwisata seperti pasar umum, pasar komoditi, dan pasar desa serta jalan dan penataan obyek-obyek pariwisata baru.
3. Memfasilitasi koperasi-koperasi dan lembaga keuangan mikro dengan bantuan keuangan dan penataan manajemen keuangannya.
4. Meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah dan mencegah kebocoran penerimaan pendapatan daerah dengan menerapkan teknologi informasi dalam pengelolaan data serta pencarian sumber-sumber PAD.
5. Menggali dan meningkatkan produk-produk UKM lokal seperti peningkatan kualitas dan pemasaran garam lokal Klungkung, peningkatan kualitas dan pemasaran kain tradisional Klungkung serta produk-produk unggulan lainnya.
6. Promosi pariwisata yang dilaksanakan dengan berbagai penyelenggaraan event pariwisata seperti Festival Nusa Penida, Festival Semarapura, Festival Layang – Layang tradisional, Klungkung Internasional Surfing Festival, pelaksanaan *City Tour* dengan kegiatan yang dilaksanakan berupa wisata sejarah dengan konsep mini touring yaitu dimulai dari Monumen Puputan Klungkung dilanjutkan ke Puri Agung Klungkung ada atraksi Kesenian Barong Somi dan Atraksi Menenun kemudian lanjut ke Museum Semarajaya, Pemedal Agung, Balai kambang, Kertha Gosa ada atraksi melukis Kamasan lanjut ke Pasar Tradisional Klungkung. Pelaksanaan *City Tour* juga di Integrasikan dengan pengembangan Desa Wisata

Dalam melaksanakan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten senantiasa dituntut untuk melaksanakan pelayanan dengan efektif dan efisien. Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Analisis efisiensi difokuskan pada indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur dari kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/atau lebih besar, atau persentase capaian output sama tinggi daripada persentase capaian input.



Pemerintah Kabupaten Klungkung
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019

Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi sebagai berikut:

Tabel 3.12
Tingkat Efisiensi
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
Tahun 2019

Indikator Kinerja	Target Capaian Sasaran (%)	Target Capaian Keuangan (%)	Standar Efisiensi	Realisasi Capaian Sasaran (%)	Realisasi Capaian Keuangan (%)	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Laju Pertumbuhan PDRB (%)	100	100	1,00	90,67	91,37	0,99	-0,01	Tidak Efisien
Jumlah	100	100	1,00	90,67	91,37	0,99	-0,01	Tidak Efisien

Sumber : data diolah

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2019, tingkat efisiensi sasaran Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar -0,01 dimana indeks efisiensi lebih rendah dari standar efisiensi. Pada tahun 2019 sasaran Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dicapai dengan tidak efisien. Sasaran Menurunkan Angka Kemiskinan didukung dengan program pendukung sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.13.
Efisiensi Anggaran
Sasaran Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
Tahun 2019

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Program Pengaduan, Kebijakan dan Pelaoran Layanan	131.580.082	126.825.347	4.754.735,00	96,39	Dinas Penanaman Modal
Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	249.400.902	222.827.782	26.573.120,00	89,35	Dinas Penanaman Modal
Program Promosi Penanaman Modal	587.428.100	568.007.088	19.421.012,00	96,69	Dinas Penanaman Modal
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal	99.022.500	91.254.032	7.768.468,00	92,15	Dinas Penanaman Modal



Pemerintah Kabupaten Klungkung
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2019

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)	Ket
Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A	243.857.456	229.373.650	14.483.806,00	94,06	Dinas Penanaman Modal
Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B	121.287.698	119.439.917	1.847.781,00	98,48	Dinas Penanaman Modal
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah	465.035.450	392.226.506	72.808.944,00	84,34	Dinas Koperasi
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	600.454.000	582.024.653	18.429.347,00	96,93	Dinas Koperasi
Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi	640.834.500	472.677.879	168.156.621,00	73,76	Dinas Koperasi
Program Pembinaan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	14.651.847.078	13.853.998.882	797.848.196,45	94,55	Dinas Koperasi
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	332.499.852	285.403.060	47.096.792,00	85,84	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	4.399.369.468	3.918.340.612	481.028.856,00	89,07	Dinas Pariwisata
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1.992.408.827	1.602.098.370	390.310.457,00	80,41	Dinas Pariwisata
Program Pengembangan Kemitraan	650.217.852	527.873.236	122.344.616,00	81,18	Dinas Pariwisata
Program Sumber Daya Pariwisata	931.916.925	765.906.543	166.010.382,00	82,19	Dinas Pariwisata
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	791.656.146	768.885.832	22.770.314,12	97,12	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	1.727.801.466	1.532.694.408	195.107.057,98	88,71	Dinas Pertanian
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	622.683.346	582.951.402	39.731.944,12	93,62	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Produksi Peternakan	999.276.091	945.477.090	53.799.001,36	94,62	Dinas Pertanian



Pemerintah Kabupaten Klungkung
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)	Ket
Program Pengendalian Pembangunan Pertanian	94.259.500	80.193.100	14.066.400,00	85,08	Dinas Pertanian
Program Penjaminan Mutu Pangan Bahan Asal Hewan Yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	48.239.000	43.141.000	5.098.000,00	89,43	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Kelembagaan Petani dan Penyuluh Pertanian	664.273.916	640.011.044	24.262.872,16	96,35	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	494.535.360	404.421.145	90.114.215,00	81,78	Dinas Ketahanan Pangan
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	635.797.500	556.613.590	79.183.910,00	87,55	Dinas Ketahanan Pangan
Program Pengembangan Perikanan Tangkap dan Budidaya	1.954.272.292	1.870.657.644	83.614.648,00	95,72	Dinas Ketahanan Pangan
Jumlah	34.129.955.308	31.183.323.812	2.946.631.496,19	91,37	

Sumber : SIMda Keuangan, 14 Maret 2020 (sebelum audit BPK)

Pada tahun 2019, Sasaran Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi didukung dengan 25 program pendukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 34.129.955.308,00 dan terealisasi sebesar Rp. 31.183.323.812,00 dan sisa anggaran sebesar Rp. 2.946.631.496,19,00 atau terealisasi sebesar 91,37 persen. Sasaran ini didukung oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Klungkung, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Klungkung.



DOKUMENTASI PENCAPAIAN SASARAN



Festival Nusa Penida 2017



Festival Semarapura 2017





Sasaran 5

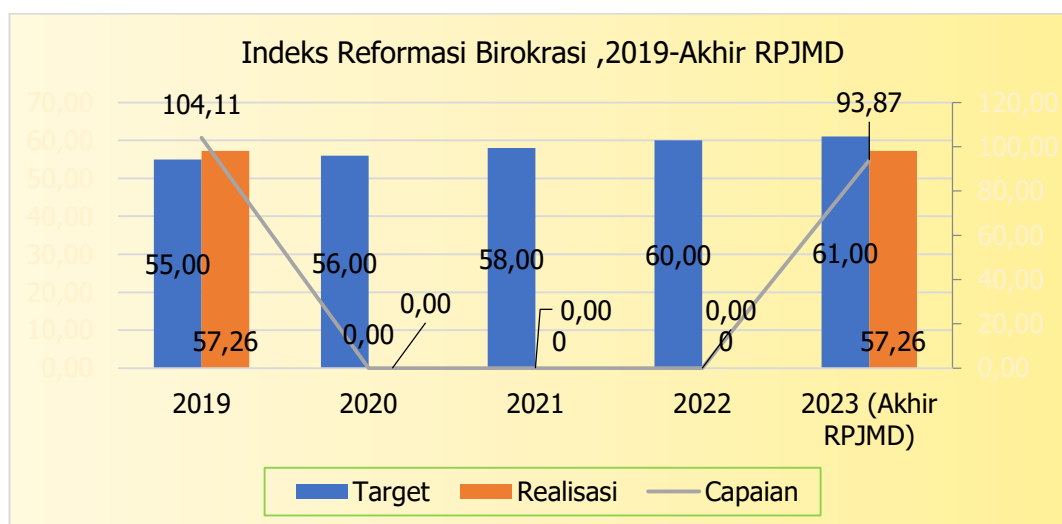
Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Responsif, Transparan, Santun dan Inovatif

Suatu pemerintahan atau pemerintahan yang Transparan (terbuka), yaitu suatu system pemerintahan yang di dalam penyelenggaraan pemerintahannya terdapat kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan sehingga mudah diakses oleh mereka yang membutuhkan. Berbagai informasi telah disediakan secara memadai dan mudah dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi. Pemerintahan yang tidak transparan, cepat atau lambat cenderung akan menuju pemerintahan yang korup, otoriter, atau diktatur. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah dituntut bersikap terbuka terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuatnya termasuk anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Sehingga mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi terhadap kebijakan tersebut pemerintah dituntut bersikap terbuka dalam rangka "akuntabilitas publik". Realitasnya, kebijakan yang dibuat pemerintah dalam pelaksanaannya kurang transparan, sehingga berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap setiap kebijakan yang dibuat pemerintah.

Terselenggaranya sistem pemerintahan yang akuntabel dan transparan merupakan salah satu kunci perwujudan *good governance*. Di dalam sistem dimaksud tercakup beberapa prasyarat yang harus dipenuhi tatkala transparansi dan akuntabilitas menjadi barometer. Di antara prasyarat itu adalah jaminan bahwa segala peristiwa penting kegiatan pemerintah (kegiatan badan publik) terekam dengan baik dengan ukuran-ukuran yang jelas dan dapat diikhtisarkan melalui proses informasi dimana kita bisa melihat segala yang terjadi dan terdapat di dalam ruang entitas itu, yakni entitas pemerintah. Dengan adanya transparansi pemerintahan yang ditunjang dengan payung hukumnya yang jelas maka akan menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, maka akan menjamin meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya dan akan dapat meminimalisir berkurangnya pelanggaran/penyimpangan dalam pengelolaan pemerintahan.

Perubahan adalah sesuatu yang tidak terhindarkan dan pasti akan terjadi terhadap setiap bentuk kehidupan, tidak terkecuali organisasi pemerintah/birokrasi. Perubahan birokrasi yang diharapkan melalui reformasi birokrasi di Kabupaten Klungkung adalah birokrasi yang berkinerja tinggi, yang diwujudkan melalui kemampuan dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas kepada masyarakat. Selain itu, reformasi birokrasi juga diharapkan mampu mengurangi bahkan meniadakan praktek-praktek KKN di seluruh Organisasi Perangkat Daerah serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Pemerintah Kabupaten Klungkung. Oleh karena itu, reformasi birokrasi dapat dimaknai sebagai sebuah perubahan signifikan dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan. Untuk mengukur capaian sasaran Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Responsif, Transparan, Santun dan Inovatif, Pemerintah Kabupaten Klungkung menggunakan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut.

Untuk mengetahui capaian kinerja Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Responsif, Transparan, Santun dan Inovatif yang diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Sumber : LHE Reformasi Birokrasi, 2019

Gambar 3.22 Indeks Reformasi Birokrasi Kab. Klungkung, 2019-2023 dan Capaian Akhir RPJMD.



Indeks Reformasi Birokrasi merupakan indeks yang dihasilkan dari penilaian terhadap 8 komponen penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu : Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Indeks Reformasi Birokrasi dihasilkan dari serangkaian penilaian yang dilakukan langsung oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Capaian indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2019 mencapai 104,11 persen, dimana target indeks reformasi birokrasi sebesar 55 point dan terealisasi sebesar 57,26 point. Tahun 2018 merupakan tahun pertama Kabupaten Klungkung mengevaluasi capaian pelaksanaan reformasi birokrasi yang hasil penilaiannya diterima pada tahun 2019. Untuk melihat komponen penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 3.14.
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Klungkung, 2018

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2018
I	Komponen Pengungkit		
1	Manajemen Perubahan	5,00	1,18
2	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	5,00	1,15
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	1,91
4	Penataan Tatalaksana	5,00	1,60
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	10,91
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	3,50
7	Penguatan Pengawasan	12,00	3,93
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	1,74
	Total Komponen Pengungkit (A)	60,00	25,90
II	Komponen Hasil		
1	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20,00	14,06
2	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,95



Pemerintah Kabupaten Klungkung
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019

3	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,35
Total Komponen Hasil (B)		40,00	31,36
Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)		100,00	57,26

Sumber : LHE Reformasi Birokrasi, 2019

Pada hasil evaluasi reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Klungkung, komponen pengungkit telah tercapai sebanyak 25,90 point dari 60 point maksimal, sementara komponen hasil telah tercapai sebanyak 31,36 point dari 40 point maksimal. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Klungkung, dilakukan pula survey terhadap persepsi para pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung terhadap kualitas penerapan system integritas yang berlaku secara internal. Hasil survey integritas organisasi menunjukkan indeks 3,22 dalam skala 0-4 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.15.
Hasil Survey Integritas Organisasi, 2018

No	Komponen	Indeks 2018
1	Budaya Organisasi dan Sistem Anti Korupsi	3,02
2	Integritas terkait pengelolaan SDM	3,37
3	Integritas terkait pengelolaan anggaran	3,37
4	Integritas kesesuaian perintah atasan dengan aturan dan norma	3,10
Indeks Integritas Organisasi		3,22

Sumber : LHE Reformasi Birokrasi Kab. Klungkung, 2019

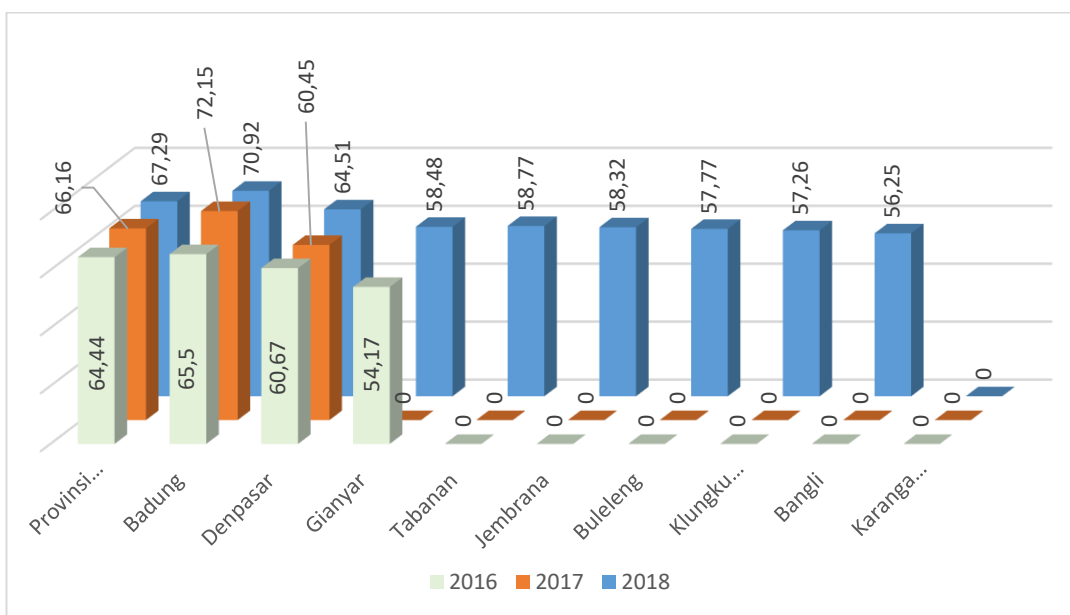
Dari hasil survey menunjukkan bahwa pemahaman terhadap reformasi birokrasi belum merata ke seluruh Pegawai Pemerintah Kabupaten Klungkung. Selain penilaian terhadap integritas organisasi, juga dilakukan survey eksternal terhadap masyarakat yang telah merasakan pelayanan Pemerintah Kabupaten Klungkung dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.16.
 Hasil Survey Eksternal Terhadap Masyarakat, 2018

No	Komponen	Nilai Survey	Rata-Rata Indeks Kab/Kota
1	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	3,34	3,29
2	Indeks Persepsi Anti Korupsi	3,40	3,39

Sumber : LHE Reformasi Birokrasi Kab. Klungkung, 2019

Hasil survey persepsi pelayanan menunjukkan indeks 3,34 dalam skala 4. Hasil tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata persepsi pelayanan kabupaten/kota yang sebesar 3,29. Sementara hasil survey persepsi anti korupsi yang merupakan gambaran atas integritas pemberi layanan menunjukkan indeks 3,40 dalam skala 4. Hasil survey tahun 2018 tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata persepsi anti korupsi kabupaten/kota yang sebesar 3,39.



Sumber : Biro Organisasi Provinsi Bali, 2020

Gambar 3.23 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dan Provinsi Bali, 2016-2018

Tahun 2018 merupakan tahun pertama Kabupaten Klungkung dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dimana Pemerintah Kabupaten/Kota lain di Provinsi Bali telah dilakukan evaluasi sejak tahun 2016. Dari hasil evaluasi, Pemerintah Kabupaten Klungkung menempati urutan ke 7 dari 8 Kabupaten/Kota



yang dilakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi terbaik di raih oleh Kabupaten Badung dengan indeks 70,92. Sementara indeks reformasi birokrasi terendah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Bangli. Untuk mewujudkan sasaran Terwujudnya Birokrasi yang professional, responsive, transparan, santun dan inovatif didukung oleh beberapa fokus utama antara lain:

Organisasi

Untuk menciptakan birokrasi yang berkinerja tinggi, pembentukan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran menjadi fokus utama yang harus diselesaikan. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Klungkung telah melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 70 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Perubahan Peraturan Bupati itu ditujukan untuk menyesuaikan struktur organisasi beberapa perangkat daerah karena adanya perubahan peraturan dari Pemerintah Pusat serta penyesuaian terhadap kinerja organisasi yang akan diwujudkan. Organisasi Perangkat Daerah yang dilakukan penyesuaian terhadap struktur organisasinya adalah:

Tabel 3.17.
Organisasi Perangkat Daerah Yang Mengalami Perubahan dan Tujuan
Perubahannya

No	OPD	Tujuan / Alasan
1	Sekretariat Daerah	Penyesuaian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
2	Inspektorat Daerah	Penyesuaian Tugas dan Fungsi di Sekretariat
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyesuaian Tugas dan Fungsi Yang Tumpang Tindih

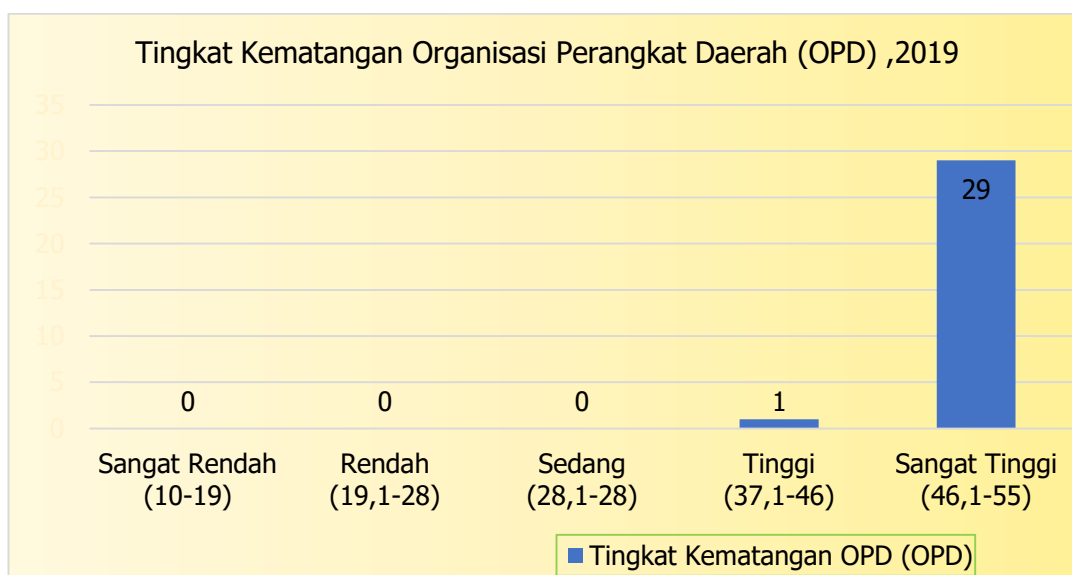


Pemerintah Kabupaten Klungkung
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019

No	OPD	Tujuan / Alasan
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	Penyesuaian Nomenklatur dan Tugas dan Fungsi
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Penyesuaian Tugas dan Fungsi Yang Tumpang Tindih
6	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Penyesuaian Tugas dan Fungsi menyesuaikan kinerja yang akan diwujudkan
7	Dinas Perhubungan	Penyesuaian Tugas dan Fungsi menyesuaikan kinerja yang akan diwujudkan
8	Dinas Pariwisata	Penyesuaian Tugas dan Fungsi menyesuaikan kinerja yang akan diwujudkan
9	Dinas Pertanian	Penyesuaian Tugas dan Fungsi menyesuaikan kinerja yang akan diwujudkan
10	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penyesuaian Tugas dan Fungsi menyesuaikan kinerja yang akan diwujudkan
11	Badan pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Penyesuaian Tugas dan Fungsi menyesuaikan kinerja yang akan diwujudkan

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Klungkung, 2020

Selain melakukan perubahan terhadap struktur organisasi, Pemerintah Kabupaten Klungkung juga melakukan penilaian kematangan penataan perangkat daerah dengan hasil sebagai berikut:



Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Klungkung, 2019

Gambar 3.24 Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 2019

Dari penilaian terhadap tingkat kematangan Organisasi Perangkat Daerah, terdapat 1 perangkat daerah dengan tingkat kematangan Tinggi dan 29 perangkat daerah dengan tingkat kematangan Sangat Tinggi.

Tatalaksana

Penataan Tata Laksana ditujukan untuk menciptakan pemerintahan dengan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Beberapa perubahan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan Informasi Publik berbasis website
Penyediaan informasi publik berbasis website dilakukan dengan pengembangan website Pemerintah Kabupaten Klungkung, website Organisasi Perangkat Daerah, dan website seluruh desa di Kabupaten Klungkung. Penyediaan Informasi Publik berbasis website ditujukan untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat.
- b. Penerapan e-Surat
Sistem Informasi Persuratan di Kabupaten Klungkung telah diterapkan sejak tahun 2017. Sistem Informasi Persuratan mencakup system informasi surat



masuk, surat keluar dan disposisi surat yang dimanfaatkan oleh semua pejabat structural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung. E-Surat beroperasi di versi website dan versi android

c. Sistem Informasi Keuangan Elektronik

Sistem Informasi Keuangan berbasis elektronik menggunakan SIMDA Keuangan dan SIMDA Barang yang berbasis internet (online)

d. Administrasi Kepegawaian Elektronik

Sistem Informasi Kepegawaian Elektronik diterapkan untuk menyelesaikan administrasi kepegawaian seperti pengelolaan database kepegawaian, penyelesaian administrasi kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala yang menghasilkan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala secara elektronik.

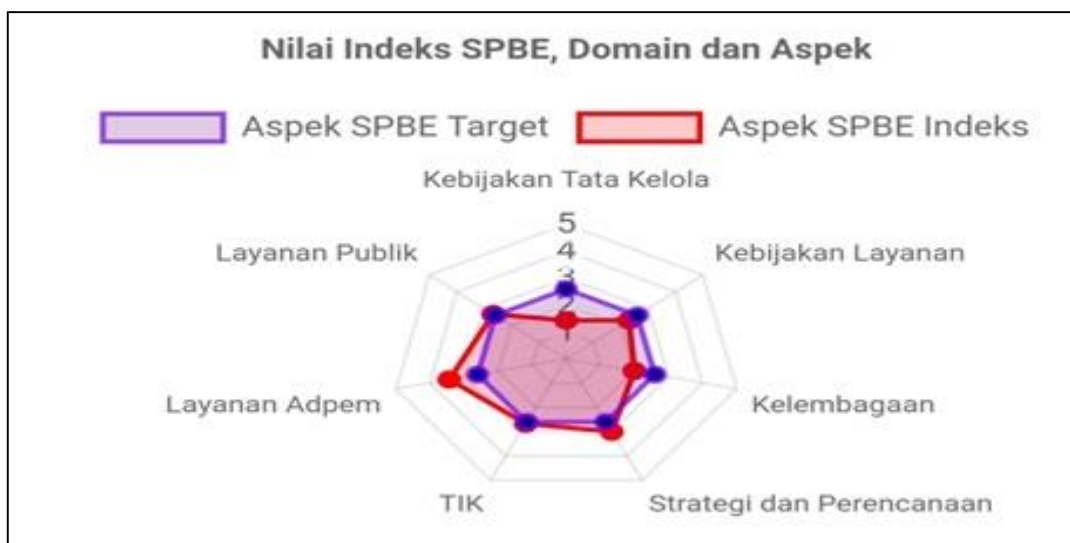
e. Pengembangan E-Procurement

Pengembangan system pengadaan secara elektronik dilakukan dengan memanfaatkan system informasi pengadaan barang/jasa yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP). Kabupaten Klungkung menjadi salah satu kabupaten yang merupakan pilot project Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Online (AMEL) yang dikembangkan LKPP.

f. Efisiensi Perjalanan Dinas

Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung, mulai tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Klungkung tidak lagi menganggarkan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Bali. Untuk meningkatkan efektivitas penggunaan Belanja Perjalanan Dinas, mulai tahun 2019 semua perjalanan dinas keluar daerah Provinsi Bali harus memperoleh persetujuan Bupati Klungkung.

Capaian reformasi birokrasi area tatalaksana dapat direfleksikan dari Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dirilis oleh Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia. Indeks SPBE Kabupaten Klungkung pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:



Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Klungkung, 2020

Gambar 3.25 Indeks SPBE Kabupaten Klungkung, 2019

Pelaksanaan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ditujukan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Klungkung, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, dan meningkatkan pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Klungkung. Secara rinci hasil penilaian terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Klungkung dibandingkan dengan rata-rata nilai SPBE Kabupaten seluruh Indonesia disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.18.
Rata-Rata Nilai SPBE Kabupaten se Indonesia dan Nilai SPBE Kabupaten Klungkung Tahun 2019

Indeks	Rata-Rata Nilai Kabupaten seluruh Indonesia	Nilai Kabupaten Klungkung (2019)
SPBE	1,77	2,1
Domain Kebijakan	1,53	1,29
Kebijakan Tata Kelola	1,43	1,14
Kebijakan Layanan	1,61	1,40
Domain Tata Kelola	1,5	1,43
Kelembagaan	1,39	1,00
Strategi dan Perencanaan	1,56	2,00



Indeks	Rata-Rata Nilai Kabupaten seluruh Indonesia	Nilai Kabupaten Klungkung (2019)
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,53	1,33
Domain Layanan SPBE	1,98	2,70
Administrasi Pemerintahan	2,15	3,29
Layanan Publik	1,66	1,67

Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Klungkung, 2020

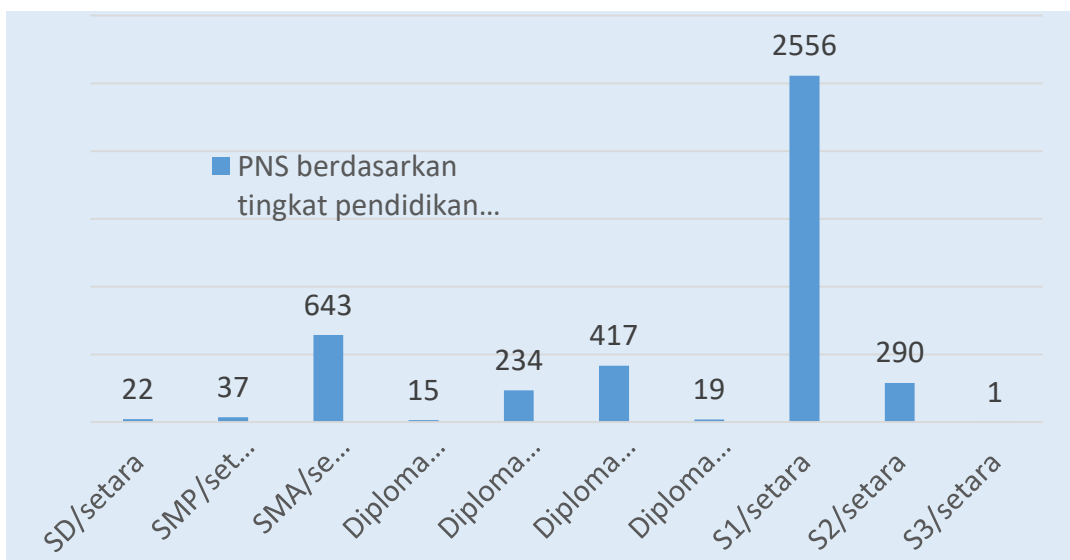
Secara umum nilai SPBE Kabupaten Klungkung berada di atas rata-rata nilai kabupaten seluruh Indonesia, dimana nilai SPBE Kabupaten Klungkung berada di angka 2,1 sementara rata-rata Kabupaten seluruh Indonesia adalah 1,77. Dari 3 domain, terdapat 2 domain yang berada dibawah rata-rata yaitu domain tata kelola dan domain kebijakan.

Peraturan Perundang-Undangan

Penataan Peraturan Perundang-Undangan ditujukan untuk menciptakan regulasi yang tidak tumpang tindih dan harmonis, serta mendorong pencapaian kinerja pemerintahan. Untuk mendukung fokus tersebut, Pemerintah Kabupaten Klungkung menerapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, melakukan identifikasi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis, serta melakukan penyesuaian-penyesuaian atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis.

Sumber Daya Manusia Aparatur

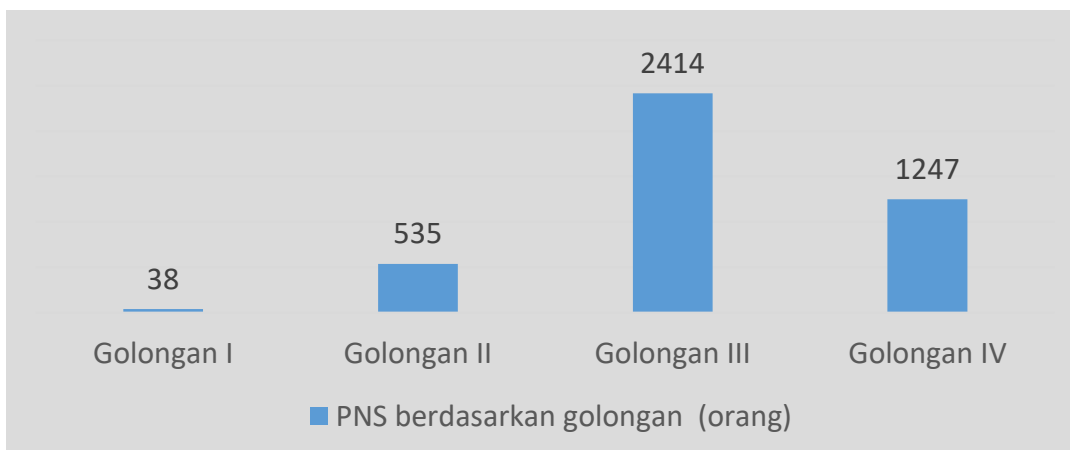
Penataan sumber daya manusia aparatur ditujukan untuk menciptakan sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, *capable*, professional, berkinerja tinggi dan sejahtera. Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur di Kabupaten Klungkung sebagai berikut:



Sumber : SIMPEG Online, 2020

Gambar 3.26 PNS Pemerintah Kab. Klungkung Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Per 31 Desember 2019

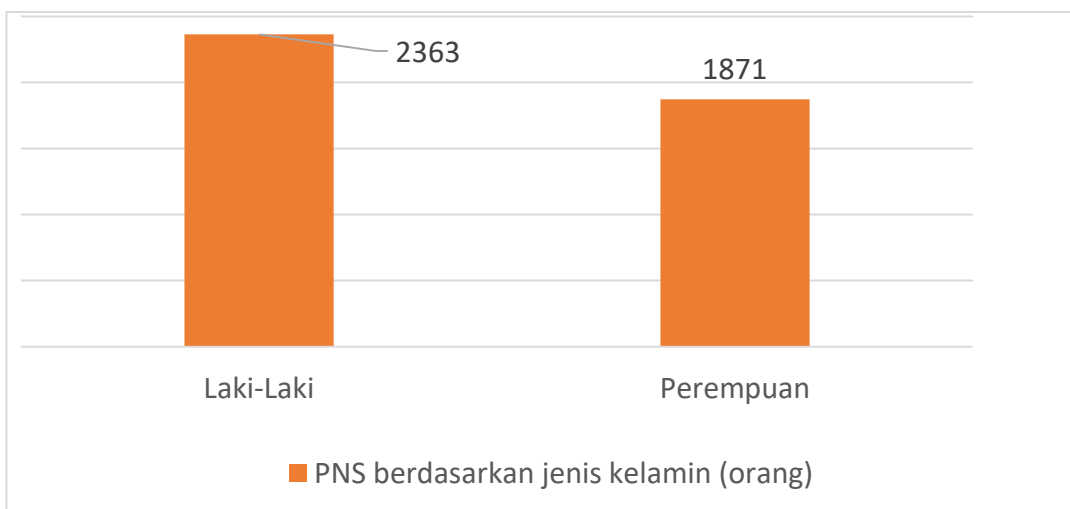
Pada periode 31 Desember 2019, Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung berjumlah 4.234 orang PNS dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar/setara sejumlah 22 orang, Sekolah Menengah Pertama/setara sejumlah 37 orang, Sekolah Menengah Atas/setara sejumlah 643 orang, Diploma 1/setara sejumlah 15 orang, Diploma 2/setara sejumlah 234 orang, Diploma 3/setara sejumlah 417 orang dan Diploma 4/setara sejumlah 19 orang. Sejumlah 2.556 orang PNS memiliki tingkat pendidikan S1/Strata 1/ setara yang merupakan jumlah terbanyak dari keseluruhan jumlah PNS. Sementara PNS dengan tingkat pendidikan Strata 2/setara berjumlah 290 orang, dan tingkat pendidikan Strata 3/setara dengan jumlah 1 orang. Berdasarkan golongan, PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung disajikan sebagai berikut:



Sumber : SIMPEG Online, 2020

Gambar 3.27 PNS Pemerintah Kab. Klungkung Berdasarkan Golongan, Per 31 Desember 2019

Berdasarkan golongan, PNS di Pemerintah Kabupaten Klungkung dibagi menjadi 4 kelompok, dimana terdapat 38 orang dengan golongan I, 535 orang dengan golongan II, 2.414 orang dengan golongan III, dan 1.247 orang dengan golongan 4. Berdasarkan jenis kelamin, PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung disajikan sebagai berikut:



Sumber : SIMPEG Online, 2020

Gambar 3.28 PNS Pemerintah Kab. Klungkung Berdasarkan Jenis Kelamin, Per 31 Desember 2019

Berdasarkan jenis kelamin, PNS di Kabupaten Klungkung pada 31 Desember 2019



masih di dominasi oleh Laki-Laki dengan jumlah 2.363 orang dan perempuan dengan jumlah 1.871 orang.

Untuk mewujudkan fokus di bidang sumber daya manusia aparatur Pemerintah Kabupaten Klungkung menerapkan hal-hal sebagai berikut:

a. Evaluasi Jabatan

Evaluasi Jabatan telah dilakukan didahului dengan penyusunan analisis jabatan dan pemetaan jabatan. Hasil evaluasi jabatan telah memperoleh validasi dari Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia serta telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Klungkung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung. Pada tahun 2020, Peraturan tersebut digantikan dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung. Sejak tahun 2019, Kelas dan Nilai Jabatan telah digunakan sebagai dasar pembayaran tambahan penghasilan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung.

b. Penerapan Minus Growth

Penerapan minus growth telah dilaksanakan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang melalui analisis kebutuhan sebelum proses recruitment.

c. Pembatasan dan/atau Pengurangan Belanja Pegawai

d. Monev Redistribusi/Realokasi PNS

e. Penerapan seleksi CPNS melalui Penggunaan *Computer Assisted Test* (CAT) untuk seleksi CPNS

f. Penguatan Assessment Center untuk Promosi Jabatan

g. Diklat Penjenjangan dan Diklat Fungsional

h. Penerapan Pengisian Lowongan Jabatan Secara Terbuka diterapkan untuk jabatan pimpinan tinggi.

i. Penetapan Standar Kompetensi Jabatan yang dimulai pada tahun 2020 dengan penetapan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 85/22/HK/2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung

j. Peningkatan Kemampuan PNS Berbasis Kompetensi

k. Penerapan Diklat PNS Berbasis Kompetensi



- l. Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negeri.
- m. Mutasi dan Rotasi Sesuai dengan Kompetensi Secara Periodik
- n. Pengukuran Kinerja Individu
Pengukuran kinerja individu dilakukan dengan format Sasaran Kerja Pegawai serta Laporan Kinerja Individu yang berisikan pelaporan capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan. Laporan Kinerja Individu dikelola dengan bantuan aplikasi e-Kinerja.
- o. Penguatan Jabatan Fungsional melalui: Penambahan jumlah, Penetapan Pola Karier, Peningkatan Kemampuan, dan Peningkatan Tunjangan. Sejak tahun 2019, pembayaran tambahan penghasilan menggunakan kelas dan nilai jabatan. Dengan system pembayaran ini, PNS dengan Jabatan Fungsional memperoleh penghasilan yang setara dengan jabatan structural dengan kelas yang sama.
- p. Sistem Reward dan Punishment
Mulai tahun 2019, Kabupaten Klungkung menerapkan system reward dan punishment yang berbasis capaian aktivitas harian. Pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Klungkung menerapkan system reward dan punishment yang berbasis pada capaian aktivitas harian, capaian rencana aksi perangkat daerah serta capaian disiplin pribadi PNS. Hal tersebut didasari dengan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pengawasan

Reformasi Birokrasi di area pengawasan ditujukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Untuk melaksanakan reformasi birokrasi di area pengawasan, Pemerintah Kabupaten Klungkung melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kabupaten Klungkung telah dilakukan penilaian dengan memperoleh tingkat maturitas SPIP Level 3 pada tahun 2019.



- b. Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan consulting telah dilaksanakan. Pada tahun 2019 telah dilakukan penilaian terhadap kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Kabupaten Klungkung dengan memperoleh tingkat Kapabilitas APIP level 2.
- c. Pelaporan Harta Kekayaan PNS
Pelaporan Harta Kekayaan PNS dilakukan secara online dengan aplikasi SIHARKA yang dikembangkan oleh Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia. Untuk memastikan semua PNS melakukan pelaporan harta kekayaannya, mulai tahun 2020, bagi PNS yang belum melaporkan harta kekayaan melalui SIHARKA, tidak dapat melaporkan aktivitasnya di aplikasi e kinerja. Hal tersebut akan berpengaruh pada perolehan Tambahan Penghasilan PNS yang bersangkutan.
- d. Whistle Blower System
Whistle Blower System telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 85 Tahun 2019 tentang Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi. Penerapan whiste blower system akan difasilitasi dengan system yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP).
- e. Pelaksanaan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi
Dalam rangka mendukung percepatan pemberantasan korupsi, Pemerintah Kabupaten Klungkung secara intensif melaksanakan rencana aksi pemberantasan korupsi melalui Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (KORSUPGAH) KPK yang diasistensi langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- f. Penanganan Benturan Kepentingan
Penanganan benturan kepentingan di laksanakan dengan Peraturan Bupati Klungkung dan dimonitor secara berkala.
- g. Pengendalian gratifikasi
Pengendalian gratifikasi dilaksanakan dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi dan dimonitor secara berkala.

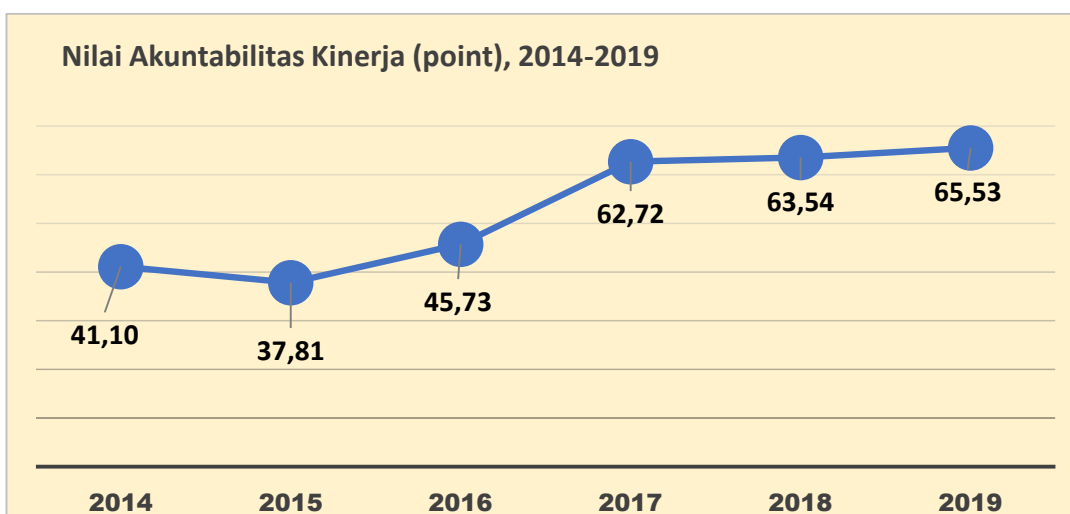


Akuntabilitas

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap (pimpinan) instansi Pemerintah. SAKIP bagi Instansi Pemerintah dapat diibaratkan seperti halnya RAPORT bagi siswa yang mampu menggambarkan tingkat kemampuan seorang siswa dalam menyerap pelajaran serta menilai prestasi belajarnya untuk menentukan apakah layak untuk naik kelas atau tidak naik kelas. Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi dan visi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan.

Pemerintah Kabupaten Klungkung selaku pengemban amanah masyarakat, melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klungkung yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Untuk tingkat kabupaten, fokus pelaporan kinerja adalah pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (*outcome*). Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapainya atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dibawah ini disajikan capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2019.



Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Klungkung, 2019

Gambar 3.29 Hasil Evaluasi AKIP Kab. Klungkung, 2014-2019

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator Kinerja Hasil Evaluasi AKIP di Kabupaten Klungkung pada tahun 2019 sebesar 65,53 point (B). Hasil Evaluasi AKIP pada tahun 2014 sebesar 41,10 point (C) dan mengalami peningkatan tajam di tahun 2017 menjadi 62,72 point (B). Jika dilihat dari trend hasil evaluasi AKIP Kabupaten Klungkung memiliki kecenderungan meningkat dari tahun 2014 hingga 2017 dan stagnansi dari tahun 2017-2019. Untuk itu diperlukan usaha-usaha untuk terus mempertahankan bahkan meningkatkan Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Klungkung. Jika dilihat dari hasil evaluasi penerapan akuntabilitas kinerja di Kabupaten Klungkung dapat diperoleh gambaran sebagai berikut:

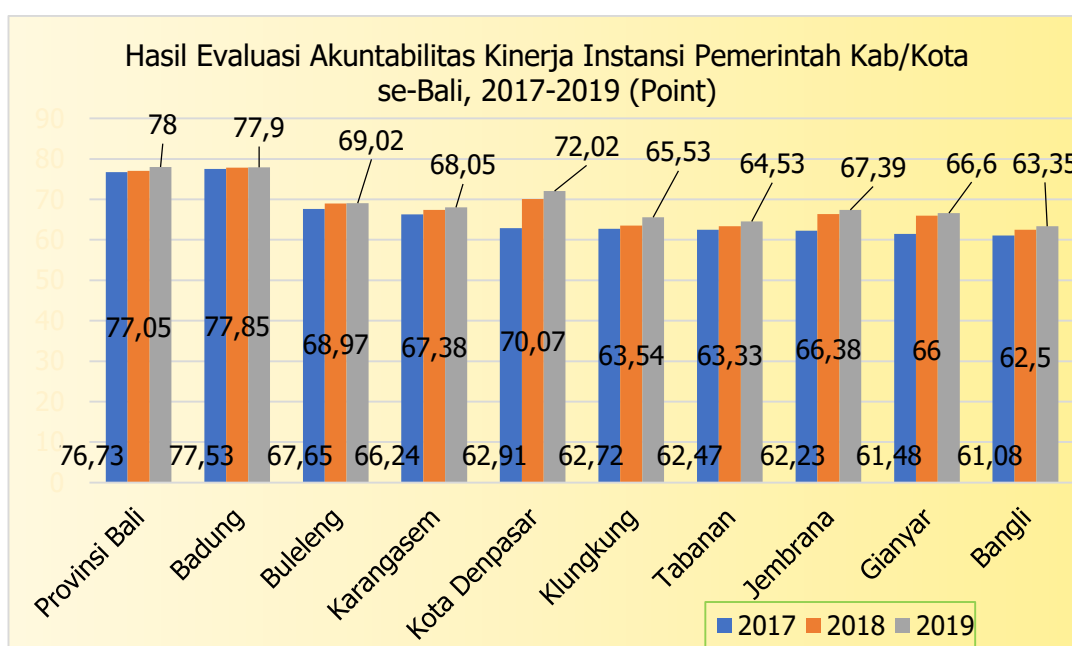
Tabel 3.19.
 Hasil Penilaian Masing-Masing Komponen Akuntabilitas Kab. Klungkung 2017-2018

No	Komponen	Bobot	Nilai	
			2017	2018
1	Perencanaan Kinerja	30,00	22,31	22,50
2	Pengukuran Kinerja	25,00	15,76	14,70
3	Pelaporan Kinerja	15,00	10,05	11,33
4	Evaluasi Internal	10,00	6,12	6,58
5	Capaian Kinerja	20,00	9,30	10,42
Nilai Hasil Evaluasi		100,00	63,54	65,53
KATEGORI			B	B

Sumber : LHE AKIP Kab. Klungkung, 2020

Dilihat dari hasil evaluasi terhadap penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2018 terdapat peningkatan dari tahun 2017. Pada tahun 2018 komponen pengukuran kinerja mengalami penurunan nilai, hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2018 adalah kali pertama evaluasi SAKIP diterapkan dengan melibatkan seluruh komponen manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung yang diwakili oleh 20 (dua puluh) Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sebagai bahan perbandingan, berikut ini disajikan perbandingan hasil evaluasi AKIP tingkat Kabupaten/Kota se-Bali untuk hasil evaluasi AKIP tahun 2019.



Sumber : Biro Organisasi Setda Prov Bali, 2020

Gambar 3.30 Nilai Evaluasi AKIP Kab/Kota se Bali (poin), 2017-2019

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa Kabupaten Klungkung memperoleh nilai evaluasi AKIP sebesar 65,53 poin pada tahun 2019, berada diatas Kabupaten Tabanan dan Bangli. Adapun usaha-usaha yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan nilai evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan tingkat Perangkat Daerah
 - a. Peningkatan kualitas perencanaan dilakukan dengan memperbaiki kualitas indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. Perbaikan kualitas indikator ini diarahkan



untuk memenuhi kriteria indikator kinerja yang SMART (*Spesifik, Measurable, Attainable, Reasonable dan Time Bound*). Perbaikan kualitas indikator juga diarahkan dengan meningkatkan kualitas indikator kinerja yang berorientasi hasil melalui penyusunan matrik kinerja/ *cascading* kinerja di semua perangkat daerah. Sasaran dan indikator kinerja dari level terbawah dirancang saling mendukung baik secara vertikal maupun horizontal. Secara horizontal dirancang untuk dapat mengaplikasikan sistem manajemen Ban Berjalan di dalam organisasi perangkat daerah. Setiap bagian / unit kerja akan saling mendukung dengan porsi yang sesuai untuk mendukung terwujudnya kinerja organisasi. Secara Vertikal, setiap kinerja bawahan secara Bersama sama dengan rekan setingkatnya akan mendukung kinerja atasannya.

b. Penyelarasan antar dokumen perencanaan

Hasil penyusunan matrik kinerja/cascading kinerja kemudian dituangkan dalam dokumen rencana strategis perangkat daerah. Indikator kinerja dalam rencana strategis harus tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan. Dalam penyelarasan itu juga dibuat penyeragaman, dimana Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah menjadi IKU Perangkat Daerah dan sekaligus menjadi Perjanjian Kinerja bagi Eselon II atau Kepala Perangkat Daerahnya. Setiap sasaran dan indicator kinerja program merupakan tanggungjawab eselon III dan langsung menjadi Perjanjian Kinerja bagi eselon III. Setiap sasaran dan indicator kinerja kegiatan merupakan tanggungjawab eselon IV dan langsung menjadi Perjanjian Kinerja bagi eselon IV.

c. Penyelarasan antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan.

Setiap indicator kinerja pada Rencana Kerja yang merupakan hasil dari penyusunan *cascading* kinerja harus menjadi indicator kinerja pada program dan kegiatan pada Dokumen Penganggaran dan karenanya menjadi suatu target yang harus dicapai dengan anggaran yang disediakan. Karena dokumen penganggaran dan perencanaan telah dibuat selaras, maka dokumen pelaporan otomatis melaporkan pencapaian target kinerja yang tertuang dalam dokumen penganggaran tersebut.

2. Meningkatkan Pemahaman Implementasi SAKIP di Perangkat Daerah

a. Peningkatan Pemahaman oleh Team SAKIP Bersama Tim Gerakan Disiplin Nasional Kab. Klungkung



Peningkatan pemahaman oleh Team SAKIP dilakukan di setiap koordinasi kegiatan perencanaan, penganggaran maupun pelaporan.

b. Peningkatan Pemahaman oleh Team Kementerian PAN dan RB

Peningkatan pemahaman oleh Team Kementerian PAN dan RB dilakukan pada suatu kegiatan asistensi desk Casscading Kinerja.

c. Peningkatan Pemahaman internal oleh Kepala Perangkat Daerah

Peningkatan pemahaman internal oleh Kepala Perangkat Daerah dilakukan pada setiap kegiatan koordinasi internal di lingkungan Perangkat Daerah.

3. Inventarisasi Dokumen-Dokumen SAKIP

Implementasi SAKIP di tataran perangkat daerah, pada dasarnya telah dilakukan setiap tahunnya, namun karena kurangnya pemahaman atas konsep SAKIP itu sendiri, pelaksanaan kegiatan yang sebenarnya adalah bagian dari SAKIP tidak dipahami sebagai suatu aktivitas manajemen SAKIP. Kegiatan pengendalian melalui rencana aksi, evaluasi atas renstra dan renja, evaluasi atas kinerja perangkat daerah mulai diinventarisasi dokumen pendukungnya dan digunakan sebagai kelengkapan dokumen SAKIP saat dilakukan evaluasi implementasi SAKIP.

4. Perbaiki kualitas pelaporan kinerja

Sebelumnya pelaporan kinerja tidak dilakukan berdasarkan konsep-konsep SAKIP, mulai tahun 2018, pelaporan kinerja diarahkan untuk memenuhi kriteria-kriteria dalam konsep SAKIP yang dikembangkan oleh Kementerian PAN dan RB.

5. Peningkatan Kualitas Evaluasi atas Implementasi SAKIP

Peningkatan kualitas evaluasi dilakukan dengan peningkatan kemampuan SDM evaluator serta koordinasi intensif antara evaluator dan Perangkat Daerah yang dievaluasi. Dengan terjalinnya koordinasi, evaluator bisa mendapatkan keyakinan yang memadai atas pelaksanaan SAKIP di perangkat daerah dan perangkat daerah dapat meningkatkan pengetahuannya mengenai konsep SAKIP.

6. Perencanaan Berbasis Elektronik

Proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Klungkung sepenuhnya dilakukan secara *online* melalui link sirenbangda.klungkungkab.go.id. Proses online tersebut dilakukan sejak penjaringan aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikiran DPRD, penyusunan rencana kerja dan penyusunan rencana kerja anggaran difasilitasi dengan SIMDA Keuangan yang telah terintegrasi dengan



system perencanaan pembangunan.

7. E-Performance

Proses pelaporan kinerja dilakukan secara online melalui link sirenbangda.klungkungkab.go.id untuk pelaporan kinerja perangkat daerah, penyusunan rencana aksi dalam rangka pencapaian kinerja perangkat daerah, pelaporan realisasi aksi pencapaian kinerja perangkat daerah, pelaporan kinerja bulanan dan pelaporan capaian rencana kerja triwulanan. Pelaporan Kinerja individu dikelola melalui e-sakip dan e-kinerja Kabupaten Klungkung. Mulai tahun 2020, capaian rencana aksi masing-masing perangkat daerah menjadi salah satu dasar pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN, selain aktivitas pribadi dan capaian disiplin pribadi yang berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Adapun permasalahan yang ditemui dalam mewujudkan kinerja penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan terhadap kebutuhan akan perencanaan kinerja yang berkualitas belum sepenuhnya dapat terpenuhi, hal tersebut disebabkan karena rendahnya pemahaman terhadap standar-standar kinerja yang seharusnya dicapai dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
2. Kelemahan pengelolaan data kinerja yang bersumber dari kurangnya pemahaman akan indikator kinerja, pemahaman pentingnya data kinerja beserta data dukungannya dan belum berubahnya *mind set* bekerja untuk mencapai kinerja dan bukan rutinitas semata.
3. Penerapan program aplikasi yang terintegrasi antara perencanaan sampai pelaporan belum dapat terwujud karena permasalahan teknis dalam *software* aplikasi.
4. Konsep SAKIP belum dipahami sebagai sebuah konsep manajemen yang membantu unit kerja dalam mempermudah pencapaian tujuan. Konsep SAKIP baru dijalankan sebagai sebuah syarat administrasi.
5. Kualitas evaluator tidak sama, sehingga dalam melakukan evaluasi terdapat perbedaan hasil antar evaluator karena belum adanya satu pihak yang melakukan Quality Assurance atas hasil evaluasi dari evaluator



6. Kurangnya komitmen Perangkat Daerah untuk menyajikan laporan kinerja secara komprehensif dan berbasis bukti dukung. Kemampuan menyajikan laporan kinerja berbeda-beda antar perangkat daerah, sehingga beberapa perangkat daerah hanya sekedar melaporkan kinerja seadanya, tanpa berusaha mengungkap lebih jauh mengenai usaha-usaha yang telah dilaksanakan, factor pendorong dan penghambat yang ditemui serta permasalahan dan solusi selama kurun waktu pencapaian kinerja.
7. Lemahnya pengendalian, sehingga kesulitan mengidentifikasi atau menginventarisasi permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran, atau bahkan tidak mengetahui standar yang seharusnya dicapai, sehingga terkesan TIDAK PUNYA MASALAH/TIDAK ADA MASALAH.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasarannya adalah laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah daerah. Instrumen utama dari akuntabilitas pengelolaan keuangan keuangan daerah adalah anggaran pemerintah daerah, data yang secara periodik dipublikasikan, laporan tahunan dan hasil investigasi dan laporan umum lainnya yang disiapkan oleh agent yang independen. Anggaran tahunan secara khusus mempunyai otoritas legal untuk pengeluaran dana publik, sehingga proses penganggaran secara keseluruhan menjadi relevan untuk manajemen fiskal dan untuk melaksanakan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pengendalian pada berbagai tingkat operasi. Atas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan setiap tahunnya melakukan pemeriksaan keuangan dan pemberian opini terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah tersebut. Pemberian opini merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan, disamping pemberian rekomendasi lainnya. Laporan keuangan yang disusun oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah merupakan media akuntabilitas keuangan yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya



auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Selain opini WTP ada pula opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan (biasa disingkat WTP-DPP). Opini WTP-DPP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya. Ada beberapa keadaan yang menyebabkan ditambahkannya paragraf penjelasan. Keadaan itu, misalnya, adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi, adanya keraguan tentang kelangsungan hidup lembaga pengelola keuangan. Selain itu, bisa juga karena auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau adanya penekanan atas suatu hal. Dan bisa juga karena laporan audit yang melibatkan auditor lain. Opini Wajar dengan pengecualian (biasa disingkat WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan *little adverse* (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Opini tidak wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan perusahaan/pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.



Tabel 3.20.
Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klungkung, 2014-2018

No	Tahun	Opini Atas Laporan Keuangan
1	2014	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2	2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3	2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4	2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5	2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber : BPKPD Kab. Klungkung, 2020

Pemerintah Kabupaten Klungkung telah meraih opini WTP selama 4 tahun berturut-turut. Pada tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Kabupaten Klungkung dituntut untuk terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangannya.

Dalam mewujudkan sasaran Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Klungkung mengalami kendala sebagai berikut:

1. Pengelolaan asset daerah belum berjalan dengan maksimal meskipun telah disediakan program aplikasi, namun pemahaman akan tata kelola asset yang masih rendah sangat berpengaruh terhadap banyaknya kasus salah saji asset pada laporan keuangan.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam kerangka pengelolaan pemerintahan belum maksimal, seringkali kegiatan-kegiatan rutin dan bersifat administratif lebih mendominasi aktivitas perangkat daerah dibandingkan kegiatan-kegiatan yang bersifat pelayanan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah masing-masing.
3. Lemahnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang ditandai dengan maturitas SPIP di level 2 akibat kurang tersosialisasinya manfaat dan tata cara penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung.

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang akuntabel, Pemerintah Kabupaten Klungkung melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan pemahaman tata kelola keuangan daerah dengan berbagai pelatihan yang ditujukan kepada pelaksana di tingkat perangkat daerah maupun di tingkat kabupaten.
2. Peningkatan pemahaman Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap pelaksana di Perangkat Daerah



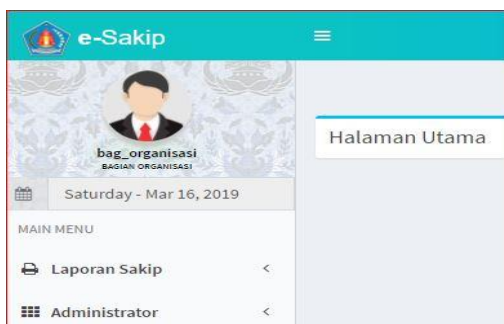
DOKUMENTASI PENCAPAIAN SASARAN



Penerimaan Hasil Evaluasi SAKIP 2018



Opini WTP untuk Laporan Keuangan 2017



Penerapan e-Sakip



Penerapan e-kinerja



Perencanaan terintegrasi dengan pelaporan



Klungkung Mesadu

Sistem Pengaduan Publik



Pelayanan Publik

Seiring dengan berbagai perkembangan yang terjadi di masyarakat, kebutuhan akan pelayanan publik juga otomatis meningkat baik jenis maupun kegiatannya. Setiap organisasi publik yang fungsinya menyelenggarakan pelayanan publik harus selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam mewujudkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan tatalaksana pelayanan publik dengan menerapkan standar-standar pelayanan publik, penyederhanaan standar operasional prosedur dan perbaikan sarana dan prasarana di tempat-tempat pelayanan publik.
2. Peningkatan kapasitas aparatur pelayanan publik dengan berbagai pelatihan teknis terkait.
3. Memberikan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Layanan Perijinan All Online
Pelayanan perijinan dilaksanakan satu pintu dengan bantuan OSS (online Submission System) yang telah terselenggara dari proses pengusulan hingga cetak dokumen perijinan.
 - b. Program aksi "KAWI SMARA".
Kawi Smara merupakan suatu program aksi dimana setiap pasangan yang menikah langsung memperoleh akta perkawinan sesaat setelah pernikahan dilangsungkan.
 - c. Program Aksi Caling Tanduk.
Kondisi wilayah Kabupaten Klungkung yang terdiri dari tiga pulau yang tersebar, menyulitkan masyarakat untuk mengakses pelayanan publik termasuk pelayanan administrasi kependudukan. Biaya untuk mendapatkan pelayanan publik menjadi mahal karena ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan masyarakat yaitu biaya transportasi. Caling Tanduk merupakan pelayanan jemput bola yang menghadirkan pelayanan langsung di tengah-tengah masyarakat. Pelayanan keliling mencetak dokumen kependudukan ini mewajibkan semua permohonan yang telah memenuhi syarat harus sudah selesai pada hari itu.



d. Program Aksi PREDATOR

Pemerintah Kabupaten Klungkung juga melakukan inovasi dengan melakukan perekaman data menggunakan sepeda motor atau biasa disebut "PREDATOR". Pelayanan ini membantu masyarakat yang tidak dapat datang ke pusat pelayanan dapat menikmati layanan kependudukan di tempat tinggalnya.

e. Program Aksi BELA NANDA

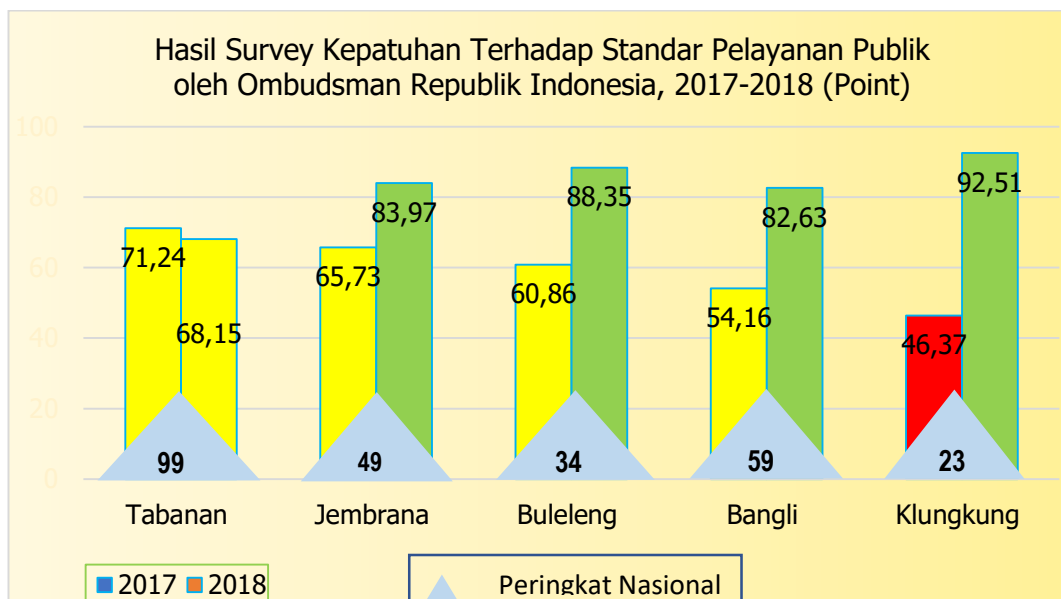
Bela Nanda (Begitu Anak Lahir Langsung Dapat Akta) merupakan program aksi yang memberikan kemudahan bagi pasangan yang melahirkan di rumah sakit dan puskesmas guna mencatatkan sekaligus mendapatkan kutipan Akta Kelahiran. Dengan persyaratan yang ringan dan proses pengurusannya dilakukan oleh pihak rumah sakit dan puskesmas. Hal ini didasarkan analisis dimana penduduk sering lalai mengurus akta kelahiran anaknya, sehingga saat dibutuhkan akta kelahiran belum dimiliki oleh penduduk.

Dalam usaha mewujudkan peningkatan kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Klungkung menemui kendala sebagai berikut:

1. Tatalaksana Pelayanan Publik di instansi-instansi pemberi layanan publik belum tertata secara sistematis dan berorientasi terhadap kepentingan konsumen. Kendala-kendala yang ditemui adalah : proses bisnis antar pemberi layanan publik belum terorganisir sehingga sangat memungkinkan adanya duplikasi aktivitas yang tidak diperlukan, ketidaknyamanan pengguna karena prosedur yang berbelit dan belum terintegrasinya pelayanan publik dalam satu tempat pelayanan. Selain kendala antar instansi, di dalam internal instansi juga ditemui berbagai kendala seperti : belum tersusunnya Standar Operasional Prosedur yang benar-benar memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna, minimnya pemanfaatan teknologi dalam memberikan pelayanan serta berbagai kendala sarana dan prasarana pelayanan.
2. Profesionalisme aparatur pemberi layanan publik belum memenuhi standar-standar pelayanan prima.
3. Regulasi pelayanan publik belum menciptakan iklim yang baik untuk berinvestasi

Untuk mengukur kinerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada

Masyarakat bisa digunakan perbandingan hasil survey Ombudsman Republik Indonesia terhadap kepatuhan terhadap pemenuhan standar pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia. Pada tahun 2018, di Provinsi Bali terdapat 5 Kabupaten yang menjadi sampel survey kepatuhan terhadap pelayanan publik yaitu : Kabupaten Bangli, Buleleng, Jembrana, Tabanan dan Klungkung. Adapun hasil survey masing-masing kabupaten adalah sebagai berikut:



Sumber : website Ombudsman Republik Indonesia, 2018

Gambar 3.31 Hasil Survey Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik (sample Kab/Kota se Bali), 2017

Keterangan :

- Zona Merah/Tingkat Kepatuhan Rendah : 0-55
- Zona Kuning/Tingkat Kepatuhan Sedang : 56-88
- Zona Hijau/Tingkat Kepatuhan Tinggi : 89-110

Hasil survey menunjukkan bila Pemerintah Kabupaten di Bali rata-rata masih belum melengkapi lima standar pelayanan. Diantaranya, pelayanan khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus, informasi dan prosedur pengaduan, informasi pelayanan publik elektronik atau nonelektronik (booklet, website, dan lain-lain), pejabat/petugas pengelola pengaduan, dan sarana pengukuran kepuasan pelanggan. Beberapa variabel dan indikator yang dijadikan sebagai dasar penilaian di antaranya, standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, sarana dan prasarana fasilitas, pelayanan khusus, pengelolaan pengaduan, visi misi dan motto pelayanan, atribut, dan pelayanan terpadu.



Pemerintah Kabupaten Klungkung sebelumnya berada di zona merah pada tahun 2018 masuk ke zona hijau dengan nilai tertinggi di Bali yakni 92,51 atau meraih peringkat 23 nasional. Tiga Pemerintah Kabupaten lain yakni Buleleng dengan nilai 88,35 (peringkat 34 nasional), Jembrana dengan nilai 83,97 (peringkat 49 nasional), dan Bangli dengan nilai 82,63 (peringkat 59 nasional) juga masuk ke zona hijau dari sebelumnya kuning. Hanya Pemerintah Kabupaten Tabanan yang masih belum bergerak dari zona kuning dari tahun sebelumnya dengan nilai 68,15 dan hanya meraih peringkat 99 nasional. Terdapat 2 OPD di Kabupaten Klungkung yang masih berada di bawah nilai rata-rata, yakni di Dinas Sosial untuk urusan perempuan dan bedah rumah, serta Badan Lingkungan Hidup yang masih ada kekurangan dalam hal perizinan lingkungan hidup.



DOKUMENTASI PENCAPAIAN SASARAN



(2018) BIMA JUARA dan TOSS masuk TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik



(2018) BIMA JUARA dan TOSS masuk TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik



Kepatuhan Sangat Tinggi terhadap Standar Pelayanan Peringkat Ke-23 Nasional Untuk Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik



Pola Pikir dan Budaya Kerja

Reformasi Pola Pikir dan Budaya Kerja dikelola dengan pemilihan agen perubahan sebagai personal yang secara intensif menyebarkan nilai-nilai budaya kerja di Kabupaten Klungkung di perangkat daerah masing-masing. Peran agen perubahan dimaksimalkan untuk percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Perangkat Daerah masing-masing.

Dalam melaksanakan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten senantiasa dituntut untuk melaksanakan pelayanan dengan efektif dan efisien. Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Analisis efisiensi difokuskan pada indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur dari kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/atau lebih besar, atau persentase capaian output sama tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Responsif, Transparan, Santun Dan Inovatif.

Tabel 3.21
 Tingkat Efisiensi
 Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Responsif, Transparan, Santun Dan
 Inovatif
 Tahun 2019

Indikator Kinerja	Target Capaian Sasaran (%)	Target Capaian Keuangan (%)	Standar Efisiensi	Realisasi Capaian Sasaran (%)	Realisasi Capaian Keuangan (%)	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Indek Reformasi Birokrasi	100	100	1,00	104,11	86,30	1,21	0,21	Efisien
Rata-Rata	100	100	1,00	104,11	86,30	1,21	0,21	Efisien

Sumber : data diolah

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2019, tingkat efisiensi sasaran Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Responsif, Transparan, Santun Dan Inovatif adalah sebesar 0,21 dimana indeks efisiensi lebih tinggi dari standar efisiensi. Pada tahun 2019 sasaran Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional,



Pemerintah Kabupaten Klungkung
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019

Responsif, Transparan, Santun Dan Inovatif dicapai dengan efisien. Sasaran Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Responsif, Transparan, Santun Dan Inovatif didukung dengan program pendukung sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.22.
Efisiensi Anggaran
Sasaran Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Responsif, Transparan, Santun Dan Inovatif
Tahun 2019

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Program Pengembangan Otonomi Daerah	794.593.767	442.117.125	352.476.642,00	55,64	Bagian Pemerintahan
Program Pengembangan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	2.910.569.418	2.851.136.800	59.432.618,00	97,96	Bagian Kesejahteraan Rakyat
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	12.391.807.784	10.044.840.183	2.346.967.601,37	81,06	Bagian Umum
Program Penyediaan Data/Informasi Perkembangan Ekonomi Daerah	624.035.414	509.189.549	114.845.865,00	81,60	Bagian Perekonomian
Program Penataan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	942.368.655	786.904.855	155.463.800,00	83,50	Bagian APBJ
Program Peningkatan Efektivitas Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah	344.515.100	215.927.075	128.588.025,00	62,68	Bagian Organisasi
Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	110.489.000	50.097.500	60.391.500,00	45,34	Bagian Organisasi
Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	542.739.125	435.726.217	107.012.908,00	80,28	Bagian Organisasi
Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD	947.895.608	493.235.288	454.660.320,00	52,03	DPRD
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	27.171.052.500	24.413.977.756	2.757.074.744,00	89,85	DPRD
Program Pelayanan Kedinasan Pimpinan dan Anggota DPRD	993.561.672	863.486.932	130.074.740,00	86,91	DPRD
Program Peningkatan Kinerja DPRD	2.404.745.020	1.007.121.195	1.397.623.825,00	41,88	DPRD



Pemerintah Kabupaten Klungkung
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)	Ket
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	273.991.950	273.464.950	527.000,00	99,81	Kec. Klungkung
Program Peningkatan Layanan Publik di Kecamatan	49.094.500	46.238.500	2.856.000,00	94,18	Kec. Klungkung
Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	243.601.500	235.227.000	8.374.500,00	96,56	Kec. Klungkung
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan Semarapura Kaja	670.961.558	662.876.490	8.085.068,00	98,80	Kel. Semarapura Kaja
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan semarapura Kangin	676.282.260	610.658.634	65.623.626,00	90,30	Kel. Semarapura Kangin
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan Semarapura Kauh	704.520.493	645.818.213	58.702.280,00	91,67	Kel. Semarapura Kauh
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan Semarapura Tengah	904.926.540	829.681.560	75.244.980,00	91,68	Kel. Semarapura Tengah
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan Semarapura Klod	739.088.292	724.122.692	14.965.600,00	97,98	Kel. Semarapura Klod
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan Semarapura Klod Kangin	734.322.552	713.677.329	20.645.223,00	97,19	Kel. Semarapura Klod Kangin
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	520.463.500	518.685.000	1.778.500,00	99,66	Kec. Banjarangkan
Program Peningkatan Layanan Publik di Kecamatan	25.396.000	18.196.000	7.200.000,00	71,65	Kec. Banjarangkan
Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	158.588.500	146.714.900	11.873.600,00	92,51	Kec. Banjarangkan
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	626.060.500	614.226.000	11.834.500,00	98,11	Kec. Nusa Penida



Pemerintah Kabupaten Klungkung
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)	Ket
Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	188.880.600	186.980.600	1.900.000,00	98,99	Kec. Nusa Penida
Program Peningkatan Layanan Publik di Kecamatan	41.358.708	40.733.000	625.708,00	98,49	Kec. Nusa Penida
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	1.454.878.107	1.446.830.724	8.047.383,00	99,45	Kec. Dawan
Program Peningkatan Layanan Publik di Kecamatan	33.566.000	27.209.500	6.356.500,00	81,06	Kec. Dawan
Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	186.193.000	172.808.000	13.385.000,00	92,81	Kec. Dawan
Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa	1.532.306.532	1.443.298.412	89.008.120,00	94,19	Inspektorat
Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	159.663.632	149.900.112	9.763.520,00	93,88	Inspektorat
Program Peningkatan Pelembagaan Pemerintah yang Bersih	311.304.932	260.267.532	51.037.400,00	83,61	Inspektorat
Program Perencanaan Sosial dan Budaya	245.836.300	181.839.671	63.996.629,00	73,97	Bapperlitbang
Program Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Penataan Ruang dan Infrastruktur	418.045.652	304.827.048	113.218.604,00	72,92	Bapperlitbang
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.005.244.270	917.290.176	87.954.094,00	91,25	Bapperlitbang
Program Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	540.045.000	507.817.490	32.227.510,00	94,03	Badan pengelolaan Keuangan
Program Peningkatan Kapasitas Perbendaharaan Daerah	355.365.000	301.117.014	54.247.986,00	84,73	Badan pengelolaan Keuangan



Pemerintah Kabupaten Klungkung
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)	Ket
Program Pendataan, Penataan dan Pengolahan Data pendapatan Daerah	1.018.217.900	893.182.060	125.035.840,00	87,72	Badan pengelolaan Keuangan
Program Penagihan, Keberatan, Penelitian dan Pelaporan Pendapatan Daerah	952.403.652	936.762.552	15.641.100,00	98,36	Badan pengelolaan Keuangan
Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	691.299.632	604.890.134	86.409.498,00	87,50	Badan pengelolaan Keuangan
Program Penyusunan Pertanggungjawaban APBD	597.685.000	498.529.502	99.155.498,00	83,41	Badan pengelolaan Keuangan
Program Peningkatan Prestasi Kerja dan Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara	350.063.900	304.453.338	45.610.562,00	86,97	Badan Kepegawaian
Program Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	167.808.000	156.648.315	11.159.685,00	93,35	Badan Kepegawaian
Program Pembinaan Aparatur Sipil Negara	223.199.280	191.853.611	31.345.669,00	85,96	Badan Kepegawaian
Program Pengadaan dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara	547.277.850	403.321.444	143.956.406,00	73,70	Badan Kepegawaian
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	3.481.805.600	3.086.214.710	395.590.890,00	88,64	Badan Kepegawaian
Program Penelitian dan Pengkajian untuk Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	1.393.666.500	1.284.156.457	109.510.043,00	92,14	Bapperlitbang
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	53.139.000	47.313.300	5.825.700,00	89,04	Dinas Kominfo
Program Penyelenggaraan dan Pengamanan Persandian Pemerintah Daerah	167.938.700	154.445.243	13.493.457,00	91,97	Dinas Kominfo
Program Penyelenggaraan Kearsipan	82.906.330	82.338.330	568.000,00	99,31	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	2.864.542.585	2.315.141.608	549.400.977,00	80,82	Dinas Kominfo



Pemerintah Kabupaten Klungkung
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019

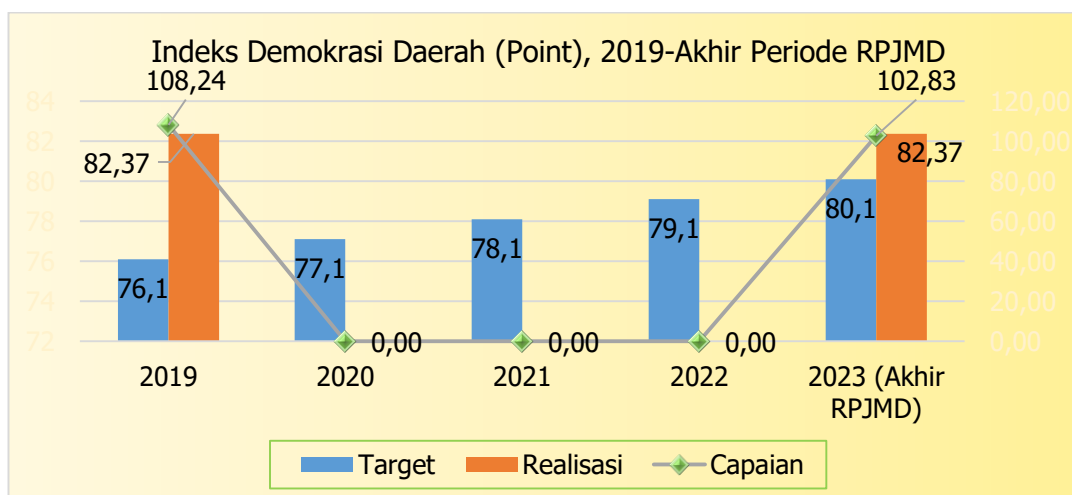
Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)	Ket
Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	797.051.793	752.026.230	45.025.563,00	94,35	Dinas Kominfo
Program Penataan Administrasi Kependudukan	177.751.500	154.408.200	23.343.300,00	86,87	Disdukcapil
Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	665.906.000	654.412.500	11.493.500,00	98,27	Disdukcapil
Program Pelayanan Pencatatan Sipil	196.946.000	186.701.610	10.244.390,00	94,80	Disdukcapil
Jumlah	77.407.968.163	66.801.066.166	10.606.901.997,37	86,30	

Sumber : SIMda Keuangan, 14 Maret 2020 (sebelum audit BPK)

Pada tahun 2019, Sasaran Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Responsif, Transparan, Santun Dan Inovatif didukung dengan 56 program pendukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 77.407.968.163,00 dan terealisasi sebesar Rp. 66.801.066.166,00 dan sisa anggaran sebesar Rp. 10.606.901.997,37 atau terealisasi sebesar 86,30 persen. Sasaran ini didukung oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, seluruh Kecamatan di Kabupaten Klungkung, Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sasaran 6 Terwujudnya Ketaatan Masyarakat Terhadap Peraturan Perundangan

Pemerintah pada dasarnya dibentuk untuk melayani masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic need*). Secara umum kebutuhan dasar masyarakat meliputi pendidikan, kesehatan, daya beli serta fasilitas umum. Dalam perkembangan selanjutnya, setelah terjadinya banyak gangguan keamanan di berbagai tempat, timbul wacana agar keamanan juga dimasukkan ke dalam kategori kebutuhan dasar masyarakat. Setiap anggota masyarakat membutuhkan rasa aman. Keamanan secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu situasi dan kondisi fisik yang teratur, tertib sesuai norma-norma yang berlaku, keamanan berkaitan erat dengan ketertiban. Ketertiban adalah keadaan yang sesuai dengan hukum, norma-norma serta kesepakatan bersama. Ketertiban lebih dekat dengan upaya penegakan hukum dan pemenuhan norma-norma. Pentingnya pemenuhan terhadap kebutuhan akan rasa aman di masyarakat mendorong Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk menetapkan sasaran Terwujudnya Ketaatan Masyarakat Terhadap Peraturan Perundangan yang diukur dengan Indeks Demokrasi Daerah. Capaian kinerja Indeks Demokrasi Daerah disajikan sebagai berikut:



Sumber: Statistik Indonesia 2019,2020 *Realisasi adalah Angka Provinsi Bali

Gambar 3.32 Indeks Demokrasi Daerah Kab. Klungkung, 2019

Indeks Demokrasi Daerah adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur



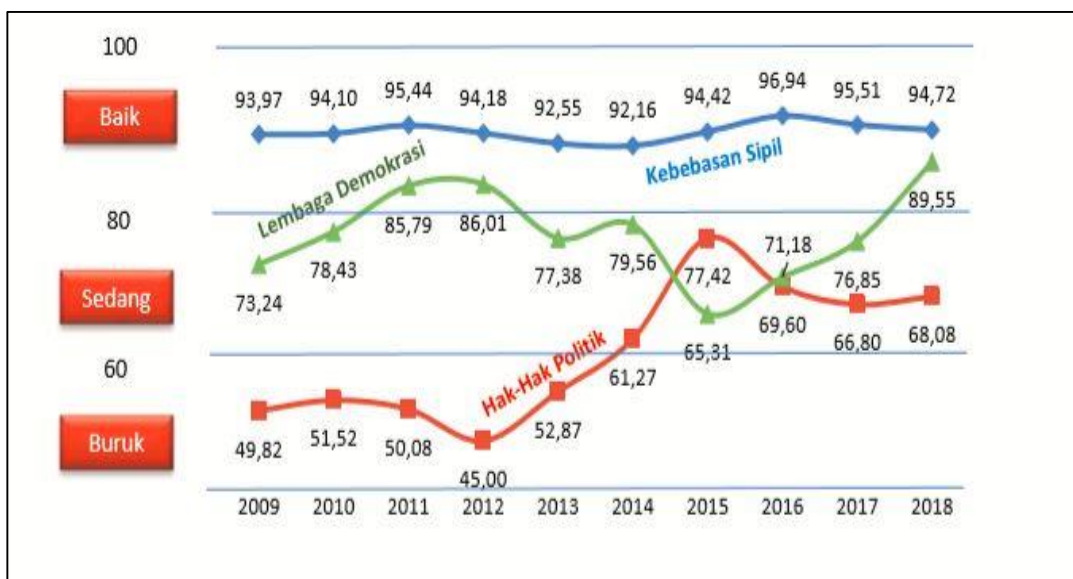
berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Capaian kinerja Indeks Demokrasi Daerah pada tahun 2019 tercapai sebesar 108,24 persen. Pada tahun 2019, Indeks Demokrasi Daerah ditargetkan sebesar 76,1 point dan terealisasi sebesar 82,37 point. Dibandingkan dengan target RPJMD, capaian kinerja indeks demokrasi daerah telah terealisasi sebesar 102,83 persen. Untuk mengetahui secara rinci komponen pembentuk Indeks Demokrasi Daerah Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.23.
Komponen Pembentuk Indeks Demokrasi Daerah Provinsi Bali, 2018

No	Komponen Indeks	Nilai (2018)
1	Kebebasan Sipil (<i>Civil Liberty</i>)	94,72
2	Hak-Hak Politik (<i>Political Rights</i>)	68,08
3	Lembaga Demokrasi (<i>Institution of Democracy</i>)	89,55

Sumber: Statistik Indonesia 2020, Penyediaan Data Perencanaan Pembangunan

Capaian kinerja demokrasi Bali pada tahun 2018 berada pada kategori "Baik". Peningkatan nilai IDI 2018 dipengaruhi oleh peningkatan aspek Hak-hak Politik tercatat sebesar 1,28 poin (dari 66,80 menjadi 68,08) serta kenaikan aspek Lembaga Demokrasi tercatat sebesar 12,70 poin (dari 76,85 menjadi 89,55). Sementara itu, aspek Kebebasan Sipil tercatat mengalami penurunan sebesar 0,79 poin (dari 95,51 menjadi 94,72). Sepanjang tahun 2009 hingga 2018, tingkat demokrasi di Bali mengalami dinamika. Pada periode tahun 2009 – 2018, angka IDI tercatat berfluktuasi di kisaran angka terendah 70,35 pada tahun 2009 dan tertinggi tercatat sebesar 82,37 pada tahun 2018.



Sumber: BPS Provinsi Bali, 2020

Gambar 3.33 Indeks Demokrasi Provinsi Bali, 2009-2019

IDI Bali 2018 tercatat sebesar 82,37, menunjukkan bahwa demokrasi Bali berada pada kategori “baik”. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 3,57 poin dibandingkan IDI Bali 2017 tercatat sebesar 78,80. Peningkatan nilai IDI 2018 dipengaruhi oleh peningkatan aspek Hak-hak Politik tercatat sebesar 1,28 poin (dari 66,80 menjadi 68,08) serta kenaikan aspek Lembaga Demokrasi tercatat sebesar 12,70 poin (dari 76,85 menjadi 89,55). Sementara itu, aspek Kebebasan Sipil tercatat mengalami penurunan sebesar -0,79 poin (dari 95,51 menjadi 94,72).

Menurut variabel penyusunnya, pada periode 2017-2018 tercatat lima variabel mengalami peningkatan, satu variabel mengalami penurunan, serta lima variabel lainnya tidak mengalami perubahan atau stagnan. Variabel yang tercatat mengalami peningkatan tertinggi yaitu variabel Peran Partai Politik yang meningkat sebesar 64,29 poin. Sementara itu, variabel yang mengalami penurunan yaitu variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat yang tercatat turun sebesar -32,81 poin.

Untuk dapat memperoleh gambaran mengenai capaian kinerja Indeks Demokrasi Daerah secara nasional dapat dilihat sebagai berikut:



Tabel 3.24

Indeks Demokrasi Seluruh Provinsi di Indonesia dan Nasional, 2011-2018

Provinsi Province	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	55,54	54,02	63,56	72,29	67,78	72,48	70,93	79,97
Sumatera Utara	66,15	58,51	58,80	68,02	69,01	67,37	68,08	64,33
Sumatera Barat	65,02	60,82	54,11	63,99	67,46	54,41	69,50	67,06
Riau	70,65	67,00	68,37	68,40	65,83	71,89	73,41	77,59
Jambi	70,46	68,81	64,41	71,15	70,68	68,89	74,12	68,71
Sumatera Selatan	67,92	73,17	67,12	74,82	79,81	80,95	74,04	77,14
Bengkulu	71,36	61,70	59,17	71,70	73,60	74,23	72,73	70,71
Lampung	74,08	72,26	63,13	71,62	65,95	61,00	72,01	68,67
Kepulauan Bangka Belitung	67,13	69,37	68,79	75,32	72,31	83,00	80,11	73,43
Kepulauan Riau	70,78	65,61	66,50	68,39	70,26	72,84	76,33	79,19
DKI Jakarta	77,81	77,72	71,18	84,70	85,32	70,85	84,73	85,08
Jawa Barat	66,18	57,05	65,18	71,52	73,04	66,82	68,78	65,50
Jawa Tengah	65,59	63,79	60,84	77,44	69,75	66,71	70,85	72,17
DI Yogyakarta	71,67	72,96	72,36	82,71	83,19	85,58	83,61	80,82
Jawa Timur	55,98	54,99	59,32	70,36	76,90	72,24	70,92	72,86
Banten	67,37	65,29	69,79	75,50	68,46	71,36	73,72	73,78
Bali	74,20	71,75	72,22	76,13	79,83	78,95	78,80	82,37
Nusa Tenggara Barat	54,49	57,97	57,22	62,62	65,08	65,41	76,04	73,63
Nusa Tenggara Timur	72,34	72,67	73,29	68,81	78,47	82,49	75,51	82,32
Kalimantan Barat	74,86	65,38	67,52	80,58	76,40	75,28	79,13	76,14
Kalimantan Tengah	76,28	65,78	64,15	79,00	73,46	74,77	76,12	71,27
Kalimantan Selatan	66,47	61,13	63,71	70,84	74,76	73,43	76,25	79,92
Kalimantan Timur	66,37	71,23	68,13	77,77	81,24	73,64	72,86	73,88
Kalimantan Utara ¹	-	-	...	-	80,16	76,98	81,06	81,07
Sulawesi Utara	71,19	76,50	73,11	83,94	79,40	76,34	75,76	77,77
Sulawesi Tengah	64,00	64,97	64,50	74,36	76,67	72,20	69,79	75,29
Sulawesi Selatan	65,31	68,55	65,20	75,30	67,90	68,53	70,79	70,88
Sulawesi Tenggara	57,56	57,26	52,61	70,13	69,44	71,13	68,51	74,32
Gorontalo	62,77	59,37	67,21	73,82	76,77	77,48	73,92	72,59
Sulawesi Barat	66,36	63,65	64,02	76,69	68,25	72,37	67,74	71,46
Maluku	68,38	59,68	66,23	72,72	65,90	78,20	77,45	75,51
Maluku Utara	59,17	66,83	64,06	67,90	61,52	73,27	70,73	72,10
Papua Barat	61,78	65,70	60,70	65,65	59,97	60,35	62,76	58,29
Papua	59,05	60,71	60,92	62,15	57,55	61,02	61,34	62,20
Indonesia	65,48	62,63	63,72	73,04	72,82	70,09	72,11	72,39

Sumber: Statistik Indonesia 2020, Penyediaan Data Perencanaan Pembangunan

Catatan : Indeks Demokrasi Indonesia merupakan agregat tertimbang dari Indeks Demokrasi di tingkat provinsi

Pada tahun 2018, provinsi Bali mencapai indeks Demokrasi Daerah sebesar 82,37 yang berada diatas rata-rata indeks demokrasi daerah seluruh provinsi di Indonesia/angka nasional yang sebesar 72,39. Capaian dari masing-masing komponen Indeks Demokrasi Daerah yang telah dilakukan oleh Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:



Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*)

Kebebasan sipil dapat diartikulasikan menjadi bebasnya warga memperoleh semua hak-hak sipilnya dan diharapkan dapat menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Untuk menjamin kebebasan sipil yang seluasnya bagi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Klungkung melakukan pengendalian atas potensi konflik yang terjadi di wilayah Pemerintah Kabupaten Klungkung. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga hak-hak kebebasan sipil masyarakat tetap terpenuhi. Untuk mengetahui sebaran konflik yang ada di Kabupaten Klungkung berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada table sebagai berikut.

Tabel 3.25
Potensi Konflik Berdasarkan Kecamatan di Kab.Klungkung

Kecamatan	2016	2017	2018	2019
Klungkung	14	11	9	6
Banjarangkan	7	7	6	5
Dawan	8	7	6	5
Nusa Penida	8	7	6	6
Jumlah	37	32	27	22

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Klungkung, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 terdapat 32 potensi konflik di Kabupaten Klungkung dan pada tahun 2018 telah dapat terselesaikan 5 potensi konflik, sehingga sisa potensi konflik di tahun 2018 sebanyak 27 potensi konflik. Dalam usaha mencapai sasaran Menurunkan Potensi Konflik, Pemerintah Kabupaten Klungkung menemui kendala sebagai berikut:

1. Kondisi geografis Kabupaten Klungkung yang terdiri dari kepulauan dengan kurang lebih 13 pelabuhan laut tradisional yang minim pengawasan dapat menjadi suatu kelemahan bagi Kabupaten Klungkung. Banyaknya alternative pelabuhan laut tradisional menjadi rawan penyelundupan dan penggelapan baik itu orang, narkoba, barang import dan berbagai kejahatan lainnya.
2. Masyarakat yang multi ras merupakan suatu tantangan tersendiri, dimana sangat rentan akan konflik antar umat beragama.



3. Didalam Lembaga adat sendiri, yang selama ini menjadi andalan dalam penyelesaian persoalan social di tingkat terbawah justru menjadi salah satu sumber pemicu konflik disebabkan perebutan hak tanah bahkan pura.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam mencapai sasaran Menurunkan Potensi Konflik, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peranan aparat keamanan, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, Majelis Madya Desa Pekraman, Majelis Alit Desa Pekraman dan Desa Pekraman, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), serta Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Klungkung dan Tim Terpadu Pemetaan Daerah Rawan Konflik Sosial kabupaten Klungkung dalam ikut menekan tumbuhnya potensi konflik.
2. Meningkatkan peranan masyarakat dalam memelihara situasi yang kondusif di lingkungan sekitarnya dengan memberikan sosialisasi pencegahan potensi konflik dan kegiatan monitoring lain yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
3. Melakukan fasilitasi penyelesaian konflik dengan menguatkan peranan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Klungkung yang dikendalikan langsung oleh Bupati Klungkung.

Terciptanya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat akan menimbulkan terwujudnya suatu kepatuhan masyarakat terhadap penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sehingga akan dapat memberi dampak pada kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah. Pelanggaran Peraturan dapat menjadi salah satu indicator ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun jenis pelanggaran perda pada tahun 2015-2019 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.



Tabel 3.26
Rincian Jumlah Pelanggaran Perda di Kabupaten Klungkung Tahun 2015-2019

No	Jenis Pelanggaran Perda	2015	2016	2017	2018	2019
1	Penduduk Pendetang (Perda No. 2 Tahun 2011)	250	511	261	479	7
2	IMB (Perda No. 4 Tahun 1974)	46	23	13	0	0
3	Ketertiban Umum / KTU (Perda No. 2 Tahun 2014)	518	498	187	52	73
4	Kawasan tanpa Rokok/ KTR (Perda No. 1 Tahun 2014)	7	3	0	0	0
5	Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup (Perda No. 2 Tahun 2010)	18	2	0	0	0
6	Pengelolaan Sampah (Perda No. 7 Tahun 2014)	-	-	-	-	3
	Jumlah	839	1.037	461	531	83

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Klungkung, 2020

Pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Klungkung mulai meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap pengelolaan sampah melalui penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014. Pada tahun 2019 terdapat 3 pelanggar Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah. Selain meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan sampah, penurunan pelanggaran Peraturan Daerah Penduduk Pendetang juga berhasil dilakukan, dimana pelanggaran terhadap penduduk pendatang sebanyak 7 pelanggar. Menurun drastic dari tahun sebelumnya yang sebesar 479 pelanggar. Selain pelanggaran terhadap peraturan daerah, gangguan keamanan dapat menjadi indicator lain dari adanya penanganan terhadap kebebasan sipil. Perkataan aman dalam pemahaman tersebut mengandung 4 (empat) pengertian dasar, yaitu: Security yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis; Surety yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran; Safety yaitu perasaan terlindung dari segala bahaya; dan Peace yaitu perasaan damai lahiriah dan batiniah. Gangguan keamanan yang terjadi di Kabupaten Klungkung disajikan sebagai berikut:



Tabel 3.27
Angka Gangguan Kamtibmas Per Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	Angka Gangguan Kamtibmas (kasus)	Keterangan
1	Nusa Penida	4	Data ini didapat dari Rekapitulasi Angka Gangguan yang didapat selama 1 Tahun di Bidang Linmas
2	Banjarangkan	0	
3	Klungkung	12	
4	Dawan	1	
	Jumlah	17	

Sumber : Satpol PP dan PMK Kab. Klungkung, 2020

Untuk meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap eraturan perundangan, Pemerintah Kabupaten Klungkung melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan intensitas pendataan penduduk pendatang terutama rumah-rumah kost dengan melibatkan seluruh komponen keamanan seperti kepolisian, TNI, satpol PP, satuan Linmas, Pecalang, Kepala Lingkungan dan Tokoh Masyarakat.
2. Meningkatkan kapasitas Satuan Linmas dan Pecalang sebagai garda terbawah penjagaan keamanan lingkungan dengan memberikan pelatihan-pelatihan tanggap keamanan lingkungan.
3. Melaksanakan inspeksi mendadak untuk memantau kondisi keamanan wilayah.

Dalam menjaga kebebasan hak-hak sipil masyarakat, Pemerintah Kabupaten Klungkung mengalami kendala-kendala sebagai berikut:

1. Banyaknya penduduk pendatang yang hampir masuk ke semua wilayah Desa di Kabupaten Klungkung yang tidak memiliki Skill dan tujuan yang jelas akan dapat menimbulkan berbagai permasalahan.
2. Maraknya peredaran narkoba yang tidak saja terjadi di kota bahkan sudah sampai ke desa-desa sampai menyasar anak-anak sekolah.

Hak-Hak Politik (*Political Rights*)

Terpenuhinya hak-hak politik masyarakat merupakan salah satu indikator yang bisa menunjukkan kebebasan berdemokrasi. Suksesnya penyelenggaraan pemilihan umum dapat menjadi suatu indikator terpenuhinya hak-hak politik masyarakat. Penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dapat menunjukkan kondisi pemenuhan hak-hak politik di Kabupaten Klungkung. Dibawah ini disajikan



data perolehan Perolehan Suara Sah Partai Politik Hasil Pemilu Legislatif 2019 Untuk DPRD Tingkat I di Kabupaten Klungkung.

Tabel 3.28
Perolehan Suara Sah Partai Politik Hasil Pemilu Legislatif 2019 Untuk DPRD Tingkat I di Kabupaten Klungkung

Partai	Kab. Klungkung
Partai Kebangkitan Bangsa	1.125
Partai Gerindra	16.543
PDI Perjuangan	50.247
Partai Golkar	14.668
Partai Nasdem	3.466
Partai Garuda	1.212
Partai Berkarya	1.769
Partai Keadilan Sejahtera	600
Partai Perindo	1.498
Partai Persatuan Pembangunan	751
Partai Solidaritas Indonesia	1.694
Partai Amanat Nasional	678
Partai Hati Nurani Rakyat	2.984
Partai Demokrat	13.648
Partai Bulan Bintang	60
PKPI	1.206
Total	112.149

Sumber: Provinsi Bali Dalam Angka,2020

Dari data diatas dapat diketahui bahwa PDI Perjuangan, Partai Gerindra dan Partai Golkar merupakan tiga partai yang memperoleh suara terbanyak untuk Perolehan Suara Sah Partai Politik Hasil Pemilu Legislatif 2019 Untuk DPRD Tingkat I di Kabupaten Klungkung. Sementara untuk hasil pemilihan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Bali Tahun 2018 pengguna hak pilih disajikan sebagai berikut:



Tabel 3.29
 Hasil Pemilihan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Bali Tahun 2018 di
 Kabupaten Klungkung

Keterangan	Jumlah Suara
Jumlah Suara Untuk Nomor Urut 1*	39.653
Jumlah Suara Untuk Nomor Urut 2**	81.232
Suara Tidak Sah	4.279
Jumlah	125.164

Sumber: Provinsi Bali Dalam Angka 2020
 Nomor Urut 1* : Dr. Ir. Wayan Koster, M.M
 Dr. Ir. Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati, M.Si
 Nomor Urut 2* : Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, S.E, M.Si
 Drs. I Ketut Sudikerta

Dari data diketahui bahwa pada pemilihan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Bali Tahun 2018, di Kabupaten Klungkung pasangan Nomor urut 1 memperoleh 39.653 suara dan pasangan nomor urut 2 memperoleh 81.232 suara dengan 4.279 suara tidak sah.

Tabel 3.30
 Jumlah Perolehan Suara Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019

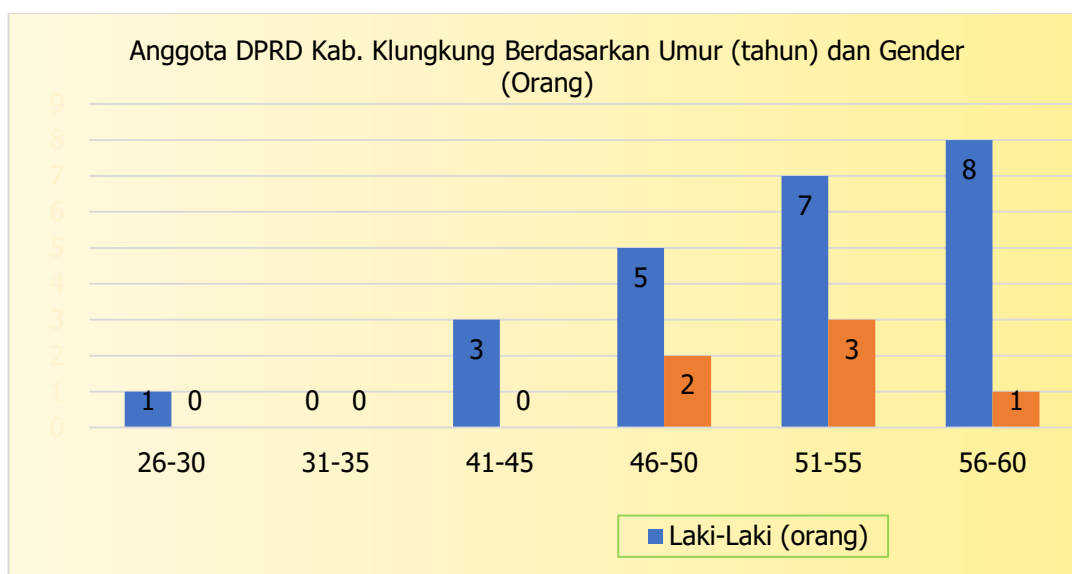
Kabupaten/Kota	Jumlah Suara Untuk No Urut 1*	Jumlah Suara Untuk No Urut 2*	Suara Tidak Sah	Jumlah
Jembrana	153.126	33.829	3.628	190.583
Tabanan	302.441	18.013	5.413	325.867
Badung	312.813	23.357	4.389	340.559
Gianyar	318.536	12.627	5.135	336.298
Klungkung	118.237	10.486	4.485	133.208
Bangli	149.453	8.938	5.622	164.013
Karangasem	274.861	20.549	9.574	304.984
Buleleng	383.571	46.161	10.055	439.787
Denpasar	338.019	39.455	4.037	381.511
Jumlah	2.351.057	213.415	52.338	2.616.810

Sumber: Provinsi Bali Dalam Angka 2020
 Nomor Urut 1* : Ir. H.Joko Widodo
 Prof. Dr. (HC) KH. Ma'ruf Amin
 Nomor Urut 2* : H. Prabowo Subianto
 H. sandiaga Salahuddin Uno

Dari data diatas dapat diketahui bahwa di Kabupaten Klungkung jumlah pemilih nomor urut satu sebanyak 118.237 suara dan nomor urut 2 sebanyak 10.486 suara dengan 4.485 suara tidak sah

Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*)

Kebebasan lembaga demokrasi merupakan salah satu komponen pembentuk Indeks Demokrasi Daerah. Untuk melihat capaian kinerja pada kebebasan lembaga demokrasi ini diantaranya dapat dilihat dari



Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Klungkung, 2020

Gambar 3.34 Anggota DPRD Kabupaten Klungkung Berdasarkan Umur (tahun) dan Gender (Orang)

Berdasarkan hasil pemilihan anggota DPRD Kabupaten Klungkung Tahun 2019, Anggota DPRD Kabupaten Klungkung berjumlah 30 orang dengan 24 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Jika dilihat dari umur, terdapat 1 orang anggota DPRD dengan umur 26-30 tahun, 3 orang anggota DPRD dengan umur 41-45 tahun, 7 orang anggota DPRD dengan umur 46-50 tahun, 10 orang anggota DPRD dengan umur 51-55 tahun dan 9 orang anggota DPRD dengan umur 56-60 tahun. Hal tersebut dapat menunjukkan kinerja kaderisasi di partai politik peserta pemilu. Kaderisasi merupakan salah satu komponen penilaian kinerja lembaga demokrasi dalam penghitungan Indeks Demokrasi Daerah. Selain kaderisasi, peran serta perempuan juga merupakan salah satu komponen penilaian kinerja lembaga demokrasi. Untuk melihat kinerja lembaga demokrasi dapat dilihat dari jumlah



peraturan daerah yang dikeluarkan. Dibawah ini diuraikan peraturan daerah yang disepakati bersama DPRD Kabupaten Klungkung

Tabel 3.31
Peraturan Daerah Yang Disepakati Antara Eksekutif dan DPRD Kab. Klungkung Tahun 2019

No	Perda Nomor	Tanggal	Tentang
1.	Nomor 1 Tahun 2019	22 Mei 2019	Penyelenggaraan Kearsipan
2.	Nomor 2 Tahun 2019	14 Juni 2019	Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2018-2023
3.	Nomor 3 Tahun 2019	15 Agustus 2019	Pengelolaan Barang Milik Daerah
4.	Nomor 4 Tahun 2019	28 Agustus 2019	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019
5.	Nomor 5 Tahun 2019	1 Nopember 2019	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019
6.	Nomor 6 Tahun 2019	23 Desember 2019	Penyelenggaraan Perpajakan

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Klungkung, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa selama tahun 2019 terdapat enam Peraturan Daerah yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Klungkung dan DPRD Kabupaten Klungkung.

Dalam melaksanakan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Klungkung senantiasa dituntut untuk melaksanakan pelayanan dengan efektif dan efisien. Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Analisis efisiensi difokuskan pada indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur dari kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/atau lebih besar, atau persentase capaian *output* sama tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Terwujudnya Ketaatan Masyarakat Terhadap Peraturan Perundangan sebagai berikut:



Tabel 3.32
 Tingkat Efisiensi
 Terwujudnya Ketaatan Masyarakat Terhadap Peraturan Perundangan
 Tahun 2019

Indikator Kinerja	Target Capaian Sasaran (%)	Target Capaian Keuangan (%)	Standar Efisiensi	Realisasi Capaian Sasaran (%)	Realisasi Capaian Keuangan (%)	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Indeks Demokrasi Daerah	100	100	1,00	108,24	90,52	1,20	0,20	Efisien
Jumlah	100	100	1,00	108,24	90,52	1,20	0,20	Efisien

Sumber : data diolah

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2019, tingkat efisiensi sasaran Terwujudnya Ketaatan Masyarakat Terhadap Peraturan Perundangan adalah sebesar 0,20 dimana indeks efisiensi lebih tinggi dari standar efisiensi. Pada tahun 2019 sasaran Terwujudnya Ketaatan Masyarakat Terhadap Peraturan Perundangan dicapai dengan efisien. Sasaran Terwujudnya Ketaatan Masyarakat Terhadap Peraturan Perundangan didukung dengan program pendukung sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.33
 Efisiensi Anggaran
 Terwujudnya Ketaatan Masyarakat Terhadap Peraturan Perundangan
 Tahun 2019

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Program Pendidikan Politik Masyarakat	140.886.450	125.371.650	15.514.800,00	88,99	Kesbangpol
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	912.992.664	777.521.164	135.471.500,19	85,16	Bagian Hukum dan HAM
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	72.281.450	72.244.985	36.465,00	99,95	Kesbangpol
Program Koordinasi Kewaspadaan Dini dan Fasilitasi Penanganan Konflik	735.775.800	701.187.200	34.588.600,00	95,30	Kesbangpol
Program Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan	99.238.700	99.096.100	142.600,00	99,86	Kesbangpol



Pemerintah Kabupaten Klungkung
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)	Ket
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	150.086.004	86.371.264	63.714.740,00	57,55	Dinas DLHP
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	168.403.000	136.362.600	32.040.400,00	80,97	BPBD
Program Pengurangan Resiko Bencana	787.570.900	501.609.200	285.961.700,00	63,69	BPBD
Program Penanganan Darurat Bencana	970.731.280	888.265.480	82.465.800,00	91,50	BPBD
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	275.411.089	239.726.206	35.684.883,00	87,04	Satpol PP
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	2.314.341.216	2.277.810.772	36.530.444,00	98,42	Satpol PP
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	236.466.000	211.141.000	25.325.000,00	89,29	Satpol PP
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	2.343.570.896	2.218.154.632	125.416.264,00	94,65	Satpol PP
Jumlah	9.207.755.449	8.334.862.253	872.893.196,19	90,52	

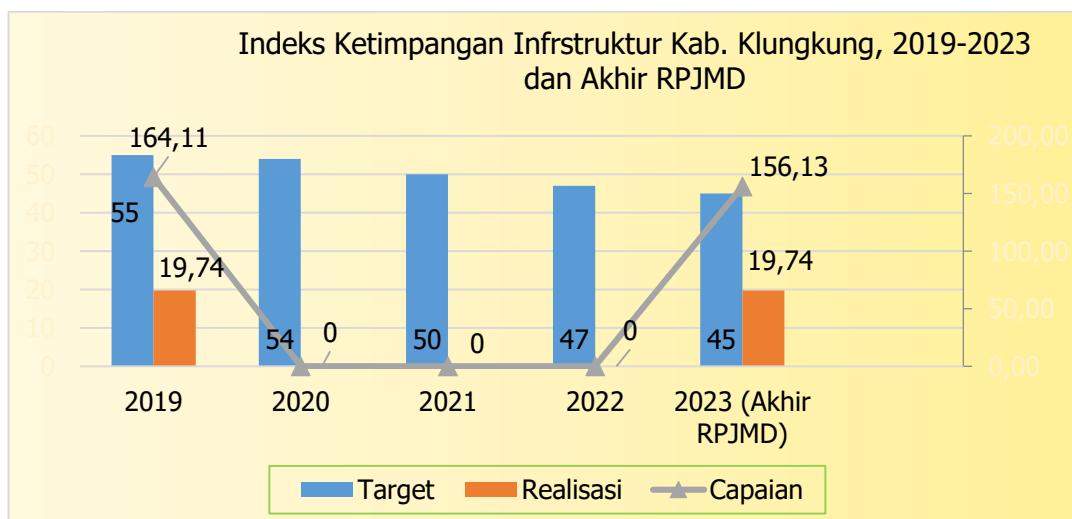
Sumber : Simda Keuangan, 14 Maret 2020 (sebelum audit BPK)

Pada tahun 2019, Sasaran Terwujudnya Ketaatan Masyarakat Terhadap Peraturan Perundangan didukung dengan 13 program pendukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.207.755.449,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.334.862.253,00 dan sisa anggaran sebesar Rp. 872.893.196,19,00 atau terealisasi sebesar 90,52 persen. Sasaran ini didukung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Hukum dan HAM, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan seluruh Kecamatan di Kabupaten Klungkung.



Sasaran 7 Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah

Untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh pelayanan publik yang baik, Pemerintah Kabupaten Klungkung menetapkan sasaran Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah yang diukur dengan indikator Indeks Ketimpangan Infrastruktur. Indeks Ketimpangan Infrastruktur merupakan indeks komposit yang memadukan dua indikator kinerja dibidang penyediaan prasarana publik yaitu : Rata-rata jalan rusak dan rusak berat di masing-masing kecamatan dan Persentase Trayek Angkutan Umum Yang Tidak Berfungsi. Rata-rata jalan rusak dan rusak berat di masing-masing kecamatan menyumbang bobot 80% terhadap Indeks Ketimpangan Infrastruktur Kabupaten, sementara Persentase Trayek Angkutan Umum Yang Tidak Berfungsi menyumbang bobot 20% terhadap Indeks Ketimpangan Infrastruktur Kabupaten. Rata-rata jalan rusak dan rusak berat di masing-masing kecamatan merupakan panjang jalan kecamatan dalam kondisi rusak dan rusak berat dibandingkan dengan panjang jalan di masing-masing kecamatan. Sementara Persentase trayek angkutan umum yang tidak berfungsi merupakan perbandingan antara jumlah trayek angkutan umum yang tidak berfungsi dibagi keseluruhan trayek angkutan umum di Kabupaten Klungkung. Capaian target indikator sasaran Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah tahun 2019 disajikan pada grafik sebagai berikut:

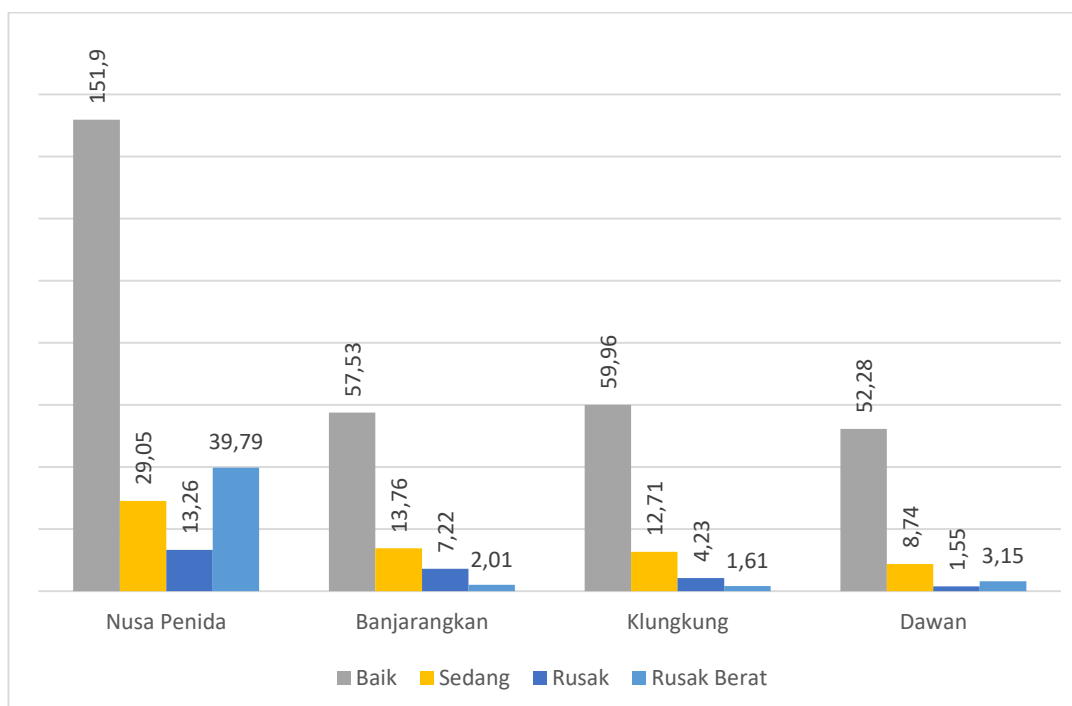


Sumber : data diolah

Gambar 3.35 Indeks Ketimpangan Infrastruktur, 2019-2023 dan Capaian Akhir RPJMD.

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator Kinerja Indeks Ketimpangan Insfrastruktur di Kabupaten Klungkung pada tahun 2019 telah melewati target yang ditetapkan. Pada tahun 2019, Indeks Ketimpangan Insfrastruktur ditargetkan sebesar 55 poin dan terealisasi sebesar 19,74 atau dengan capaian 164,11 persen. Dibandingkan dengan target RPJMD, capaian akhir periode RPJMD telah tercapai sebesar 156,13 persen. Untuk itu diperlukan usaha-usaha untuk terus mempertahankan bahkan meningkatkan Indeks Ketimpangan Insfrastruktur di Kabupaten Klungkung.

Ada dua komponen utama yang berpengaruh terhadap capaian kinerja pelayanan infrastruktur di Kabupaten Klungkung yaitu Rata-Rata Jalan Rusak dan Rusak Berat di masing-masing kecamatan serta berfungsinya trayek angkutan umum. Untuk mengetahui kinerja pelayanan jalan, kondisi jalan di masing-masing kecamatan ditampilkan pada grafik sebagai berikut:

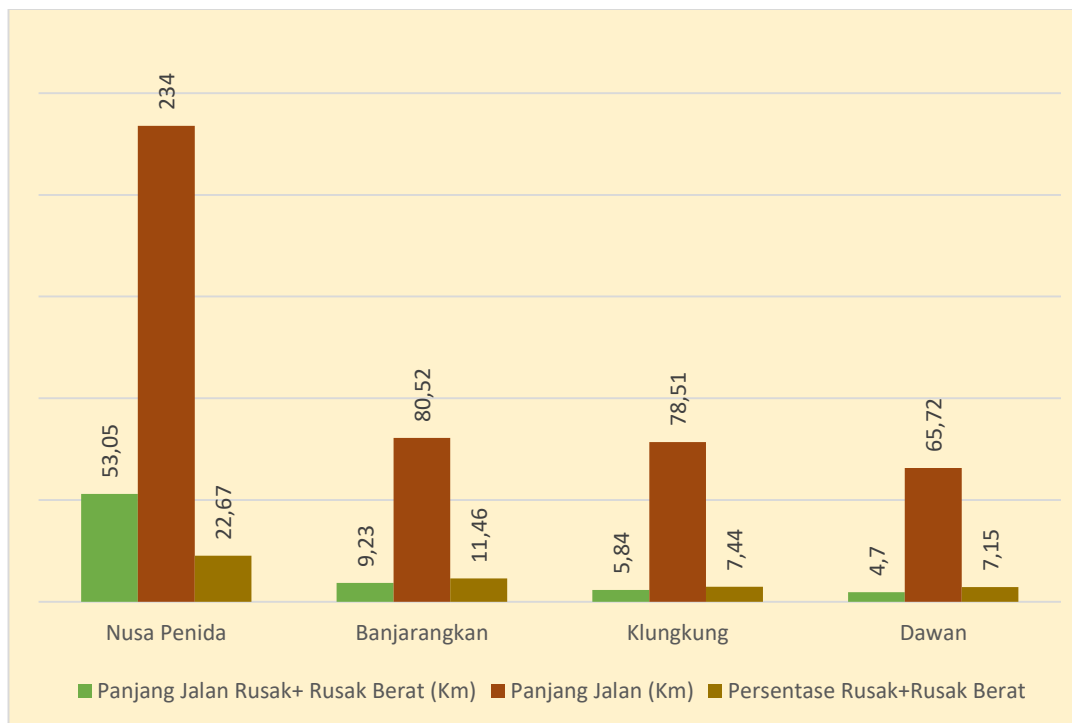


Sumber : Kabupaten Klungkung Dalam Angka 2019

Gambar 3.36 Kondisi Jalan di masing-masing kecamatan (Km), 2019

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa di Kecamatan Nusa Penida, jalan baik mencapai 151,9 Km dan merupakan persentase terbesar di Kabupaten Klungkung. Sementara jalan baik terpendek ada di Kecamatan Dawan dengan

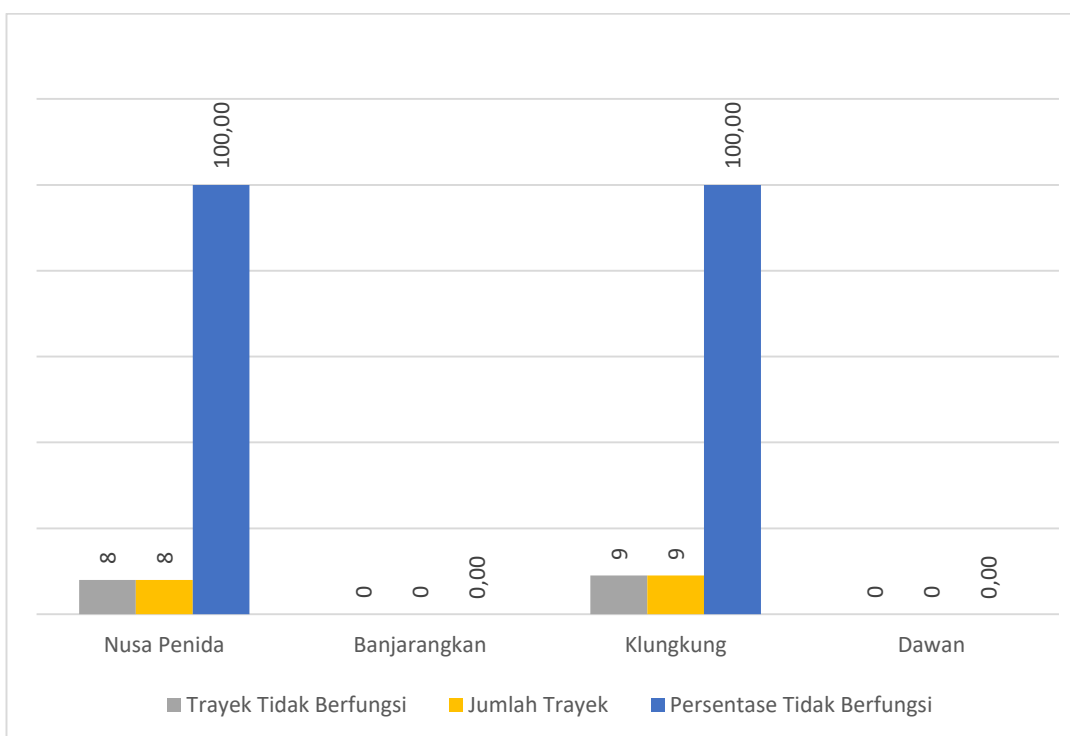
panjang 52,28 Km. Untuk mengetahui persentase jalan rusak dan rusak berat di masing-masing kecamatan dapat dilihat pada gambar dibawah



Sumber : Kabupaten Klungkung Dalam Angka 2019

Gambar 3.37 Persentase Jalan Rusak dan Rusak Berat di masing-masing kecamatan (Km), 2019

Kecamatan Nusa Penida sebagai kecamatan dengan luas terbanyak di Kabupaten Klungkung memiliki panjang jalan terpanjang dibandingkan dengan Kecamatan Lain di Kabupaten Klungkung. Seiring dengan kondisi tersebut, Kecamatan Nusa Penida juga memiliki panjang jalan rusak dan rusak berat terbanyak. Kecamatan Dawan memiliki panjang jalan terpendek diantara kecamatan lain di Kabupaten Klungkung. Seiring dengan kondisi tersebut, Kecamatan Dawan juga memiliki persentase jalan rusak dan rusak berat terkecil. Hal tersebut menunjukkan pemerataan penyediaan jalan dalam kondisi baik di setiap kecamatan telah diupayakan. Selain persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap, komponen penentu lain dari Indeks Ketimpangan Infrastruktur adalah persentase trayek angkutan umum yang tidak berfungsi. Dibawah ini ditampilkan grafik Persentase Trayek Angkutan Umum Yang tidak Berfungsi sebagai berikut:



Sumber : Dinas Perhubungan, 2020

Gambar 3.38 Trayek Angkutan Umum Yang Berfungsi (%), 2019

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa trayek angkutan umum yang berfungsi mencapai 53 persen dari keseluruhan trayek yang ada. Ini menandakan masih terdapat trayek angkutan umum yang belum beroperasi maksimal yaitu sebanyak 8 trayek angkutan umum. Dibawah ini disajikan trayek angkutan umum yang ada di Kabupaten Klungkung sebagai berikut:

Tabel 3.34
 Trayek Angkutan Umum di Kabupaten Klungkung, 2019

No	Trayek Angkutan Umum	Wilayah Jaringan Trayek	Status Trayek Angkutan
1	Batununggul-Ped-Toyapakeh PP(Kode B1)	Nusa Penida	Tidak Berfungsi
2	Batununggul-Sakti-Bunga mekar PP (Kode B2)	Nusa Penida	Tidak Berfungsi
3	Batununggul-Kutampi Kaler-Klumpu PP (Kode B3)	Nusa Penida	Tidak Berfungsi
4	Batununggul-Batunadeg PP (Kode S1)	Nusa Penida	Tidak Berfungsi
5	Batununggul-Tanglad-Sekartaji PP	Nusa Penida	Tidak Berfungsi



Pemerintah Kabupaten Klungkung
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019

(Kode S2)			
6	Batununggul-Kutampi PP (Kode S3)	Nusa Penida	Tidak Berfungsi
7	Batununggul-Batukandik PP (Kode S4)	Nusa Penida	Tidak Berfungsi
8	Batununggul-Suana-Pejukutan PP (Kode T)	Nusa Penida	Tidak Berfungsi
9	Semarapura-Akah-Selat	Klungkung	Berfungsi
10	Semarapura-Besang-Selisihan	Klungkung	Berfungsi
11	Semarapura-Aan-Nyangelan	Klungkung	Berfungsi
12	Semarapura-Banjarangkan-Bungbungan	Klungkung	Berfungsi
13	Semarapura-Takmung-Tegal Besar	Klungkung	Berfungsi
14	Semarapura-Gelgel-Jumpai	Klungkung	Berfungsi
15	Semarapura-Kusamba-Pesinggahan	Klungkung	Berfungsi
16	Semarapura-Dawan-Pikat-Besan	Klungkung	Berfungsi
17	Semarapura-Peninjoan-Paksebali	Klungkung	Berfungsi

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Klungkung, 2020

Dalam usaha mencapai sasaran Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah, Pemerintah Kabupaten Klungkung menemui kendala sebagai berikut:

1. Kondisi geografis Kabupaten Klungkung yang terdiri atas beberapa kepulauan mengakibatkan biaya pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan lebih tinggi dari di daratan. Selain permasalahan biaya, akses menuju wilayah pembangunan juga masih tertutup sehingga membutuhkan waktu pembangunan yang lebih lama. Permasalahn kondisi geografis ini telah berdampak luas pada berbagai prasarana publik tidak hanya penyediaan jalan, jembatan, air bersih bahkan juga infrastruktur pendidikan, kesehatan dan sebagainya.
2. Kesadaran masyarakat dalam memelihara dan memanfaatkan infrastruktur publik secara swadaya masih kurang.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam meningkatkan Indeks Ketimpangan Infrastruktur adalah sebagai berikut:

1. Mengupayakan keseimbangan pembangunan infrastruktur di Klungkung daratan dan Klungkung kepulauan sehingga ketimpangan infrastruktur dapat ditanggulangi.



2. Menggalakkan kembali penggunaan angkutan umum publik sebagai sarana transportasi, terutama telah diterapkan pada siswa SMP yang memperoleh layanan ANGKUTAN SISWA GRATIS. Hal ini dimaksudkan untuk menarik minat masyarakat akan kelebihan transportasi publik dimulai dari para siswa. ANGKUTAN SISWA GRATIS memberikan layanan antar jemput gratis bagi siswa SMP di Kabupaten Klungkung.

Dalam melaksanakan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Klungkung senantiasa dituntut untuk melaksanakan pelayanan dengan efektif dan efisien. Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Analisis efisiensi difokuskan pada indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur dari kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/atau lebih besar, atau persentase capaian output sama tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah sebagai berikut:

Tabel 3.35
Tingkat Efisiensi
Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah
Tahun 2019

Indikator Kinerja	Target Capaian Sasaran (%)	Target Capaian Keuangan (%)	Standar Efisiensi	Realisasi Capaian Sasaran (%)	Realisasi Capaian Keuangan (%)	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Indeks Ketimpangan Infrastruktur	100	100	1,00	164,10	92,73	1,77	0,77	Efisien
Jumlah	100	100	1,00	164,10	92,73	1,77	0,77	Efisien

Sumber : data diolah

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2019, tingkat efisiensi sasaran Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah adalah sebesar 0,77 dimana indeks efisiensi lebih tinggi dari standar efisiensi. Pada tahun 2019 sasaran Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah dicapai dengan efisien.



Sasaran Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah didukung dengan program pendukung sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.36
Efisiensi Anggaran
Sasaran Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah
Tahun 2019

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	2.293.595.130	2.179.167.939	114.427.191,00	95,01	Dinas Perhubungan
Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	10.625.123.197	10.260.606.929	364.516.267,80	96,57	Dinas Perhubungan
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	5.962.801.518	5.668.622.066	294.179.452,00	95,07	Dinas Perhubungan
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan	106.650.052	84.335.082	22.314.970,00	79,08	Dinas Perhubungan
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	6.543.350.000	6.448.822.963	94.527.037,00	98,56	Dinas Pekerja Umum
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	192.752.000	126.926.450	65.825.550,00	65,85	Dinas Pekerja Umum
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	5.655.494.069	5.489.929.397	165.564.672,44	97,07	Dinas Pekerja Umum
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	2.549.877.654	2.396.221.489	153.656.165,00	93,97	Dinas Pekerja Umum
Program Pengendalian Banjir	2.201.927.000	1.805.400.577	396.526.423,00	81,99	Dinas Pekerja Umum
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	7.522.685.500	6.210.987.155	1.311.698.345,00	82,56	Dinas Pekerja Umum
Program Perencanaan Tata Ruang	449.332.250	425.035.108	24.297.142,00	94,59	Dinas Pekerja Umum



Pemerintah Kabupaten Klungkung
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019

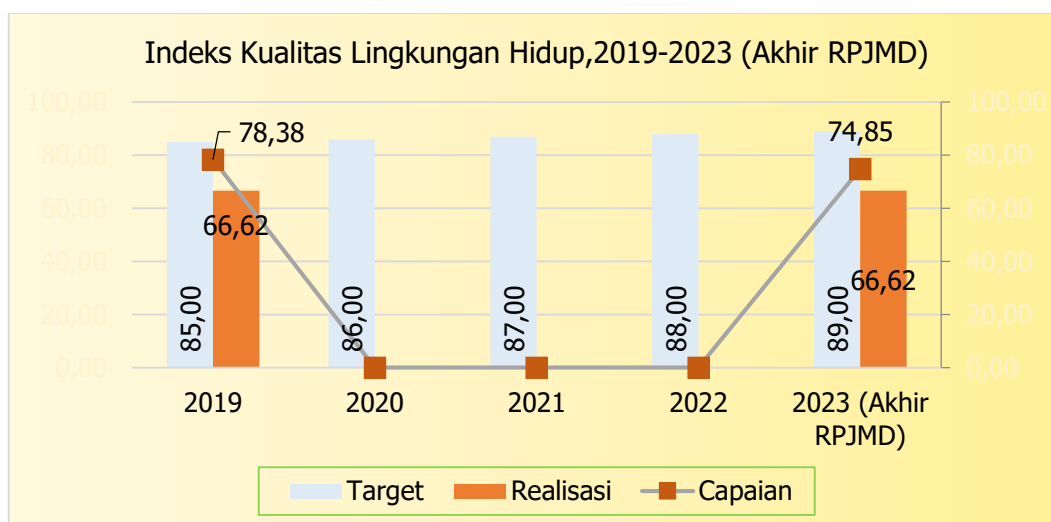
Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)	Ket
Program Pemanfaatan Ruang	288.681.750	276.226.014	12.455.736,00	95,69	Dinas Pekerja Umum
Program Pengembangan Jalan dan Jembatan	51.453.229.629	47.534.116.193	3.919.113.436,08	92,38	Dinas Pekerja Umum
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	10.696.000	9.524.400	1.171.600,00	89,05	Dinas Penanaman Modal
Program Pengembangan Perumahan	52.511.750	36.064.750	16.447.000,00	68,68	Dinas PU
Program Lingkungan Sehat Perumahan	102.560.000	97.500.995	5.059.005,00	95,07	Dinas PU
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	79.571.500	57.182.031	22.389.469,00	71,86	Dinas PU
Jumlah	96.090.838.999	89.106.669.538	6.984.169.461,32	92,73	

Sumber : SIMda Keuangan, 14 Maret 2020 (sebelum audit BPK)

Pada tahun 2019, Sasaran Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah didukung dengan 17 program pendukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 96.090.838.999,00 dan terealisasi sebesar Rp. 89.106.669.538,00 dan sisa anggaran sebesar Rp. 6.984.169.461,32,00 atau terealisasi sebesar 92,73 persen. Sasaran ini didukung oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Permukiman, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Perhubungan.

Sasaran 8 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Manusia yang berkualitas bukan hanya dilihat dari segi pendidikan dan perilakunya sehari-hari namun dapat terlihat dari cara bagaimana seseorang memperlakukan wilayah atau tempat dimana dia tinggal. Tempat tinggal yang tertata rapih dan bersih akan senantiasa terlihat nyaman dan kondusif (aman) jika diimbangi dengan kondisi lingkungan sekitarnya yang bersih dan tertata rapih pula. Karenanya lingkungan hidup yang berkualitas merupakan suatu fokus utama pembangunan daerah. Pembangunan bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Klungkung diindikasikan dengan ditetapkannya sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang diukur dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional, dimana IKLH merupakan generalisasi dari indeks lingkungan hidup seluruh kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia. IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu indikator Indeks kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Capaian target indikator sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2019 disajikan pada grafik sebagai berikut:



Sumber : Statistik Lingkungan Hidup 2019 *Angka Realisasi adalah Angka Provinsi Bali,

*Angka tahun 2018

Gambar 3.39 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, 2019-2023 dan Capaian Akhir RPJMD



Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Klungkung pada tahun 2019 belum dapat memenuhi target yang ditetapkan. Pada tahun 2019, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ditargetkan sebesar 85,00 dan terealisasi sebesar 66,62 atau dengan capaian 78,38 persen. Dibandingkan dengan target RPJMD, capaian akhir RPJMD telah tercapai sebesar 74,85 persen. Untuk itu diperlukan usaha-usaha untuk terus mempertahankan bahkan meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Klungkung. Mengingat belum dilakukannya pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Klungkung, angka realisasi yang disajikan adalah angka Indeks Lingkungan Hidup Provinsi Bali pada tahun 2018 yang merupakan rilis terakhir Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Bali disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.37
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Bali, 2015-2018

Tahun	Nilai	Predikat
2015	73,71	Baik
2016	72,59	Baik
2017	70,11	Baik
2018	66,62	Cukup Baik

Sumber : Statistik Lingkungan Hidup 2019, *Angka Provinsi Bali

Hasil pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Provinsi Bali dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Bahkan pada tahun 2018 mengalami penurunan peringkat dari peringkat baik menjadi cukup baik. Hal tersebut menandakan menurunnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Bali.



Tabel 3.38
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi se Indonesia dan Angka Nasional

No.	Provinsi	IKU	IKA	IKTL	IKLH
1	2	3	4	5	6
1	Aceh	88,33	75,71	75,37	79,36
2	Sumatera Utara	85,72	63,06	49,44	64,41
3	Sumatera Barat	88,37	83,98	67,46	78,69
4	Riau	89,91	73,68	48,37	68,43
5	Jambi	88,04	81,21	50,56	71,00
6	Sumatera Selatan	85,32	88,15	40,17	68,11
7	Bengkulu	91,63	82,08	55,52	74,32
8	Lampung	82,98	68,73	35,93	59,89
9	Bangka Belitung	89,09	82,13	40,78	67,68
10	Kepulauan Riau	90,83	57,85	54,75	66,50
11	DKI Jakarta	66,57	51,93	24,14	45,21
12	Jawa Barat	72,80	65,77	38,51	56,98
13	Jawa Tengah	82,97	77,77	50,12	68,27
14	DI Yogyakarta	84,25	81,63	33,03	62,98
15	Jawa Timur	81,80	74,43	50,52	67,08
16	Banten	71,63	67,32	38,28	57,00
17	Bali	88,97	77,67	41,56	66,62
18	Nusa Tenggara Barat	87,17	74,63	66,56	75,16
19	Nusa Tenggara Timur	86,83	58,09	63,84	69,01
20	Kalimantan Barat	88,68	69,38	64,19	73,09
21	Kalimantan Tengah	87,07	61,15	78,12	75,71
22	Kalimantan Selatan	87,75	75,80	49,29	68,78
23	Kalimantan Timur	83,36	86,19	87,59	85,90
24	Kalimantan Utara	90,95	81,86	87,59	86,88
25	Sulawesi Utara	91,07	78,50	60,19	74,95
26	Sulawesi Selatan	93,56	82,62	54,94	74,83
27	Sulawesi Tengah	89,09	75,95	84,58	83,34
28	Sulawesi Tenggara	89,85	86,17	75,91	83,17
29	Gorontalo	92,17	81,93	79,64	84,09
30	Sulawesi Barat	89,26	82,43	70,96	79,89
31	Maluku	84,99	67,40	88,78	81,23
32	Maluku Utara	90,77	88,01	86,54	88,25
33	Papua Barat	90,41	81,25	100,00	91,50
34	Papua	89,89	61,78	95,94	83,88
NILAI INDEKS NASIONAL		84,74	72,77	61,03	71,67

Sumber: Statistik Lingkungan Hidup 2018, Rilis Tahun 2019

Pada tahun 2019, terdapat 9 provinsi dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup baik, 10 provinsi dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Baik, 11 provinsi dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup cukup baik, 3 provinsi dengan indeks



Kualitas Lingkungan Hidup kurang baik dan terdapat 1 provinsi dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sangat kurang baik. Provinsi Bali menempati indeks kualitas lingkungan hidup cukup baik dengan nilai 66,62 berada dibawah angka nasional yang sebesar 71,67. Dalam meningkatkan kualitas hutan di Kabupaten Klungkung, Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Litbang dan Inovasi melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan peningkatan nilai tambah hasil hutan serta kegiatan penelitian lain yang dapat meningkatkan pemanfaatan hutan di Kabupaten Klungkung. Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan, Badan Litbang dan inovasi melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung. Kerjasama yang dilakukan dalam bentuk kerjasama pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK). Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus yang dimanfaatkan oleh Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.39
 Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus di Kabupaten Klungkung dan pemanfaatannya untuk Penelitian

No	Nama KHDTK / Lokasi	Luas (Ha)	Jumlah Kegiatan Penelitian					Dasar Hukum Penunjjukan KHDTK	Dasar Hukum Penetapan KHDTK
			2014	2015	2016	2017	2018		
1	Nusa Penida	157,7	6	6	5	4	5	SK Menhut No. 459/Menhut-II/2005 Tanggal 13 Desember 2005	SK Menhut No. 459/Menhut -II/2005 Tanggal 13 Desember 2005

Sumber: Statistik Lingkungan Hidup 2019, Rilis Kementerian Lingkungan Hidup RI

Dalam mewujudkan sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Klungkung menghadapi kendala:

1. Tingginya alih fungsi lahan tegalan menjadi perumahan mengakibatkan berkurangnya vegetasi pohon di Kabupaten Klungkung



2. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah di tingkat rumah tangga. Kesalahan pengelolaan itu termasuk membuang sampah ketempat yang tidak semestinya seperti sungai, laut, lahan kosong, mencampurkan sampah organik dan anorganik serta membakar sampah di wilayah permukiman.
3. Masih ada masyarakat yang tidak mendapatkan akses sanitasi yang berkualitas.
4. Terdapat industri rumah tangga makanan dan tekstil baik itu usaha skala rumah tangga, menengah maupun usaha skala besar belum melakukan pengolahan limbah industrinya dengan tepat sehingga sangat berpotensi mencemari lingkungan.
5. Kabupaten Klungkung tidak lagi memiliki Tempat Pembuangan Akhir setelah diberlakukannya Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008, TPA yang masih menerapkan Sistem Open Dumping secara bertahap harus merubah metode Pengelolaaannya menjadi Sistim Sanitary Landfill ataupun Sistim Control Landfill terhitung sejak UU tersebut diundangkan, akan tetapi karena terbatasnya Sumber Daya yang tersedia Pemerintah Kabupaten Klungkung masih menerapkan metode Open Dumping sehingga dampak buruk emisi Gas Methan tetap mengancam masyarakat. Secara langsung bahaya kebakaran timbunan sampah TPA mengakibatkan meningkatnya Penyakit ISPA.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1. Sebagaimana diketahui bahwa Gas Methan adalah termasuk dalam kelompok Gas Rumah Kaca atau Green House Gas sebagai penyebab utama pemanasan global, bahkan Gas Methan memiliki kekuatan efek pemanasan 72 kali lebih kuat dari Gas Monoksida (CO) yang dihasilkan oleh pembakaran BBM dari mesin-mesin kendaraan dan pabrik-pabrik. Bertitik tolak dari data dan kondisi tersebut diatas maka Pemerintah Kabupaten Klungkung sejak Tahun 2015 berinisiatif untuk mengendalikan emisi Gas Methan pada TPA Sente untuk mengurangi dampak buruk yang diakibatkannya bahkan lebih jauh lagi dimanfaatkan sebagai sumber Bahan Bakar bagi masyarakat sekitar. Pemanfaatan gas methan sebagai bahan bakar disalurkan dari jam 07.00 – 10.00 (4 jam) setiap harinya dirasakan sangat membantu mengurangi pengeluaran untuk konsumsi bahan bakar minyak/gas.
2. Pemantauan kualitas air dilakukan untuk memastikan sumber-sumber air tidak mengandung cemaran yang dapat membahayakan masyarakat. Di Kabupaten



Klungkung pemantauan kualitas air dilakukan terhadap kualitas air di tiga sungai utama di Kabupaten Klungkung yaitu Tukad Unda, Tukad Jinah dan Tukad Bubuh pada tiga titik pengamatan yaitu hulu, tengah dan hilir sungai. Pengamatan dilakukan pada dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Dari hasil pemantauan terhadap kualitas air sungai tersebut dapat diambil kesimpulan mengenai penurunan beban pencemaran air di Kabupaten Klungkung.

3. Penanganan lahan kritis merupakan salah satu fokus Pemerintah Kabupaten Klungkung, mengingat lahan kritis yang tidak ditangani dapat menyebabkan kerusakan yang berkelanjutan terhadap lingkungan. Penanganan lahan kritis dilakukan dengan penanaman pohon pada wilayah yang kritis melalui pemberian bantuan bibit pohon yang kemudian ditanam dan dipelihara oleh masyarakat.
4. Program Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS). Penerapan program ini akan menyebabkan tidak adanya proses pemilahan. Sampah akan diolah secara langsung melalui proses peyueumisasi, briketisasi/peletisasi, dan gasifikasi, dengan menggunakan bio aktivator. Dalam tiga hari, bau hilang, dan dalam sepuluh hari volume sampah sudah berkurang. Ini juga akan menghasilkan briket dan pellet yang dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk proses memasak dan listrik. Pada tahun 2018, Program Aksi TOSS ini memperoleh penghargaan sebagai TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia.

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

Tabel 3.40
 Tingkat Efisiensi
 Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
 Tahun 2019

Indikator Kinerja	Target Capaian Sasaran (%)	Target Capaian Keuangan (%)	Standar Efisiensi	Realisasi Capaian Sasaran (%)	Realisasi Capaian Keuangan (%)	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	100	100	1	78,38	85,25	0,92	-0,08	Tidak Efisien
Jumlah	100	100	1	78,38	85,25	0,92	-0,08	Tidak Efisien

Sumber : data diolah



Pemerintah Kabupaten Klungkung
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2019, tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup adalah sebesar -0,08 dimana indeks efisiensi lebih rendah dari standar efisiensi. Pada tahun 2019 sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dicapai dengan tidak efisien. Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup didukung dengan program pendukung sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.41
Efisiensi Anggaran
Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Tahun 2019

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	7.034.197.317	5.417.066.287	1.617.131.029,52	77,01	DLHP
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	176.864.152	141.583.632	35.280.520,00	80,05	DLHP
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	183.553.456	155.863.896	27.689.560,00	84,91	DLHP
"Program Penanganan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Melalui Penanganan Sampah, Limbah dan RTH	6.805.443.804	6.409.387.587	396.056.217,00	94,18	DLHP
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	64.229.552	35.838.732	28.390.820,00	55,80	DLHP
Jumlah	14.264.288.281	12.159.740.134	2.104.548.146,52	85,25	

Sumber : SIMda Keuangan, 14 Maret 2020 (sebelum audit BPK)

Pada tahun 2018, Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup didukung dengan 5 program pendukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 14.264.288.281,00 dan terealisasi sebesar Rp. 12.159.740.134,00 dan sisa



anggaran sebesar Rp. 2.104.548.146,52,00 atau terealisasi sebesar 85,25 persen. Sasaran ini didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian dan Seluruh Kecamatan.

DOKUMENTASI PENCAPAIAN SASARAN



Bupati Klungkung uji coba memasak dengan bahan bakar gas metan hasil olahan sampah TPA SENTE

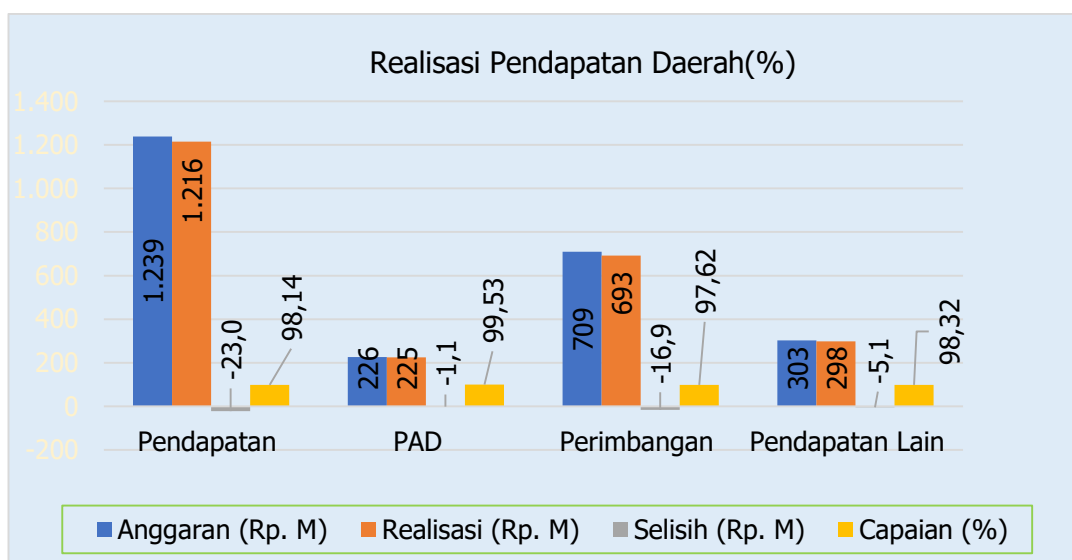


TOSS menjadi TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik



3.3. Realisasi Anggaran

Selain Sumber Daya Manusia, Pemerintah Kabupaten Klungkung juga menggunakan Sumber Daya lain untuk mencapai sasaran serta target yang telah ditetapkan di Tahun 2019. Dana yang digunakan adalah salah satu sumber daya yang menjadi modal pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran. Dibawah ini disajikan kondisi anggaran pendapatan Kabupaten Klungkung Tahun 2019



Sumber : Simda Keuangan, 14 Maret 2020 (Sebelum audit BPK)

Gambar 3.40 Capaian Anggaran Pendapatan Kabupaten Klungkung, 2019 (%)

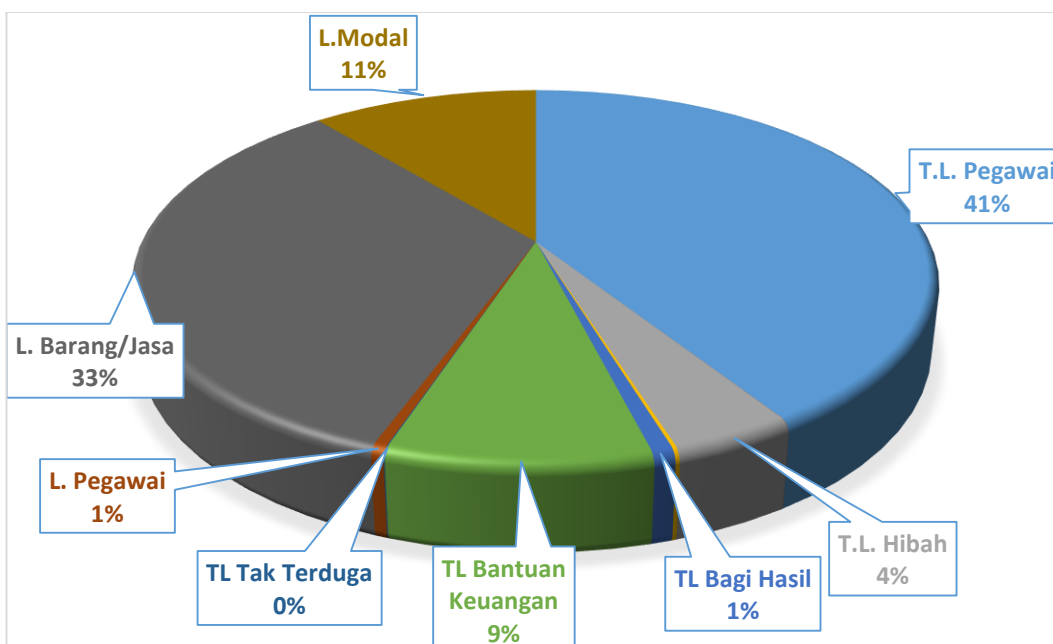
Pendapatan Kabupaten Klungkung dianggarkan sebesar Rp. 1.238.556.622.376,76 dan terealisasi sebesar Rp. 1.215.541.424.644,93 atau tercapai sebesar 98,14 persen. Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp. 226.077.697.156,8 terealisasi sebesar Rp. 225.016.026.871,4 atau tercapai sebesar 99,53 persen. Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp. 709.450.646.208,00 terealisasi sebesar Rp. 692.588.595.651,00 atau tercapai sebesar 97,62 persen. Pendapatan Lain-Lain direncanakan sebesar Rp. 303.028.279.011,96 terealisasi sebesar Rp. 297.936.802.122,53 atau tercapai sebesar 98,32 persen. Selain merencanakan pendapatan, Pemerintah Kabupaten Klungkung juga merencanakan belanja yang disajikan sebagai berikut:



Sumber : Simda Keuangan, 14 Maret 2020 (Sebelum audit BPK)

Gambar 3.41 Anggaran Belanja Kabupaten Klungkung, 2019 (%)

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa belanja langsung Pemerintah Kabupaten Klungkung masih lebih kecil dari belanja Tidak Langsung. Belanja Langsung sebesar 45 persen dan Belanja Tidak Langsung sebesar 55 persen. Berikut disajikan komposisi rinci dari anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Klungkung.

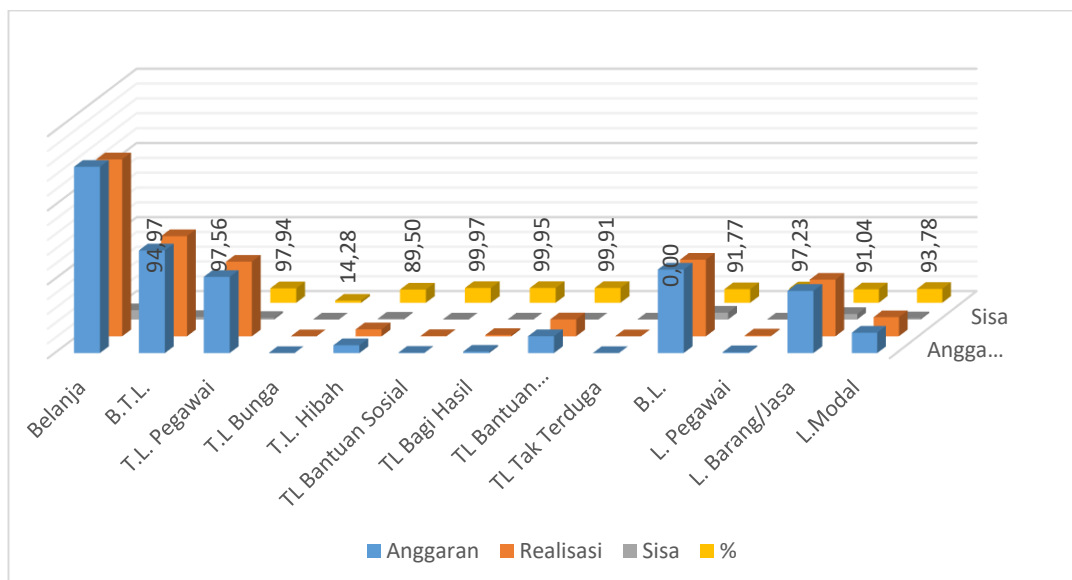


Sumber : Simda Keuangan, 14 Maret 2020 (Sebelum audit BPK)

Gambar 3.42 Anggaran Belanja Kabupaten Klungkung, Perubahan 2019 (%)

Dari gambar dapat diketahui bahwa Belanja Pegawai merupakan Belanja dengan persentase terbesar dari keseluruhan porsi belanja, disusul Belanja Barang/Jasa dan

Belanja Modal. Untuk mengetahui serapan anggaran masing-masing belanja tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : Simda Keuangan, 14 Maret 2020 (Sebelum audit BPK)

Gambar 3.43 Capaian Anggaran Belanja Kabupaten Klungkung, 2019 (%)

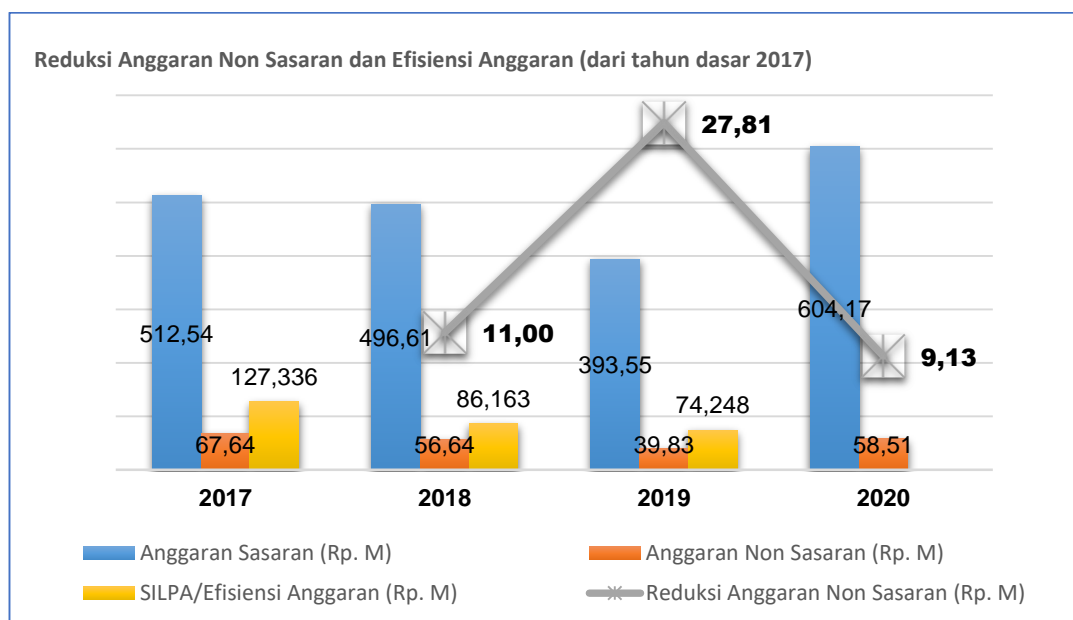
Pada tahun 2019 Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Klungkung terdiri atas Belanja Langsung dengan anggaran Rp. 564.623.961.975,89 terealisasi sebesar Rp. 518.168.765.792,14 atau capaian 91,77 persen, terdiri atas Belanja Pegawai dengan anggaran Rp. 5.701.589.340,00 terealisasi sebesar Rp. 5.543.901.145,00 atau tercapai sebesar 97,23 persen. Belanja Barang dan Jasa dengan anggaran Rp. 420.897.117.227,43 terealisasi sebesar Rp 383.190.761.768,21 atau capaian 91,04 persen dan Belanja Modal dengan anggaran Rp. 138.025.255.408,46 terealisasi sebesar Rp. 129.434.102.878,93 dengan capaian 93,78 persen. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 694.207.854.318,64 dengan realisasi sebesar Rp. 677.296.378.016,80 atau tercapai sebesar 97,56 persen. Belanja Tidak Langsung terdiri atas Belanja Pegawai dengan anggaran Rp. 515.357.290.190,14 dengan realisasi sebesar Rp. 504.748.242.236,00 atau tercapai 97,94 persen. Belanja Bunga dengan anggaran Rp. 162.250.000,00 realisasi sebesar Rp. 23.163.906,56 atau tercapai 14,28%. Belanja Hibah dengan anggaran Rp. 52.910.563.193,00 dengan realisasi sebesar Rp. 47.356.862.193,00 atau tercapai 9,50 persen. Belanja Bantuan Sosial dengan anggaran Rp. 1.901.100.000,00 realisasi sebesar Rp. 1.900.600.000,00 atau capaian sebesar 99,97 persen. Belanja Bagi Hasil dengan



anggaran Rp. 9.275.378.903,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.270.546.665,00 dengan capaian 99,95 persen. Belanja Bantuan keuangan dengan anggaran Rp. 114.101.272.032,50 dengan realisasi Rp. 113.996.963.016,24 atau tercapai 99,91 persen. Belanja Tidak Terduga dengan anggaran Rp. 500.000.000,00 tidak terealisasi atau tercapai 0 persen. Demikian disajikan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2019. Realisasi anggaran untuk pencapaian masing-masing sasaran disampaikan pada Lampiran 1.

3.4. Efisiensi Sejak Penerapan SAKIP

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam pencapaian target-target pembangunan daerah telah terbukti mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada tahun 2018 Pemerintah Kab. Klungkung berhasil mengurangi Anggaran yang tidak langsung mendukung pencapaian sasaran kinerja (anggaran rutin) sebesar Rp. 10.996.635.415,00, dan pada tahun 2019 meningkat lagi menjadi Rp. 16.810.699.476,00 dari anggaran tahun 2018. Pada tahun 2020, anggaran yang tidak langsung mendukung pencapaian sasaran mencapai Rp. 39.830.151.457 atau terjadi penurunan sebesar 9,13 persen dari tahun dasar 2017. Berikut ini disajikan data efisiensi anggaran non sasaran Pemerintah Kabupaten Klungkung.

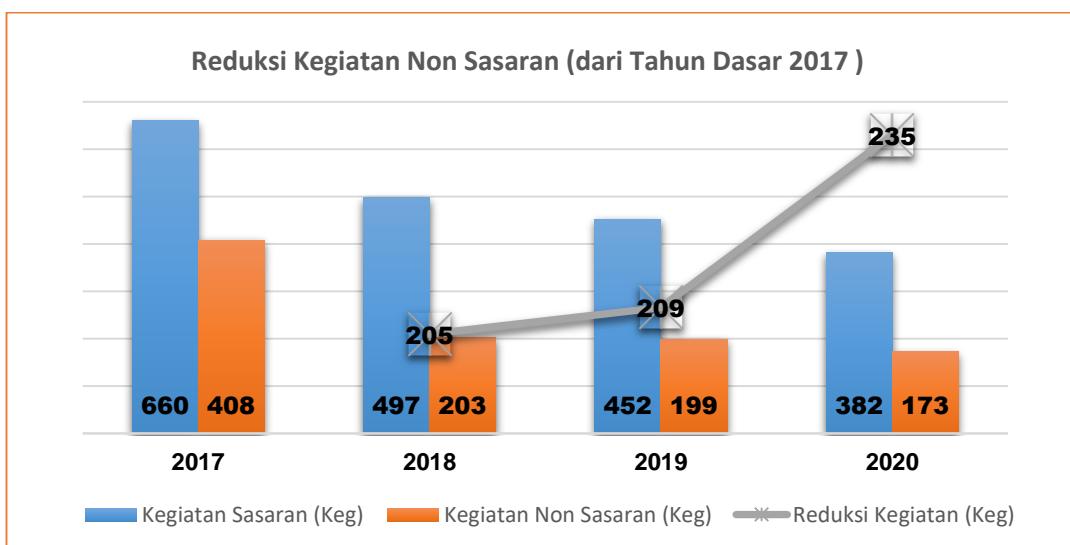


sumber : Data Diolah

Gambar 3.44 Reduksi Anggaran Non Sasaran dan Efisiensi dari Tahun Dasar 2017



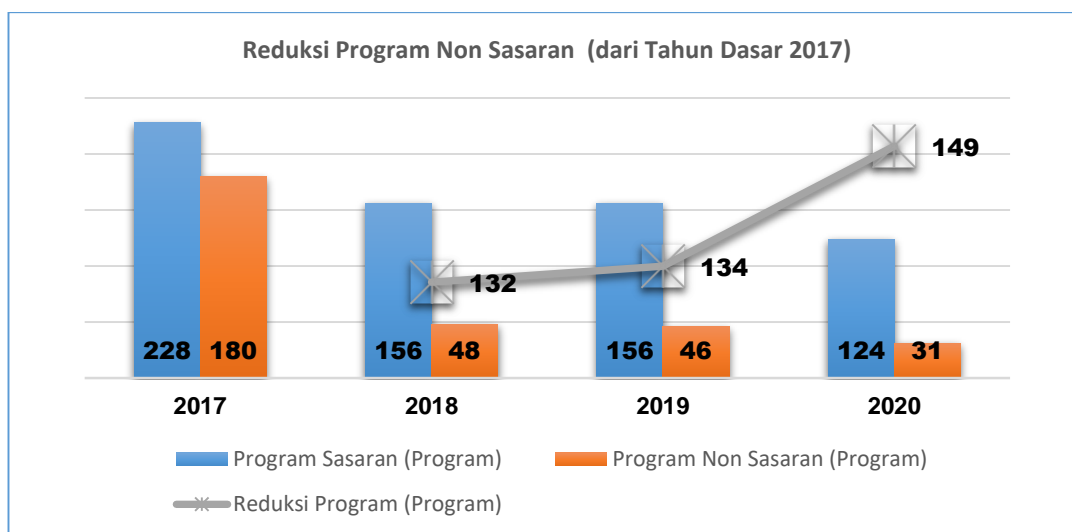
Anggaran sasaran merupakan anggaran yang dialokasikan langsung merealisasikan program-program pembangunan daerah (non pelayanan kesekretariatan). Anggaran non sasaran merupakan anggaran yang tidak langsung merealisasikan program-program pembangunan daerah namun mendukung pelaksanaan program-program pembangunan daerah (pelayanan kesekretariatan). Anggaran non sasaran diantaranya terdiri dari belanja sarana prasarana aparatur dan belanja untuk pembiayaan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Klungkung mengefisiensi anggaran sebesar 86.163 milyar rupiah dan pada tahun 2019 mengefisiensi anggaran sebesar 74,248 milyar rupiah. Selain disebabkan adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), pada tahun 2019, efisiensi juga merupakan dampak perubahan mekanisme pembayaran tunjangan, dimana mulai tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Klungkung menerapkan pembayaran tunjangan berbasis kinerja (nilai jabatan dan aktivitas harian) dan menghilangkan anggaran untuk honor PNS dan perjalanan dinas dalam Provinsi Bali serta pengurangan perjalanan dinas luar provinsi. Selain itu juga direduksi penyediaan Bahan Bakar Minyak Pemanas Kendaraan Dinas. Setelah penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dilakukan upaya penyesuaian antara kinerja yang dipertanggungjawabkan dengan penyediaan anggaran dalam program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja masing-masing pejabat eselon.



Sumber : data diolah

Gambar 3.45 Reduksi Kegiatan Non Sasaran (dari tahun dasar 2017)

Mulai Tahun 2018, dilakukan reduksi kegiatan yang tidak langsung mendukung sasaran (pelayanan kesekretariatan). Pada tahun 2017 terdapat 408 kegiatan non sasaran dan berkurang menjadi 203 kegiatan pada tahun 2018. Pada tahun 2019, kegiatan non sasaran berkurang menjadi hanya 199 kegiatan. Pada tahun 2020 kegiatan non sasaran berjumlah 173 kegiatan. Dan sejak 2017 telah direduksi sebanyak 235 kegiatan. Selain reduksi kegiatan non sasaran, juga dilakukan reduksi program non sasaran (pelayanan kesekretariatan)



Sumber : data diolah

Gambar 3.46 Reduksi Program Non Sasaran (dari tahun dasar 2017)

Pada tahun 2017, terdapat 180 program non sasaran (pelayanan kesekretariatan) dan pada tahun 2018 berkurang menjadi 48 program non sasaran (pelayanan kesekretariatan). Pada tahun 2020 program non sasaran berjumlah 31 program. Dari tahun dasar 2017, program non sasaran telah direduksi sebanyak 149 kegiatan. Hal tersebut merupakan dampak dari efisiensi perencanaan program pelayanan kesekretariatan. Selain efisiensi anggaran dan kegiatan, setelah penerapan SAKIP, Pemerintah Kabupaten Klungkung juga melakukan penyelarasan kinerja yang diperjanjikan sejak penyusunan rencana kerja (Renja) hingga penganggaran dan pelaporan kinerja yang dicapai. Setelah penyusunan matrik kinerja ditemukan adanya tumpang tindih fungsi organisasi, penempatan SDM yang tidak sesuai dengan beban kerja dan penempatan SDM yang tidak sesuai dengan kompetensi teknis. Langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan evaluasi struktur organisasi pada tahun 2019, menempatkan SDM sesuai dengan kualifikasi



teknis sesuai hasil evaluasi jabatan dan melakukan penempatan ulang SDM agar sesuai dengan beban kerja masing-masing perangkat daerah di tahun 2019.

3.5. Prestasi dan Penghargaan Tahun 2019

Berikut ini disajikan prestasi dan penghargaan yang berhasil diraih Pemerintah Kabupaten Klungkung di tingkat Nasional.

1. Predikat Baik untuk Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) oleh Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia.
2. TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik untuk inovasi TOSS (Tempat Olah Sampah Setempat) dan BIMA JUARA (Beli Mahal Jual Murah-Program perlindungan bagi petani dan beras lokal) oleh Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia.
3. TOP 99 Inovasi KRIS (Kring Sehat) Inovasi pelayanan kesehatan dengan ambulance yang mendatangi masyarakat langsung ke tempat tinggal dan melakukan penanganan awal di tempat tinggal pasien.
4. Predikat Kepatuhan Amat Tinggi untuk Kepatuhan Terhadap Pemenuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia.
5. Penghargaan PASTIKA AWYA PARIWARA, dianugerahkan kepada 10 daerah di Indonesia yang telah memiliki kebijakan/peraturan dan implementasi tentang larangan iklan rokok luar gedung
6. Predikat Wajar Tanpa Pengecualian untuk Laporan Keuangan 4 Tahun Berturut-Turut (Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
7. Puskesmas dengan pelayanan ramah anak terbaik 2018
8. Kabupaten Layak Anak Tingkat Pratama.
9. MKK (Manggala Karya Kencana) Bupati Klungkung dan Ibu Bupati Klungkung .
10. Peringkat Ke-6 Innovative Government Award yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
11. Top 10 Kabupaten Terbaik Tingkat Nasional dalam penganugerahan Wonderful Indonesia Tourism Award 2018 oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.
12. Kabupaten dengan capaian pelaksanaan Imunisasi Measles Rubella (MR)



- Fase II Tahun 2018 tertinggi di Provinsi Bali oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
13. Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia 4 Kali berturut-turut (Tahun 2015-2018) oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
 14. Kabupaten dengan Universal Health Coverage diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
 15. Juara ke II pada Turnamen Gate Ball Bupati Sleman Cup Ke-8 Tahun 2019
 16. Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Baik untuk Rumah Sakit Umum Daerah
 17. Medali Emas 4 Kali berturut-turut pada ajang PorProv Bali untuk Cabang Olahraga Taekwondo
 18. Juara I Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD Cabang Olahraga Bulutangkis Tunggal Putra
 19. Juara I Nasional Festival Literasi Sekolah (FLS) SMP Cabang Lomba Cerpen
 20. Juara III Nasional Pemilihan Guru SD Berprestasi
 21. Juara I TK Provinsi Teknologi Tepat Guna untuk Usaha Batok Kelapa
 22. Juara I Geguritan Pasangan Remaja Putra ajang Utsawa Dharmagita
 23. Juara I Palawakya Pasangan Remaja Putra ajang Utsawa Dharmagita
 24. Juara III Lomba Kelompok Sadar Wisata Provinsi Bali
 25. Pasar Tertib Ukur untuk 2 pasar yaitu Pasar Tusan dan Pasar Kusamba



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Dari uraian dan analisis serta evaluasi atas pencapaian 8 sasaran dengan 8 indikator kinerja utama, tersirat secara jelas bahwa pemerintah kabupaten Klungkung telah berusaha mewujudkan capaian kinerja sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan dan bertekad membangun sebuah sistem pertanggungjawaban kinerja yang lebih akuntabel. Hal tersebut tampak jelas dari upaya memperbaiki dokumen perencanaan melalui penyusunan IKU, RPJMD dan Renstra agar seluruh dokumen perencanaan tersebut selaras dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberlakukan reward dan punishment berbasis aktivitas harian pada tahun 2019 serta berbasis capaian rencana aksi, aktivitas harian dan disiplin pada tahun 2020.
2. Walaupun beberapa indikator kinerja telah melampaui target yang ditetapkan, namun ada permasalahan yang muncul akibat dinamika masyarakat yang sangat tinggi terutama arus investasi sektor pariwisata yang berdampak pada alih fungsi lahan, kesenjangan antar wilayah dan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah yang berpotensi menjadi penghambat capaian kinerja pemerintah daerah.
3. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 8 sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 terdapat 4 sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan sangat baik ($\geq 100\%$), yaitu sasaran 2,5,6, dan 7 dan terdapat 4 sasaran strategis dilaksanakan dengan baik ($< 100\%$) yaitu sasaran strategis 1,3,4,dan 8. Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung adalah sebesar 101,73%.
4. Disamping capaian kinerja tersebut diatas, kerja keras segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 juga mendapat aspirasi dari berbagai pihak dalam berbagai bentuk pemberian penghargaan baik ditingkat regional maupun nasional disamping capaian kinerja pembangunan lainnya seperti pencapaian target MDGs, angka IPM yang semakin meningkat, PDRB, Distribusi pendapatan dengan tingkat pemerataan tinggi dan kesenjangan



rendah dan tingkat kemiskinan dibawah rataa-rata nasional serta tingkat pengangguran terbuka yang relatif kecil menjadi bukti nyata kesungguhan mewujudkan Klungkung Unggul dan Sejahtera.

4.2. Rekomendasi

Namun demikian harus diakui bahwa dalam rangka perbaikan kinerja kedepan, ada beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian yang lebih serius diantaranya :

1. Terhadap sasaran dan indikator kinerja yang belum mencapai target diantaranya, sasaran strategis 1,3,4 dan 8, perlu dilakukan evaluasi yang lebih mendalam untuk mendapat perumusan program dan kegiatan yang mampu mengatasi permasalahan tersebut pada tahun yang akan datang.
2. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi, mekanisme, manajemen internal organisasi pemerintah Kabupaten Klungkung ditingkatkan secara proaktif dan memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
3. Dalam rangka perbaikan sistem, monitoring, evaluasi, pengendalian capaian kinerja dan pelaporan kinerja, maka upaya pengembangan terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung perlu semakin ditingkatkan di masa yang akan datang.



Pemerintah Kabupaten Klungkung
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019

**CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN MASING-MASING SASARAN
TAHUN 2019**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Jml Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian Keuangan (%)	Tingkat Efisiensi	Ket
1	Lestari dan berkembangnya kebudayaan daerah	Cakupan Budaya yang lestari (%)	23,5	18,21	77,49	3	8.818.506.026	8.566.983.639	251.522.387	97	-0,20	Tidak Efisien
2	Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,13	71,71	100,82	21	250.431.317.424	225.265.125.840	25.166.191.585	90	0,12	Efisien
3	Menurunnya angka kemiskinan dari 6,29% menjadi 3%	Persentase Penduduk Miskin (%)	4,91	5,4	90,02	12	30.806.399.358	27.889.549.408	2.916.849.950	91	-0,01	Tidak Efisien
4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan PDRB (%)	6	5,44	90,67	25	34.129.955.308	31.183.323.812	2.946.631.496	91	-0,01	Tidak Efisien
5	Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, responsif, transparan, santun dan inovatif	Indek Reformasi Birokrasi	55	57,26	104,11	56	77.407.968.163	66.801.066.166	10.606.901.997	86	0,21	Efisien
6	Terwujudnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundangan	Indeks Demokrasi Daerah	76,1	82,37	108,24	13	9.207.755.449	8.334.862.253	872.893.196	91	0,20	Efisien
7	Mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah	Indeks Ketimpangan Infrastruktur	55	19,74	164,1	17	96.090.838.999	89.106.669.538	6.984.169.461	93	0,77	Efisien
8	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan	85	66,62	78,38	5	14.264.288.281	12.159.740.134	2.104.548.147	85	-0,08	Tidak Efisien



Pemerintah Kabupaten Klungkung
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019
